

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan rahmat dan karunianya jua, Laporan Kinerja Bappeda Tahun Anggaran 2021 ini dapat kami selesaikan secara tepat waktu. Shalawat dan salam tak lupa kami haturkan ke haribaan junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, karena dengan hadirnya beliau ke dunia ini membawa cahaya yang dapat menerangi kegelapan di alam semesta.

Laporan kinerja yang disusun ini merupakan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Bappeda di tahun 2021. Tahun yang penuh dengan dinamika sehingga semua SKPD harus melakukan penyesuaian terkait dengan kondisi pandemi dan terbitnya Permendagri 90 Tahun 2019, serta Kepmendagri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 yang merubah kodifikasi dan nomenklatur program dan kegiatan yang berimbas pada penyesuaian yang memakan energi yang luar biasa banyaknya dari semua SKPD. Sebuah fenomena yang secara kasat mata menyebabkan menurunnya intensitas kegiatan pada semua sektor. Dengan kondisi yang demikian maka penggambaran terhadap bagaimana kinerja Bappeda Tanah Laut pada tahun 2021 kami harapkan dapat tergambar pada laporan kinerja ini.

Tentunya banyak kekurangan yang terdapat dalam Laporan Kinerja ini sehingga tegur sapa, saran dan masukan kami perlukan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja yang kami sampaikan ini dapat memenuhi kriteria sebagai Laporan Kinerja yang diharapkan oleh pemerintah.

Pelaihari, Januari 2022

Kepala Bappeda

Andris Evony, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19790928 199711 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	2
B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi	1
C. Isu Strategis	12
D. Produk dan Layanan	16
E. Sistematika Penyajian	17
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	18
A. Visi RPJMD	18
B. Misi RPJMD	18
C. Tujuan dan Sasaran Strategis	19
D. Indikator Kinerja Utama	22
E. Perjanjian Kinerja	22
F. Program dan Kegiatan	27
Bab III Akuntabilitas Kinerja	29
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	29
1. Sasaran RPJMD	29
2. Akuntabilitas Kinerja Kepala Badan	21
3. Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Badan	33
1) Akuntabilitas Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian	35
2) Akuntabilitas Kinerja Kasubbag Perencanaan	37
3) Akuntabilitas Kinerja Kasubbag Keuangan	38
4. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Perencanaan Makro	40
1) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Penyusunan Program	41
2) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	43
5. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah ...	44
1) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Infrastruktur	46
2) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Pengembangan Wilayah	47
6. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Ekonomi dan SDA.....	50
1) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Pertanian, Industri, Perdagangan & Koperasi .	52
2) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	53
7. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Bidang Sosial Budaya	56
1) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Politik dan Pemerintahan	57
2) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Sumber Daya Manusia	59
8. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	61
1) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya	62
2) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur...	64
B. Akuntabilitas Keuangan	66
1. Anggaran dan Realisasi APBD 2020	66
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program	69
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan 2020	72

Bab IV Penutup	84
A. Kesimpulan	84
B. Strategi Peningkatan Kinerja	85

Lampiran

1. IKU
2. Pernyataan Hasil Reviu
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 bertanda tangan
4. Cascading/Pohon Kinerja
5. Capaian Kinerja Per Triwulan (1-4)
6. Monev Renstra
7. Matrik Keselarasan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2021 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis kepada Bupati Tanah Laut atas pencapaian kinerja Bappeda selama tahun anggaran 2021.

Tahun Anggaran 2021 ini dapat dikatakan begitu banyak dinamika eksternal seperti pandemic covid-19, serta terbitnya Permendagri 90 Tahun 2019, releasenya aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) yang mengakibatkan perlunya dilakukan penyesuaian oleh semua SKPD termasuk Bappeda. Penyesuaian-penyesuaian tersebut membuat kinerja Bappeda mau tidak mau mengalami penurunan akselerasi karena harus menyesuaikan dengan kondisi dan aturan-aturan baru. Menurunnya tingkat capaian baik pada kinerja fisik dan keuangan merupakan kondisi yang harus ditanggungjawab Bappeda.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

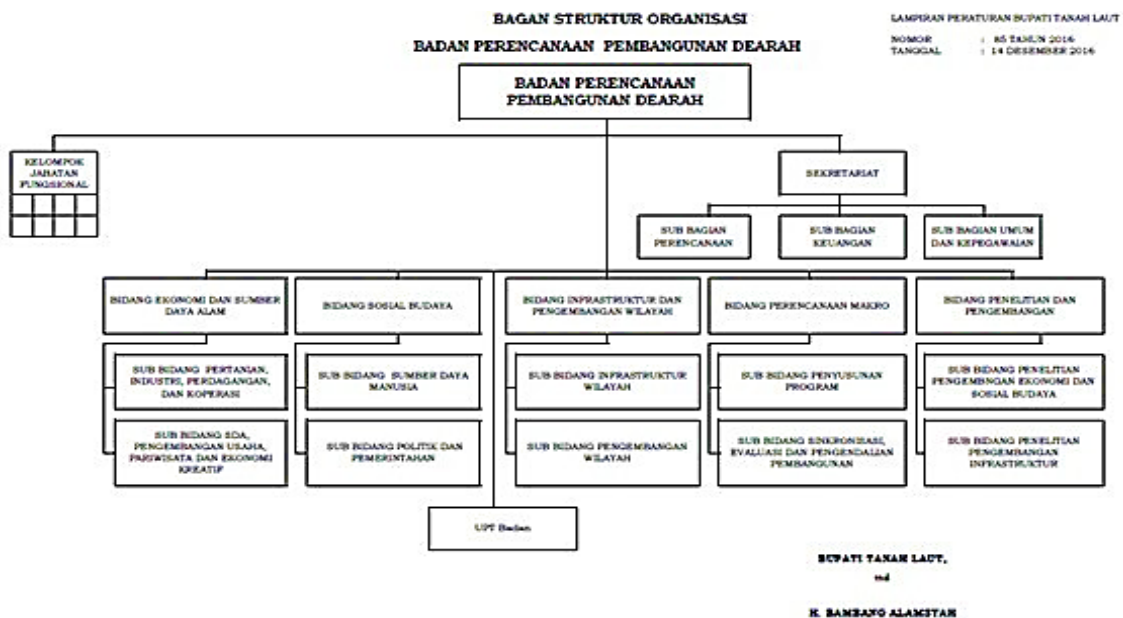
Tujuan penyusunan Laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan;
- b. Untuk memperoleh informasi mengenai kinerja program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran;
- c. Untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki serta sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya

- d. Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang; dan
- e. Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan *clean government* menuju *good governance*, dan untuk memenuhi tiga pilar utama yaitu akuntabilitas, tranparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, SOTK BAPPEDA dapat dilihat pada bagan berikut :



Dari bagan diatas dapat diketahui bahwa Bappeda Tanah Laut dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Badan dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) orang kasubbag dan dibantu pula oleh 5 (lima) orang Kepala Bidang yang masing-masing membawahi 2 (dua) orang Kasubbid. Selain itu, Bappeda dilengkapi dengan kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun detail numenklatur tiap jabatan yang ada di Bappeda adalah

sebagai berikut :

1. Kepala Badan.
2. Sekretaris, yang membawahi 3 orang Kasubbag yaitu :
 - 1) Kasubbag Perencanaan
 - 2) Kasubbag Keuangan
 - 3) Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
3. Kepala Bidang Sosial Budaya, yang membawahi 2 orang Kasubbid yaitu :
 - 1) Kasubbid Sumber Daya Manusia
 - 2) Kasubbid Politik dan Pemerintahan.
4. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
 - 1) Kasubbid Pertanian, Industri, Perdagangan dan Koperasi; dan
 - 2) Kasubbid Sumber Daya Alam, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
5. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri dari :
 - 1) Kasubbid Infrastruktur Wilayah; dan
 - 2) Kasubbid Pengembangan Wilayah.
6. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
 - 1) Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya;
 - 2) Kasubbid Penelitian dan Pengembangan dan Infrastruktur.
7. Kepala Bidang Perencanaan Makro terdiri dari :
 - 1) Kasubbid Penyusunan Program; dan
 - 2) Kasubbid Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Terkait dengan Tugas dan Fungsi Bappeda sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan penelitian pengembangan.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan dan penelitian pengembangan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan.
- d. Pelaksanaan administrasi Badan.
- e. Pembinaan UPT Badan.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Secara detil, setiap jabatan yang ada di Bappeda mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Sekretariat

- 1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan penyusunan perencanaan program kerja dan anggaran, administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi :
 - a) pengoordinasian penyelenggaraan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b) pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c) pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d) penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;

- e) penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan;
- f) pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, perencanaan program kegiatan serta penataan barang;
- g) penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
- h) pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- i) pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
- j) pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- k) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Sekretariat membawahi :

a) Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran belanja, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan.

b) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana keuangan dan anggaran serta

pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan.

c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

2. Bidang Sosial Budaya

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang sosial budaya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :

- 1) pengkoordinasian Penyusunan Rancangan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya;
- 2) memverifikasi Rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya;
- 3) pengkoordinasian Pelaksanaan Musrenbang Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya;
- 4) pengkoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya;
- 5) pengkoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi di Kabupaten serta Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Sosial Budaya;
- 6) pelaksanaan Pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Sosial Budaya;
- 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 8) memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Sosial Budaya membawahi :

1) Sub Bidang Sumber Daya Manusia

Sub Bidang Sumber Daya Manusia melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait perencanaan bidang Sumber Daya Manusia.

2) Sub Bidang Politik dan Pemerintahan

Sub Bidang Politik dan Pemerintahan melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait perencanaan bidang Politik dan Pemerintahan.

3. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas untuk menyiapkan perumusan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan sumber daya alam.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

- 1) pengkoordinasian penyusunan Rancangan Pembangunan Daerah, pada lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- 2) memverifikasi rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah pada lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- 3) pengoordinasian, penyusunan materi dan substansi dalam penyusunan Rancangan Pembangunan Daerah pada lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dalam perencanaan pembangunan daerah pada lingkup bidang Ekonomi dan Sumber daya alam;
- 5) pengoordinasian dan penyusunan materi dan substansi untuk pelaksanaan Perencanaan pembangunan daerah pada lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- 6) pengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat

daerah kabupaten pada lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam;

- 7) pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi di Kabupaten Tanah Laut pada lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- 8) pelaksanaan pengendalian/monitoring, pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- 9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang - undangan; dan
- 10) memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam membawahi :

- 1) Sub Bidang Pertanian, Industri, Perdagangan dan Koperasi
Sub Bidang Pertanian, Industri, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan perencanaan pemantauan, dan monitoring serta sinkronisasi kebijakan Perencanaan Pembangunan pada lingkup subbidang pertanian, industri, perdagangan dan koperasi.
- 2) Sub Bidang Sumber Daya Alam, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sub Bidang Sumber Daya Alam, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan perencanaan pemantauan, dan monitoring serta sinkronisasi kebijakan Perencanaan Pembangunan pada lingkup subbidang Sumber Daya Alam, pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif.

4. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi :

- 1) pengkoordinasian Penyusunan Rancangan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 2) pemverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 3) pengkoordinasian pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 4) pengkoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Perencanaan Pembangunan lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 5) pengkoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 6) pengkoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga Provinsi di Kabupaten Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 7) pengkoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 8) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- 9) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
- 10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan; dan

- 11) pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah membawahi :

- 1) Sub Bidang Infrastruktur Wilayah

Sub Bidang Infrastruktur Wilayah melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait perencanaan bidang Infrastruktur Wilayah yang meliputi urusan keciptaan karya, bina marga, pengairan, perumahan pemukiman, perhubungan dan telekomunikasi.

- 2) Sub Bidang Pengembangan Wilayah

Sub Bidang Pengembangan Wilayah melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait perencanaan Pengembangan Wilayah yang meliputi urusan ketata ruang, lingkungan hidup dan pertanahan.

5. Bidang Perencanaan Makro

Bidang Perencanaan Makro mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan dalam rangka integrasi (keterpaduan perencanaan) dan sinkronisasi (penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku) perencanaan makro pembangunan, perencanaan pembiayaan dan pengendalian pembangunan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan Makro menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- 2) pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- 3) penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana

- pendanaannya dalam jangka panjang, menengah dan tahunan;
- 4) pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - 5) pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
 - 6) pemantauan, evaluasi, analisis dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 8) pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Perencanaan Makro membawahi :

- 1) Sub Bidang Penyusunan Program

Sub Bidang Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka integrasi dan sinkronisasi perencanaan makro pembangunan daerah dan perencanaan pembiayaan.

- 2) Sub Bidang Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
- Sub Bidang Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan terkait Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penelitian dan pengembangan.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Penelitian dan

Pengembangan Daerah sesuai dengan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 2) fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 3) perumusan kebijakan operasional, pembinaan, fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan sumber daya alam, teknologi dan inovasi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, bidang sosial dan budaya;
- 4) perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 5) pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 6) pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi di Kabupaten Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 7) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 9) pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi :

- 1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya.

- 2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur.

7. Unit Pelaksana Teknis Badan

Unit Pelaksana Teknis Badan bertugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan.

Kepala UPT bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Terkait Kelompok Jabatan Fungsional ini terdapat ketentuan sebagai berikut :

- 1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- 5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

C. Isu Strategis

Analisa isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Isu strategis bagi Bappeda diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Bappeda di masa lima tahun mendatang. Isu strategis merupakan suatu kondisi / permasalahan yang mempengaruhi langkah dan proses serta menentukan keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi. Terdapat ada 5 (Lima) akar masalah yang sampai saat ini masih ditemukan, yaitu:

1. Belum optimalnya Kualitas SDM perencanaan.

Kualitas Sumber Daya Manusia yang menyusun sebuah perencanaan akan sangat menentukan kualitas perencanaan yang dihasilkan. Untuk menjadi seorang perencana tidaklah mudah. Diperlukan pemahaman terhadap agenda besar yang diinginkan oleh Pemerintah daerah. Agenda besar tersebut adalah RPJMD. Didalamnya telah dituangkan seluruh target capaian yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 5 Tahun. Adanya tujuan, sasaran, indikator dan target harus betul betul difahami oleh para perencana baik pada SKPD Bappeda sendiri ataupun oleh para perencana yang ada di SKPD. Secara mendasar Bappeda memiliki cukup ketergantungan dengan para perencana di SKPD karena semua arahan dan pengendalian yang disampaikan harus diejawantahkan oleh para perencana SKPD kedalam indikator-indikator

sasaran yang termuat dalam Renstra dan Renja. Sinkronisasi antara Bappeda dan para perencana SKPD inilah yang diperlukan untuk melahirkan sebuah perencanaan yang berkualitas, yaitu perencanaan yang selaras dengan RPJMD.

Sudah menjadi masalah klasik bahwa penempatan para ASN perencana di SKPD seringkali berubah dari waktu ke waktu. Perencana yang awalnya sudah mulai memahami tugas dan kewajibannya seringkali kemudian mengalami perpindahan tugas apakah karena mutasi ataupun promosi jabatan sehingga akan datang para perencana baru yang belum memiliki kemampuan dan pemahaman sebagaimana perencana sebelumnya. Hal ini salah satu sebab mengapa pembinaan keperencanaan Bappeda kepada para perencana di SKPD senantiasa mengalami pasang surut. Kondisi ini menyebabkan penyusunan perencanaan setiap tahun seringkali pula terpengaruh dengan penggantian posisi seorang perencana di SKPD, disamping memang secara alami selalu ada perbedaan kualitas keterampilan dari setiap perencana.

2. Belum dijadikannya Musrenbang sebagai pintu masuk utama penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Musrenbang semestinya merupakan sarana yang sangat tepat untuk langkah awal menyusun perencanaan setiap tahunnya. Dalam mekanisme musrenbang ini sebenarnya sudah terakomodasi berbagai pendekatan yang memungkinkan disusunnya perencanaan secara matang. Dalam musrenbang terdapat mekanisme perencanaan dari bawah (bottom up planing), mekanisme perencanaan dari atas (top down planning), mekanisme perencanaan teknokratis, dan mekanisme politis. Pada mekanisme bottom up, masyarakat mempunyai jalur untuk menyampaikan aspirasinya, keinginannya yang memang telah dibicarakan pada tingkat desa saat dilaksanakan musyawarah desa dan musyawarah kecamatan. Pada mekanisme top down, Pemerintah

dan SKPD mempunyai jalur untuk melaksanakan program-program pemerintah daerah dan pemerintah di atasnya. Pada mekanisme teknokratis, Para cendekiawan dan publik dapat menyampaikan usulan yang relatif telah matang dipandang dari sudut pandang teknis perencanaannya. Pada Mekanisme politis, para wakil rakyat memiliki pintu masuk untuk menyampaikan keinginan para konstituennya. Semua sudah memiliki pintu masuk melalui musrenbang pada beberapa tingkatannya. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa banyak usulan masyarakat yg hilang entah kemana padahal telah tersaring secara baik di level desa dan kecamatan. Padahal sebenarnya masyarakatlah yang tahu dengan kondisi di level akar rumput. Kadang terjadi ego sektoral sehingga justru perencanaan top planning lebih dominan dan mekanisme politik juga tak kalah meramaikan riuhnya pembahasan usulan kegiatan. Adanya usulan masyarakat yang langsung ke SKPD, langsung ke pimpinan daerah, atau ke wakil rakyat menambah rumitnya penyusunan perencanaan. Bappeda menjadi pihak yang disalahkan masyarakat karena dinilai tak mampu menjaga kontinuitas usulan masyarakat sehingga pameo bahwa “Musrenbang hanya formalitas dan tidak ada gunanya” dimata masyarakat menjadi sangat sulit untuk dihilangkan. Ketika ini terjadi, kembali Bappeda yang harus babak belur menerima semua yang dikeluhkan semua pihak.

3. Belum optimalnya pengendalian dalam penyusunan perencanaan. Dalam prakteknya, penyusunan perencanaan melalui berbagai tahap, dari perencanaan awal dimana SKPD diasistensi renjanya dan kemudian diminta untuk menyampaikan usulan kegiatan. Setelah pagu disampaikan maka kembali dilakukan rasionalisasi usulan oleh masing-masing SKPD. Hasil rasionalisasi tadi kemudian diinput kedalam SIPD. Sayangnya setelah proses input selesai seringkali terjadi pengendalian menjadi sulit dilakukan karena biasanya batas waktu penginputan yang sangat terbatas dan terkesan kejar tayang. Ada

beberapa titik krusial dimana pengendalian sebenarnya bisa dilakukan tetapi menjadi tidak dapat dilakukan oleh Bappeda. Titik pertama berada pada saat renja sudah diasistensi dan perencanaan awal berupa kegiatan disusun. Bappeda tidak dapat menjamin bahwa hasil asistensi dipatuhi oleh SKPD. Titik kedua terjadi pada saat kegiatan sudah disusun oleh SKPD sesuai pagu tentatif. Saat inipun Bappeda tidak memiliki mekanisme pengendalian untuk menjamin bahwa usulan kegiatan berdasarkan pagu masih sesuai dengan renja yang sudah diasistensi Bappeda. Titik ketiga terjadi pada saat penginputan. Kembali Bappeda tidak memiliki mekanisme bahwa apa yang diinput oleh SKPD adalah sesuai kesepakatan saat asistensi. Mungkin tidak semua titik krusial bisa terbaca oleh Bappeda, tetapi pada kenyataannya masih banyak ditemui ketidakpatuhan terhadap hasil asistensi. Salah satunya dengan mengusulkan kegiatan yang kurang penting dan kemudian mengusulkan penambahan anggaran melalui Telaahan Staf yang kemudian berkembang secara liar hingga pembengkakan anggaran melambung melebihi proyeksi anggaran yang dimiliki pemerintah daerah. Fenomena yang nampak kemudian adalah RKPD tidak sesuai lagi dengan KUPA-PPAS. Ada banyak tambahan kegiatan yang tidak diketahui asal muasalnya dan SKPD terkesan menjadikan Telaahan Staf kepada Pimpinan Daerah sebagai jalan keluar untuk mewujudkan keinginan. Keinginan yang sebenarnya bukan kebutuhan.

4. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan.

Hal mendasar yang menyebabkan perencanaan menjadi tidak berkualitas karena tidak selaras dengan Agenda Besar 5 Tahunan Pemerintah Daerah yaitu RPJMD. Masih terdapat belasan SKPD yang belum sinkron Renstranya dengan RPJMD dan masih terdapat 17 sasaran RPJMD yang masih belum tercapai hingga memasuki tahun ketiga RPJMD 2018-2023. Apabila hal ini tidak segera diluruskan maka

dampak yang muncul adalah tidak sinkronnya kegiatan SKPD dengan Tujuan dan Target Pemerintah Daerah yang secara jelas telah dituangkan dalam RPJMD. Anggaran menjadi percuma digelontorkan karena membiayai berbagai kegiatan yang kontennya tidak selaras dengan keinginan RPJMD. Menselaraskan renstra dan Renja SKPD dengan Sasaran-saran dan target RPJMD menjadi hal yang harus segera dilakukan oleh Bappeda Tanah Laut.

5. Belum optimalnya peran penelitian dan pengembangan dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Seiring dengan perkembangan waktu, kabupaten Tanah Laut yang dulu pernah jaya dengan kayu ulinnya, kemudian terganti dengan batubara dan biji besi kini terasa belum terpetakan kemana akan terbawa arahnya apabila sawit dan karet dan jagung dan komoditi lainnya juga akan mengalami penurunan produksi. Pemerintah perlu segera mencari alternatif pendapatan untuk mempersiapkan perkembangan di masa mendatang. Tidak hanya terkait dengan alternatif potensi, kondisi alam yang seringkali tak bersahabat di musim hujan juga memiliki potensi untuk menurunkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, adanya pemikiran, penelitian dan pengembangan menjadi sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi sesuatu ancaman ataupun memanfaatkan sebuah peluang. Dengan penelitian dan pengembangan maka kesalahan langkah akan dapat dihindarkan. Dengan penelitian dan pengembangan akan membuka peluang yang bisa jadi belum terpikirkan. Selain apa yang dikemukakan diatas, tupoksi Bappeda dalam melaksanakan urusan perencanaan dan penelitian pengembangan menghajatkan peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan mesti diberikan porsi yang besar. Saat ini masih dirasakan bahwa peran penelitian dan pengembangan belum tergalikan secara optimal. Untuk itu perhatian terhadap rogram penelitian dan pengembangan

perlu lebih dioptimalkan lagi. Dengan kualitas penelitian yang baik akan dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Tanah Laut di masa yang akan datang.

Dari beberapa permasalahan diatas, Bappeda memandang perlu untuk mengangkat 2 (dua) isu strategis saat ini, yaitu :

1. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan.
2. Belum optimalnya peran penelitian dan pengembangan dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

D. Produk dan Layanan

Berdasarkan ketentuan pasal 2 Bab II Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut disebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan. Dari ketentuan pasal ini dapat diketahui bahwa Produk Layanan Bappeda meliputi:

1. Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
2. Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
3. Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah ;
4. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Dokumen-dokumen Hasil Kajian.

E. Sistematika Penyajian.

Laporan Kinerja ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi
- C. Isu Strategis
- D. Produk dan Layanan
- E. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Visi RPJMD
- B. Misi RPJMD
- C. Tujuan dan Sasaran Strategis
- D. Indikator Kinerja Utama
- E. Perjanjian Kinerja
- F. Program dan Kegiatan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi
 - 1. Sasaran RPJMD
 - 2. Akuntabilitas Kinerja Kepala Badan
 - 3. Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Badan
 - 1) Akuntabilitas Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian
 - 2) Akuntabilitas Kinerja Kasubbag Perencanaan
 - 3) Akuntabilitas Kinerja Kasubbag Keuangan
 - 4. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Perencanaan Makro
 - 1) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Penyusunan Program
 - 2) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
 - 5. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
 - 1) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Infrastruktur
 - 2) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Pengembangan Wilayah

6. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Ekonomi dan SDA
 - 1) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Pertanian, Industri, Perdagangan & Koperasi
 - 2) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
7. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Bidang Sosial Budaya
 - 1) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Politik dan Pemerintahan
 - 2) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Sumber Daya Manusia
8. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - 1) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya
 - 2) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2021
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan 2021

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Strategi Peningkatan Kinerja

LAMPIRAN

1. IKU
2. Pernyataan Hasil Reviu
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 bertanda tangan
4. Cascading/Pohon Kinerja
5. Capaian Kinerja Per Triwulan (1-4)
6. Monev Renstra
7. Matrik Keselarasan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi RPJMD

Visi dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut periode 2018 – 2023 adalah :

“Terwujudnya Tanah Laut yang Berinteraksi” yang merupakan akronim dari Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual dan Sinergi”.

B. Misi RPJMD

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah dirancanglah 5 buah Misi yaitu:

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, social dan budaya
2. Menciptakan inovasi disegala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan Bappeda, maka fungsi dan tugas Bappeda terkait erat dengan penacapaian misi ke-3 yaitu : Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)”.

Tata kelola pemerintahan yang baik berawal dari penyusunan perencanaan yang baik pula. Perencanaan yang baik dapat diukur dari beberapa aspek

yang seringkali disingkat “SMART” yaitu Specific (khusus/focus), Measurable (terukur), Achievable (dapat dicapai), Relevant (sesuai) dan Timebound (Batas Waktu).

Sejauh mana Bappeda mampu menjadi SKPD koordinator sektor perencanaan semua SKPD yang ada di Kabupaten Tanah Laut akan menentukan kualitas perencanaan yang akan tersusun. Tersusunnya perencanaan yang berkualitas akan menentukan kualitas tata kelola pemerintahan karena dalam prosesnya, tata kelola pemerintahan memerlukan perencanaan yang baik pula.

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

1. Tujuan

Rumusan tujuan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tanah Laut adalah :

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Kelitbangan Daerah.

Kualitas perencanaan yang baik akan sangat menentukan kualitas pembangunan yang dihasilkan. Kualitas perencanaan dan pembangunan yang baik ini akan dapat didorong secara optimal apabila didukung dengan kualitas kelitbangan yang baik pula. Untuk itu, guna mewujudkan pembangunan yang baik sesuai arahan RPJMD diperlukan kualitas perencanaan yang baik yang didukung dengan kualitas kelitbangan yang baik pula.

2. Sasaran Strategis

- 1) Meningkatkan keselarasan perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD.

Sasaran strategis ini ditujukan untuk meningkatkan keselarasan atau kesesuaian antara perencanaan dan pengendalian program yang dilaksanakan SKPD dengan sasaran-sasaran yang ada di dalam RPJMD. Sasaran ini juga mengarah pada kesesuaian

program RKPD dengan RPJMD. Indikatornya dilihat dari jumlah program yang ada di RKPD yang dilaksanakan oleh Bappeda dengan program perencanaan dan kelitbangan yang ada di RPJMD.

- 2) Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya.

Sasaran strategis ini ditujukan untuk meningkatkan keselarasan perencanaan SKPD dalam lingkup bidang Sosial Budaya dengan RKPD. Untuk mencapai sasaran ini dengan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara Bidang Sosial Budaya dengan SKPD-SKPD yang ada dalam lingkup koordinasi bidang Sosial Budaya.

- 3) Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan SDA.

Sasaran strategis ini ditujukan untuk meningkatkan keselarasan perencanaan SKPD dalam lingkup Bidang Ekonomi dan SDA dengan RKPD. Untuk mencapai sasaran ini dengan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara Bidang Ekonomi dan SDA dengan SKPD-SKPD yang ada dalam lingkup koordinasi Bidang Ekonomi dan SDA.

- 4) Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Sasaran strategis ini ditujukan untuk meningkatkan keselarasan perencanaan SKPD dalam lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan RKPD. Untuk mencapai sasaran ini dengan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan SKPD-SKPD yang ada dalam lingkup koordinasi Bidang Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah.

5) Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Sasaran ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan daerah melalui sumbangsih hasil kajian-kajian yang dapat dimanfaatkan dan diimplementasikan dalam penyempurnaan penyusunan perencanaan dan peningkatan kualitas pembangunan daerah.

6) Meningkatnya akuntabilitas Kinerja SKPD.

Sasaran ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan SKPD baik secara administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan serta penyusunan perencanaan dan pelaporan yang sesuai dengan kaidah yang berlaku sehingga mencapai akuntabilitas yang baik yang diukur dengan Nilai SAKIP SKPD.

Penjabaran tujuan, sasaran serta strategi dan kebijakan disajikan dalam tabel berikut :

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan
Kebijakan**

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan dan kelitbangan daerah.	Persentase Kesesuaian Perencanaan RKPD dengan RPJMD.	100 %	Meningkatkan keselarasan Dokumen Perencanaan SKPD dengan RPJMD	Persentase keselarasan Dokumen Perencanaan SKPD dengan RPJMD	90	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD.	Peningkatan kualitas perencana pembangunan daerah.

				a capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Ekonomidan Sumberdaya Alam	80		
			Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dg RKPD - Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan wilayah 	80	Meningkatkan kualitas perencanaan SKPD Lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Mempertajam indikator sasaran kegiatan SKPD Lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
			Meningkatnya Akuntabilitas kinerja SKPD.	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase terkelolanya administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian - Persentase perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun - Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan 	80	Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, Perencanaan, pelaporan dan keuangan SKPD	Meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian laporan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan SKPD
					75		
					75		

				ketentuan - Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah -	75		
	Persentase hasil penelitian yang dapat diimplementasikan dalam pembangunan.	100 %	Meningkatnya implementasi hasil penelitian Pembangunan Daerah.	Persentase hasil kajian Bidang Perencanaan	80	Meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan.	Peningkatan kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan

D. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan order dari pimpinan daerah kepada sebuah SKPD. IKU merupakan locator dimana SKPD tersebut harus berkiprah dan memberikan andilnya dalam mendukung pencapaian visi dan misi. Dari IKU ini pula dapat diketahui core bussines sebuah SKPD. Berdasarkan analisa terhadap tuntutan kinerja yang dikaitkan dengan produk layanan Bappeda maka untuk tahun 2021 telah ditetapkan adanya 1 Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Tanah Laut yaitu :
 “Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan kelitbangan daerah”.

E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang sertasumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi

pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Sebagai instansi pemerintah kabupaten Tanah Laut maka Bappeda juga membuat perjanjian kinerja untuk tahun anggaran 2021. Perjanjian Kinerja ditanda tangani oleh para pihak terkait. Ketentuan penandatanganan Perjanjian Kinerja ini diatur sebagai berikut :

1. Perjanjian Kinerja Pimpinan Satuan Kinerja Pemerintah Daerah (SKPD) dengan tingkat Eselon II, disusun oleh pimpinan SKPD yang kemudian ditandatangani oleh Bupati (Terlampir).
2. Selain antara pimpinan SKPD dengan Bupati, Bappeda juga melakukan penyusunan Perjanjian Kinerja antara Sekretaris/ Kepala Bidang (Eselon III) dengan Pimpinan SKPD, serta Kepala Sub bagian/bidang (Eselon IV) dengan Sekretaris/Kepala Bidang (Eselon III) untuk menyajikan indikator kinerja utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya. Rincian perjanjian kinerja Eselon II, Eselon III dan Eselon IV sesuai dengan format pada Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 sebagaimana terlampir. Perjanjian Kinerja SKPD BAPPEDA adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target (%)	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator kinerja program dan kegiatan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan dan kelitbangan daerah.	Persentase Kesesuaian Perencanaan RKPD dengan RPJMD.	100	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	Persentase Perencanaan RKPD yang sesuai dengan RPJMD.
		Persentase Hasil Kajian Bidang Perencanaan yang diwujudkan.	100	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian yang dapat diimplementasikan dalam pembangunan
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian SKPD. 2. Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD yang tersusun. 3. Persentase Laporan keuangan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan. 4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	Persentase serapan anggaran dan kinerja fisik program.
			100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
			100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
			Nilai SAKIP A	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja untuk menunjang kinerja Sumber Daya Manusia.
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	

				undangan	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja SKPD.
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.

				Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
3	Meningkatnya Keselarasan perencanaan dan Pengendalian program SKPD dengan RPJMD.	1. Persentase Keselarasan program yang dilaksanakan SKPD terhadap program yang ada di RPJMD 2. Persentase program yang memenuhi target	100	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	Jumlah program SKPD yang memenuhi target
			100	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen RKPd dan RKPd Perubahan
				Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah rapat monev per triwulan (4 kali rapat).
					Jumlah rapat koordinasi DAK dan dokumen usulan DAK.
				Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Review RPJMD.
				Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	

				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
4	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya dengan RKPD. 2. Persentase meningkatnya capaian kinerja SKPD lingkup Bidang Sosial Budaya. 	100	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase serapan anggaran dan kinerja fisik program.
			100	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	

				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
5	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	1. Persentase keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan SDA dengan	100	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase serapan anggaran dan kinerja fisik program.

	Daerah.	RKPD. 2. Persentase meningkatnya capaian kinerja SKPD lingkup Bidang Ekonomi dan SDA.	100	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.

6.	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.	1. Persentase keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan RKPD.	100	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase serapan anggaran dan kinerja fisik program.
		2. Persentase meningkatnya capaian kinerja SKPD lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.

7.	Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kajian bidang perencanaan yang diwujudkan.	100	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah.	Persentase Hasil Penelitian yang dapat diimplementasikan dalam pembangunan.
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
				Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	
				Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.

F. Program dan Kegiatan

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.976.937.090,-	8.043.643.090,-
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83.884.506,-	41.140.506,-
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.983.450,-	9.983.450,-
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.157.056,-	31.157.056,-
	3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.744.000,-	0,-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.086.951.510,-	6.086.951.510,-
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.072.865.190,-	6.072.865.190,-
	2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14.086.320,-	14.086.320,-
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.000.000,-	50.000.000,-
	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75.000.000,-	50.000.000,-
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.017.704.670,-	847.704.670,-
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.718.580,-	36.718.580,-
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.198.890,-	56.198.890,-
	3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.898.800,-	32.898.800,-
	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.398.400,-	3.398.400,-
	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	918.490.000,-	718.490.000,-
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	111.346.840,-	248.296.840,-
	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	111.346.840,-	248.296.840,-
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	413.512.208,-	413.512.208,-
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	218.887.400,-	218.887.400,-
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	194.624.808,-	194.624.808,-
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.537.356,-	356.037.356,-
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.200.000,-	55.200.000,-
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.587.356,-	108.587.356,-

	3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.750.000,-	24.750.000,-
	4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,-	167.500.000,-
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.336.286.362,-	825.549.762,-
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	950.577.536,-	569.566.136,-
	1. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	20.498.600,-	5.998.600,-
	2. Pelaksanaan Konsultasi Publik	79.625.000,-	9.000.000,-
	3. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	20.995.000,-	18.000.000,-
	4. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	139.457.500,-	73.625.000,-
	5. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	690.001.436,-	462.942.536,-
2	Analisis Data Dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000.000,-	0,-
	1. Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	100.000.000,-	0,-
3	Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	255.983.626,-	255.983.626,-
	1. Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	255.983.626,-	255.983.626,-
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	679.472.422,-	360.827.472,-
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	165.591.236,-	146.151.236,-
	1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	32.282.946,-	26.882.946,-
	2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9.083.210,-	3.683.210,-
	3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	25.829.240,-	20.429.240,-
	4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	63.395.900,-	63.395.900,-
	5. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10.000.000,-	10.000.000,-
	6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	24.999.940,-	21.759.940,-
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	211.964.230,-	79.195.140,-
	1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	24.999.800,-	9.679.800,-

	(RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
	2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	25.000.000,-	0,-
	3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	83.208.380,-	40.504.320,-
	4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	49.021.810,-	12.820.480,-
	5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	29.734.240,-	16.190.540,-
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	301.916.956,-	135.481.096,-
	1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	71.556.590,-	47.744.220,-
	2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	51.855.400,-	22.675.400,-
	3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	28.744.180,-	15.179.400,-
	4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	149.760.786,-	49.882.076,-
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	710.189.590,-	347.461.130,-
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	355.561.130,-	347.461.130,-
	1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	355.561.130,-	347.461.130,-
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	354.628.460,-	0,-
	1. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	312.647.430,-	0,-
	2. Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	41.981.030,-	0,-

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 Bappeda Tanah Laut melaksanakan 4 Program, 15 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan dengan anggaran yang dikelola sebesar Rp. 10.591.538.624,-, dan pada APBD Perubahan mengalami perubahan menjadi Rp. 9.577.481.454,-.

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

1. Sasaran RPJMD

RPJMD merupakan dokumen yang sangat penting dari semua SKPD yang didalamnya terdapat indikator-indikator yang harus diwujudkan oleh setiap SKPD sesuai dengan tupoksinya. Sasaran RPJMD yang menjadi core bussines BAPPEDA sebagaimana tercantum dalam RPJMD adalah adalah **“Meningkatnya nilai SAKIP Kabupaten dengan target memperoleh nilai BB”**. Sampai dengan tahun 2021, nilai SAKIP BB ini belum tercapai dan masih dalam katagori nilai B sehingga tugas bagi BAPPEDA untuk berperan dalam mencapai peningkatan nilai SAKIP ini menuju nilai BB. Perlu diketahui bahwa indikator sasaran nilai SAKIP BB ini bukan hanya diampu oleh BAPPEDA sendiri tetapi melibatkan 2 SKPD lainnya yaitu Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.

Dalam rangka mewujudkan peran BAPPEDA dalam meningkatkan nilai SAKIP kabupaten tersebut BAPPEDA melakukan beberapa upaya yang erat kaitannya dengan tupoksi BAPPEDA di bidang Perencanaan. Untuk itu BAPPEDA menetapkan 6 sasaran yaitu :

- 1) Meningkatkan keselarasan perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD.

Keselarasan antara perencanaan dan Pengendalian program SKPD dengan RPJMD ini merupakan hal yang tidak bisa ditawar. Bagaimana mungkin sasaran di RPJMD terkait urusan perencanaan dan kelitbangan daerah dapat diwujudkan apabila tidak terdapat keselarasan dengan perencanaan dan pengendalian program yang dilaksanakan oleh SKPD oleh Bappeda. Harus

terdapat benang merah yang nantinya akan menjadi indikator bagi bahwa semua program yang dilaksanakan di SKPD memang telah selaras atau sesuai dengan amanah RPJMD yang telah dijabarkan lebih detail pada Renstra dan Renja SKPD. Sasaran ini menjadi Kinerja Utama pada Bidang Perencanaan Makro Bappeda Tanah Laut.

- 2) Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya.

Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Kinerja Utama yang harus dilaksanakan oleh 3 Bidang pada Bappeda yaitu Bidang Sosial Budaya, Bidang Ekonomi dan SDA serta Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Simpul dari ketiga bidang ini merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan Permendagri 90 Tahun 2019 yang ditindaklanjuti dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang mengamanahkan bahwa Indikator pada beberapa sub kegiatan hanya diwadahi dalam 1 Indikator Kegiatan, sehingga baik bidang Sosial Budaya, Bidang Ekonomi & SDA maupun Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terikat pada 1 Kinerja saja yaitu Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Ketiga Bidang tersebut hanya berbeda pada penggarapan bidangnya saja sesuai tupoksinya.

- 3) Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan SDA.

Sama dengan uraian tersebut pada nomor 2 di atas, kinerja utama dari bidang Ekonomi dan SDA mempunyai peran untuk Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah khusus pada bidang Ekonomi dan SDA.

- 4) Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Sasaran ini merupakan kinerja utama dari bidang Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah dalam upaya untuk Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah khususnya pada bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

5) Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Penelitian dan Pengembangan mempunyai peran penting dalam meningkatkan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah. Penelitian dan pengembangan akan menghasilkan kajian-kajian yang sangat berguna bagi penyusunan perencanaan yang lebih berkualitas dan dapat memberi kontribusi bagi dikurangnya kesalahan dalam penyusunan perencanaan. Penelitian dan Pengembangan ini harus terus ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

6) Meningkatkan akuntabilitas Kinerja SKPD.

Sasaran ini menjadi kinerja utama Sekretariat Bappeda. Indikator dari pencapaian peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD ini dapat dilihat dari peningkatan nilai SAKIP SKPD. Upaya utama yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan dan penyusunan laporan keuangan SKPD yang akurat dan tepat waktu. Selain itu juga ditunjang oleh berbagai program kesekretariatan yang menjamin berjalannya pelayanan administrasi umum, administrasi kepegawaian, dan kelancaran aktivitas perkantoran lainnya secara baik dan efisien.

Sebelum memasuki pada uraian secara detil tentang akuntabilitas kinerja personil Bappeda dari Eselon II hingga eselon IV perlu disepakati terlebih dahulu tentang katagori penilaian berdasarkan skala yang dapat dipertanggungjawabkan. Skala penilaian yang digunakan untuk menilai akuntabilitas kinerja personil Bappeda menggunakan skala yang diambil dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan skala sebagai berikut :

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50	Sangat Rendah

Dengan menggunakan skala ini diharapkan penilaian mandiri yang dilakukan menjadi lebih objektif dan lebih jelas pengklasifikasiannya.

2. Indikator Sasaran

Pada bab ini juga diuraikan Indikator Sasaran yang sesuai dengan Rencana Strategis tahun 2018 – 2023 dan Rencana Kerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Indikator Sasaran ke 1.

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
Meningkatkan keselarasan Dokumen Perencanaan SKPD dengan RPJMD	Persentase keselarasan Dokumen Perencanaan SKPD dengan RPJMD	90	100

Sesuai tabel diatas pencapaian target sasaran ini dari target 90% terealisasi 100% dan untuk menunjang pencapaian target ini termuat dalam Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

2. Indikator Sasaran ke 2.

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
Meningkatnya keselarasan perencanaan dan Pengendalian Program	Persentase keselarasan program yang dilaksanakan SKPD terhadap Program yang	80	100

SKPD dengan RPJMD	ada di RPJMD		
-------------------	--------------	--	--

Sesuai tabel diatas pencapaian target sasaran ini dari target 80% terealisasi 100% dan untuk menunjang pencapaian target ini termuat dalam Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

3. Indikator Sasaran ke 3.

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
Meningkatnya keselarasan perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD	Persentase program yang memenuhi target	80	100

Sesuai tabel diatas pencapaian target sasaran ini dari target 80% terealisasi 100% dan untuk menunjang pencapaian target ini termuat dalam Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

4. Indikator Sasaran ke 4

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan SKPD Lingkup Sosial budaya	Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya.	80	100

Sesuai tabel diatas pencapaian target sasaran ini dari target 80% terealisasi 100% dan untuk menunjang pencapaian target ini termuat dalam Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

5. Indikator Sasaran ke 5

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan SKPD Lingkup Sosial budaya	Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya.	80	100

Sesuai tabel diatas pencapaian target sasaran ini dari target 80% terealisasi 100% dan untuk menunjang pencapaian target ini termuat dalam Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

6. Indikator Sasaran ke 6

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Ekonomi dan SDA	Persentase Keselarasan Renja SKPD Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan RKPD.	80	100

Sesuai tabel diatas pencapaian target sasaran ini dari target 80% terealisasi 100% dan untuk menunjang pencapaian target ini termuat dalam Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

7. Indikator Sasaran ke 7

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Ekonomi dan SDA	Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam	80	100

Sesuai tabel diatas pencapaian target sasaran ini dari target 80% terealisasi 100% dan untuk menunjang pencapaian target ini termuat dalam Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

8. Indikator Sasaran ke 8

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan RKPD	80	100

Sesuai tabel diatas pencapaian target sasaran ini dari target 80% terealisasi 100% dan untuk menunjang pencapaian target ini

termuat dalam Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

9. Indikator Sasaran ke 9

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	80	100

Sesuai tabel diatas pencapaian target sasaran ini dari target 80% terealisasi 100% dan untuk menunjang pencapaian target ini termuat dalam Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

10. Indikator Sasaran ke 10

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
Meningkatnya implementasi hasil penelitian Pembangunan Daerah	Persentase hasil kajian Bidang Perencanaan	80	100

Sesuai tabel diatas pencapaian target sasaran ini dari target 80% terealisasi 100% dan untuk menunjang pencapaian target ini termuat dalam Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah.

11. Indikator Sasaran ke 11

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja SKPD.	Persentase terkelolanya administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian	80	100

Sesuai tabel diatas pencapaian target sasaran ini dari target 80% terealisasi 100% dan untuk menunjang pencapaian target ini termuat dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Sekretariat).

12. Indikator Sasaran ke 12

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja SKPD.	Persentase perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun	75	100

Sesuai tabel diatas pencapaian target sasaran ini dari target 75% terealisasi 100% dan untuk menunjang pencapaian target ini termuat dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Sekretariat).

13. Indikator Sasaran ke 13

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja SKPD.	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	75	100

Sesuai tabel diatas pencapaian target sasaran ini dari target 75% terealisasi 100% dan untuk menunjang pencapaian target ini termuat dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Sekretariat).

14. Indikator Sasaran ke 14

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja SKPD.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	75	100

Sesuai tabel diatas pencapaian target sasaran ini dari target 75% terealisasi 100% dan untuk menunjang pencapaian target ini termuat dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Sekretariat).

Untuk uraian lebih mendalam dalam pencapaian target indikator dari masing-masing sasaran dapat dilihat pada uraian masing pengampu dikarenakan keberhasilan suatu target ditunjang juga kegiatan yang dilaksanakan yang tercantum dalam DPA badan Perencanaan Pembangunan pada tahun 2021.

3. Akuntabilitas Kinerja Kepala Badan.

a. analisis

Akuntabilitas Kepala Bappeda dalam laporan ini diukur pada level pelaksanaan dan realisasi program. Demikian juga halnya dengan pengukuran akuntabilitas kinerja Sekretaris dan para Kepala Bidang. Penilaian didasarkan pada serapan anggaran masing-masing program yang kemudian dirata-ratakan untuk memudahkan pengukuran.

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2020		2021		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan kelitbangan daerah.	Persentase perencanaan SKPD yang sesuai dengan RPJMD.	100	48,70	100	60,1	Persentase capaian menurun dibandingkan target (60,1)
		Persentase Hasil Kajian Bidang Perencanaan yang diwujudkan	100	49,66	100	80	Persentase capaian menurun dibandingkan target (80)

Sasaran eselon II : Meningkatkan kualitas perencanaan SKPD pembangunan dan kelitbangan daerah.

Indikator 1 : Persentase perencanaan yang sesuai dengan RPJMD.

Pencapaian indikator I sesuai dengan tabel data pada tahun 2020 target persentase perencanaan SKPD yang sesuai dengan RPJMD adalah 48,70 dan untuk mencapai indikator ini didukung dengan jumlah program sebanyak 9 program dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.527.608.444,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 48 orang, eselon III sebanyak 6 orang, eselon IV sebanyak 13 orang staf sebanyak 15 orang, serta PTT sebanyak 14 orang.

Sedangkan pada tahun 2021 target pencapaian persentase perencanaan kesesuaian perencanaan RKPd dengan RPJMD terealisasi sebesar 60,1% untuk mencapai indikator ini didukung dengan jumlah program sebanyak 4 program dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 7.196.552.357,- sedangkan SDM yang mendukung

kegiatan ini sebanyak 48 orang, eselon III sebanyak 6 orang, eselon IV sebanyak 15 orang staf sebanyak 13 orang, serta PTT sebanyak 14 orang.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2020		2021		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan kelitbangan daerah.	Persentase perencanaan SKPD yang sesuai dengan RPJMD.	100	48,70	100	60,1	Persentase capaian menurun dibandingkan target (60,1)

Dari hasil capaian realisasi tersebut menunjukkan penurunan capaian terhadap target yang disebabkan beberapa hal.

a. Kendala-kendala dalam mencapai target indikator ini antara lain :

1. Lambatnya SKPD dalam melakukan pengimputan ke Sistem;
2. adanya pandemi covid-19;
3. permasalahan SDM.

b. Solusi :

1. lebih cermat lagi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran disesuaikan dengan kondisi adanya pandemi;
2. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan SKPD;
2. agar dapat dipenuhi kebutuhan SDM sesuai dengan anjab.

c. Rencana aksi

Dalam hal ini rencana aksi yang diterapkan seperti dilakukan survey dan rapat dengan SKPD terkait terlebih dahulu untuk kegiatan monitoring dan evaluasi, untuk penganggaran makan minum dipusatkan ke sekretariat dan untuk kegiatan yang memang belum dapat dilaksanakan dikarenakan masih adanya pandemi agar ditiadakan. Selain itu permasalahan Sumber Daya Manusia khususnya SDM perencana yang dirasa masih kurang baik dalam hal pelatihan untuk menambah wawasan dibidang

perencanaan, diharapkan kedepannya permasalahan ini dapat segera terselesaikan.

Sasaran eselon II : Meningkat nya kualitas perencanaan SKPD pembangunan dan kelitbangan daerah.

Indikator II : Persentase Hasil Kajian Bidang Perencanaan yang diwujudkan

Pencapaian indikator I pada tahun 2020 target Persentase Hasil Kajian Bidang Perencanaan yang diwujudkan yang sesuai dengan RPJMD 80% untuk mencapai idikator ini didukung dengan 1 program dengan jumlah anggaran sebesar Rp289.537.500,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang kapid, 2 orang kasubbid, 2 orang staf.

Sedangkan pada tahun 2021 target pencapaian Persentase Hasil Kajian Bidang Perencanaan yang diwujudkan terealisasi sebesar 80% untuk mencapai indikator ini didukung dengan 1 program dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 347.461.130,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang kapid, 2 orang kasubbid, 2 orang staf.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2020		2021		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Meningkat nya kualitas perencanaan pembangunan dan kelitbangan daerah.	Persentase Hasil Kajian Bidang Perencanaan yang diwujudkan	100	49,66	100	80	Persentase capaian menurun dibandingkan target (80)

Dari hasil capaian realisasi tersebut menunjukkan penurunan capaian terhadap target yang disebabkan beberapa hal.

- a. Kendala-kendala dalam mencapai target indikator ini antara lain:
 1. kesulitan dalam pengumpulan/permintaan data kepada SKPD;

2. kurangnya pemahaman kepada SKPD pentingnya kajian/penelitian yang sebenarnya sangat berpengaruh pada pembangunan.
- b. Solusi :
1. Senantiasa memberikan himbauan pada setiap kesempatan bertemu dengan SKPD akan pentingnya kajian yang akan dilakukan oleh Bappeda.
 2. Mengalokasikan waktu lebih banyak untuk mengumpulkan data dalam arti meminta data jauh-jauh hari ke SKPD sehingga SKPD mempunyai waktu untuk menyiapkan data yang diminta.
- c. Rencana aksi
1. Melaksanakan rapat Internal dengan seluruh bidang-bidang di BAPPEDA.
 2. Melibatkan unsur pimpinan tertinggi dalam penandatanganan surat undangan.
 3. Rapat koordinasi dengan konsultan Terkait data yang diperlukan.
 4. Menyusun jadwal follow-up perkembangan hasil kajian.

Kepala Bappeda mengampu 4 Program untuk mewujudkan sasaran strategis Bappeda yaitu Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan kelitbangan daerah. Adapun Program-program yang diampu oleh Kepala Bappeda dan realisasinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran (Rp.)	Perubahan (Rp.)	Realisasi Anggaran	Target	Realisasi (%)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan kelitbangan daerah.	Persentase perencanaan yang sesuai dengan RPJMD.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.336.286.36,-	825.549.762,-	445.775.400,-	100	39,42
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	679.472.422,-	360.827.472,-	42.531.600,-	100	52,88
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.976.937.090,-	8.043.643.090,-	76.942.800,-	100	83,05
		Persentase Hasil Kajian Bidang Perencanaan yang diwujudkan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	710.189.590,-	347.461.130,-	143.787.600,-	100	85,79

b. Kendala

Berdasarkan tabel pada analisis, Akuntabilitas Kinerja Kepala Bappeda dapat dilihat dari serapan anggaran dan realisasi fisik kegiatan dari 4 Program yang dilaksanakan. Dengan ini maka apabila dirata-ratakan serapan anggaran yang berhasil dicapai adalah 78,25% dari target 100 persen yang dimuat dalam perjanjian kinerja.

Namun, apabila dilihat dari realisasi fisik kegiatan maka data realisasi fisik yang dicapai menunjukkan semua program kegiatan

mencapai 97,31%. Kondisi ini menunjukkan bahwa target-target fisik kegiatan dapat tercapai meskipun dana yang terserap hanya berkisar 78,25%. Penyerapan anggaran yang lebih kecil dibanding realisasi fisik ini sebagian besar disebabkan oleh kondisi pandemi yang masih berlangsung di tahun 2021. Dengan kondisi pandemi yang terjadi, banyak rapat-rapat kordinasi secara tatap muka tidak dapat dilaksanakan dan diganti dengan kegiatan rapat secara daring (dalam jaringan) atau secara online. Akibatnya, anggaran makan minum, narasumber, ATK, tidak dapat direalisasikan. Belum lagi banyaknya kegiatan perjalanan dinas baik dalam dan luar daerah yang tidak dilakukan sehingga berimbas pada tidak terserapnya anggaran secara maksimal. Meskipun demikian, secara kinerja fisik, semua target fisik dapat terlaksana dengan baik. Dengan kata lain, terjadi efisiensi anggaran, dimana biaya yang semestinya dikeluarkan bisa tidak perlu dikeluarkan, namun hasil yang ingin dicapai tetap dapat diperoleh. Dengan demikian, berdasarkan skala yang sudah disampaikan diatas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kepala Bappeda Tanah Laut dilihat dari sisi serapan anggaran dapat dikatakan berkategori SEDANG, dan berkatagori SANGAT TINGGI dari sisi realisasi fisik kegiatan.

4. Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Badan.

a. Analisis

Akuntabilitas sekretaris dalam laporan ini diukur pada level pelaksanaan dan realisasi program. Penilaian didasarkan pada serapan anggaran masing-masing program yang kemudian dirata-ratakan untuk memudahkan pengukuran.

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2020		2021		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase terkelolanya administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian	100	100%	100	100%	Persentase capaian sesuai dengan target (100%)
		Persentase perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun	100	100%	100	100%	Persentase capaian sesuai dengan target (100%)
		Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	100	100%	100	100%	Persentase capaian sesuai dengan target (100%)
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	75	85	75	85	Persentase capaian meningkat dibandingkan target (75)

Sasaran eselon III : Meningkatnya Akuntabilitas kinerja SKPD

Indikator 1 : Persentase terkelolanya administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian.

Pencapaian indikator I pada tahun 2020 target Persentase terkelolanya administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian yang sesuai 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan 4 program, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.952.807.784,-, sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang eselon IV dan 1 orang staf, serta 4 orang PTT

Sedangkan pada tahun 2021 target pencapaian Persentase terkelolanya administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian terealisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan 1 program, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 8.043.643.090,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang eselon IV dan 1 orang staf, serta 4 orang PTT

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	2020		2021		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase terkelolanya administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian	100	100%	100	100%	Persentase capaian sesuai dengan target (100%)

Dari hasil capaian realisasi tersebut menunjukkan sesuai capaian terhadap target yang disebabkan beberapa hal.

a. Kendala-kendala dalam mencapai target indikator ini antara lain:

1. adanya pandemi covid-19
2. permasalahan SDM

b. Solusi :

1. lebih cermat lagi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran disesuaikan dengan kondisi adanya pandemi covid-19.
2. agar dapat dipenuhi kebutuhan SDM sesuai dengan anjab dan penambahan pengetahuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Rencana aksi

Dalam hal ini rencana aksi yang diterapkan seperti penganggaran makan minum kembali dan untuk kegiatan yang memang belum dapat dilaksanakan dikarenakan masih adanya pandemi agar ditiadakan. Selain itu permasalahan SDM yang dirasa masih kurang baik dalam hal pelatihan untuk menambah wawasan sesuai dengan tugasnya.

Indikator 2 : Persentase perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun

Pencapaian indikator I pada tahun 2020 target Persentase perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan 1 program, dengan jumlah

anggaran sebesar Rp. 68.967.000,-, sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang eselon IV dan 1 orang staf.

Sedangkan pada tahun 2021 target pencapaian Persentase perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun terealisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan 1 program dengan jumlah anggaran sebesar 41.140.506,-, sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang eselon IV dan 1 orang PTT

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2020		2021		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun	100	100%	100	100%	Persentase capaian sesuai dengan target (100%)

Dari hasil capaian realisasi tersebut menunjukkan sesuai capaian terhadap target yang disebabkan beberapa hal.

- a. Kendala-kendala dalam mencapai target indikator ini antara lain:
 1. adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana
 2. kurangnya SDM
- b. Solusi :

agar dapat dipenuhi kebutuhan SDM sesuai dengan anjab dan penambahan pengetahuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Rencana aksi

permasalahan SDM yang dirasa masih kurang baik dalam hal pelatihan untuk menambah wawasan sesuai dengan tugasnya

Indikator 3 : Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan

Pencapaian indikator I pada tahun 2020 target Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan 1 program dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 9.134.200,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang eselon IV dan 3 orang staf, serta 1 orang PTT

Sedangkan pada tahun 2021 target pencapaian Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan terlealisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan 1 program dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 14.086.320,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang eselon IV dan 3 orang staf, serta 1 orang PTT

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2020		2021		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	100	100%	100	100%	Persentase capaian sesuai dengan target (100%)

Dari hasil capaian realisasi tersebut menunjukkan sesuai capaian target yang disebabkan beberapa hal.

Pada capaian sasaran ini tidak terdapat kendala yang begitu signifikan dikarenakan kegiatan yang dilaksanakan bersifat rutin mengenai penyusunan laporan keuangan

d. Solusi :

-.

Indikator 4 : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pencapaian indikator I pada tahun 2020 target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah nilai 85 untuk mencapai indikator ini

didukung dengan 1 program dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 23.967.600,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang eselon IV dan 1 orang staf.

Sedangkan pada tahun 2021 target pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terealisasi sebesar nilai 80,16 untuk mencapai indikator ini didukung dengan 1 program dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 31.157.056,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang eselon IV dan 1 orang PTT

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2020		2020		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	75	85	75	80	Persentase capaian meningkat dibandingkan target (75)

Dari hasil capaian realisasi tersebut menunjukkan kenaikan capaian terhadap target yang disebabkan beberapa hal.

a. Kendala-kendala dalam mencapai target indikator ini antara lain:

1. kurangnya pemahaman mengenai penyusunan lakip
2. kurangnya SDM dalam mewujudkan sasaran ini

b. Solusi :

1. agar dapat dipenuhi kebutuhan SDM sesuai dengan anjab dan penambahan pengetahuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Adanya pelatihan mengenai penyusunan lakip

c. Rencana aksi

permasalahan SDM yang dirasa masih kurang baik dalam hal pelatihan untuk menambah wawasan mengenai penyusunan lakip.

Sekretaris Bappeda mengampu 1 Program untuk mewujudkan sasaran Kinerja Sekretaris Bappeda yaitu Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD. Adapun program yang diampu oleh Sekretaris Bappeda dan realisasinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD.	Nilai SAKIP A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.043.643.090,-	917.209.510,-	100	92,91
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.140.506,-	389.806.173,-	100	96,37
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.983.450,-	204.509.871,-	100	79,90
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.157.056,-		100	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	0,-	322.893.466,-	100	98,81
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.086.951.510,-	867.045.750,-	100	89,80
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.072.865.190,-	373.980.000,-	100	94,27
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14.086.320,-	108.516.750,-	100	63,48
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000,-	374.049.000,-	100	97,68
			Bimbingan Teknis Implementasi	50.000.000,-	10.000.000,-	100	70

			Peraturan Perundang-Undangan				
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	847.704.670,-	0	0	0
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.718.580,-	0	0	0
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.198.890,-	0	0	0
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.898.800,-	0	0	0
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.398.400,-	19.520.700,-	100	81,45
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	718.490.000,-	6.296.800,-	100	72,64
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	248.296.840,-			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	248.296.840,-			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	413.512.208,-			

			Pemerintahan Daerah				
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	218.887.400,-			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	194.624.808,-			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	356.037.356,-			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.200.000,-			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.587.356,-			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.750.000,-			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	167.500.000,-			

b. Kendala

Dari tabel analisis dapat diketahui bahwa Sekretaris Bappeda mengampu 1 program yang dilaksanakan jika dirata-ratakan dengan

program yang dilaksanakan tersebut maka serapan anggaran dari 1 program tersebut mencapai 83,05% dari target 100% yang dimuat dalam Perjanjian Kinerja. Untuk realisasi fisik kegiatan mencapai 91,07%. Dari angka 83,05 ini maka akuntabilitas kinerja Sekretaris Bappeda berdasarkan skala sebagaimana dimuat pada awal pembahasan akuntabilitas kinerja ini dapat dikatakan berkategori TINGGI, dari sisi serapan anggaran, dan berkategori SANGAT TINGGI pula dari sisi Realisasi Fisik Kegiatan.

Dengan ketersediaan sumber daya manusia yang ada, maka dalam hal ini untuk pencapaian target sekretaris yang dibantu oleh beberapa kasubbag/ eselon IV dan dapat dijabarkan pada penjelasan berikut :

1) Akuntabilitas Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian

a. Analisis

Penilaian dan pengukuran akuntabilitas Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian Bappeda Tanah Laut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2020		2021		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Melaksanakan Pengelolaan Urusan Umum SKPD	Jumlah Dokumen administrasi Umum SKPD	100	100%	100	100%	Persentase capaian sesuai target 100%
	Melaksanakan Pengelolaan Urusan Kepegawaian SKPD	Jumlah dokumen administrasi Kepegawaian SKPD	100	100%	100	100%	Persentase capaian sesuai target 100%

Sasaran eselon IV : Melaksanakan Pengelolaan Urusan Umum SKPD

Indikator 1 : Jumlah Dokumen administrasi Umum SKPD

Pencapaian indikator I pada tahun 2020 target Jumlah Dokumen administrasi Umum SKPD 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 987.237.784,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang eselon IV, 1 Orang ASN dan 6 orang PTT

Sedangkan pada tahun 2021 target pencapaian Jumlah Dokumen administrasi Umum SKPD terealisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 8.043.643.090,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang eslon IV, 1 Orang ASN dan 6 orang PTT

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2020		2021		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Melaksanakan Pengelolaan Urusan Umum SKPD	Jumlah Dokumen administrasi Umum SKPD	100	100%	100	100	Persentase capaian sesuai target 100%

Dari hasil capaian realisasi tersebut menunjukkan sesuai capaian terhadap target dan tidak ada kendala yang ditemui karena semua yang dilaksanakan bersifat rutin.

Indikator 2 : Jumlah dokumen administrasi Kepegawaian SKPD

Pencapaian indikator I pada tahun 2020 target Jumlah dokumen administrasi Kepegawaian SKPD 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 987.237.784,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang eslon IV, 1 Orang ASN dan 6 orang PTT

Sedangkan pada tahun 2021 target pencapaian Jumlah dokumen administrasi Kepegawaian SKPD terealisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 8.043.643.090,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang eslon IV, 1 Orang ASN dan 6 orang PTT

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2020		2021		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Melaksanakan Pengelolaan Urusan Kepegawaian SKPD	Jumlah dokumen administrasi Kepegawaian SKPD	100	100	100	100	Persentase capaian sesuai target 100%

Dari hasil capaian realisasi tersebut menunjukkan sesuai capaian terhadap target dan tidak ada kendala yang ditemui karena semua yang dilaksanakan bersifat rutin

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Kegiatan & Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Melaksanakan Pengelolaan Urusan Umum SKPD	Jumlah Dokumen administrasi Umum SKPD.	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.718.580,-	389.806.173,-	100 12 Bulan	96,37 12 Bulan
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	56.198.890,-	204.509.871,-	100 12 Bulan	79,90 12 Bulan
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.898.800,-			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.398.400,-			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	718.490.000,-	322.893.466,-	100 14 orang	98,81 14 orang
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				

			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	218.887.400,-			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	194.624.808,-			
2.	Melaksanakan Pengelolaan Urusan Kepegawaian SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian SKPD	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000,-	108.516.750,-	100 4 unit Mobil Dinas 13 Unit Sepeda Motor Dinas dan Surat-suratnya Perawatan perlengkapan kantor selama 1 tahun	63,48 4 unit Mobil Dinas 13 Unit Sepeda Motor Dinas dan Surat-suratnya Perawatan perlengkapan kantor selama 1 tahun
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	248.296.840			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang				

			Urusan Pemerintahan Daerah				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.200.000,-			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.587.356,-			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.750.000,-			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	167.500.000,-	10.000.000,-	100 4 orang ASN	70 3 Orang ASN

Dari tabel analisis dapat diketahui bahwa Kasubbag. Umum dan Kepegawaian mengampu 5 Kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja berupa Melaksanakan Pengelolaan Urusan Umum SKPD dengan indikator Kinerja Jumlah Dokumen administrasi Umum SKPD, dan Kinerja Melaksanakan Pengelolaan Urusan Kepegawaian SKPD yang diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian SKPD.

Berdasarkan kegiatan yang diampu oleh Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada tahun 2021 dapat diuraikan ke dalam penjelasan berikut :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target (%)	Realisasi (%)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	404.506.689,-	389.806.173,-	100 12 Bulan	96,37 12 Bulan
2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	36.718.580,-	204.509.871,-	100 12 Bulan	79,90 12 Bulan
3.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	56.198.890,-	322.893.466,-	100 14 orang	98,81 14 orang
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.898.800,-			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.398.400,-			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	718.490.000,-			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	218.887.400,-			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	194.624.808,-			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000,-			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	248.296.840			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	55.200.000,-			

	Dinas Jabatan				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.587.356,-			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.750.000,-			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	167.500.000,-			

Berdasarkan perhitungan pada data tabel diatas diketahui bahwa jumlah anggaran yang dikelola oleh Kasubbag Umum dan kepegawaian berjumlah Rp. 1.915.551.074,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 1.286.915.278,- atau sekitar 67,18%. Adapun realisasi fisik yang dapat dilaksanakan tercapai 100 persen.

Berdasarkan data diatas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kasubbag. Umum dan Kepegawaian dilihat dari serapan anggaran berkatagori SEDANG. Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan juga berkatagori SANGAT TINGGI karena mencapai 100%.

2) Akuntabilitas Kinerja Kasubbag Perencanaan

a. analisis

Penilaian dan pengukuran akuntabilitas kinerja Kasubbag Perencanaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2020		2021		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Melaksanakan Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan SKPD yang tersusun	100	100%	100	100%	Persentase capaian sesuai target 100%
		Jumlah Dokumen pelaporan SKPD yang tersusun	100	100%	100	100%	Persentase capaian sesuai target 100%

Sasaran eselon IV : Melaksanakan Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan SKPD

Indikator 1 : Jumlah Dokumen perencanaan SKPD yang tersusun

Pencapaian indikator I pada tahun 2020 target Jumlah Dokumen perencanaan SKPD yang tersusun 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan kegiatan Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 8.668.700,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang eselon IV dan 1 orang ASN

Sedangkan pada tahun 2021 target pencapaian Jumlah Dokumen perencanaan SKPD yang tersusun terealisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 41.140.506,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang eselon IV dan 1 orang PTT

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2020		2021		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Melaksanakan Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan SKPD yang tersusun	100	100%	100	100%	Persentase capaian sesuai target 100%

Dari hasil capaian realisasi tersebut menunjukkan sesuai capaian terhadap target yang disebabkan beberapa hal.

Kendala-kendala dalam mencapai target indikator ini antara lain :

Kendala :

- 1) Banyaknya beban tugas diluar tupoksi utama yang menyebabkan pekerjaan menjadi terlambat.
- 2) Kurangnya pemahaman penyusunan laporan;
- 3) Jumlah SDM yang dirasa kurang.

Solusi :

- 1) Perlu adanya pembagian tugas yang jelas terkait tugas diluar tupoksi utama;
- 2) Perlu adanya pelatihan atau seminar terkait penyusunan dokumen perencanaan;

3) Perlu adanya SDM yang mumpuni.

Rencana Aksi :

- 1) Lebih banyak berkoordinasi terkait tugas-tugas diluar tupoksi utama;
- 2) Adanya pembagian jadwal yang dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

Indikator 2 : Jumlah Dokumen pelaporan SKPD yang tersusun

Pencapaian indikator I pada tahun 2020 target Jumlah Dokumen pelaporan SKPD yang tersusun 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan kegiatan kegiatan Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 8.668.700,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang eselon IV dan 1 orang ASN

Sedangkan pada tahun 2021 target pencapaian Jumlah Dokumen pelaporan SKPD yang tersusun terealisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 41.140.506,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang eselon IV dan 1 orang PTT

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2020		2021		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Melaksanakan Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Jumlah Dokumen pelaporan SKPD yang tersusun	100	100%	100	100%	Persentase capaian sesuai target 100%

Dari hasil capaian realisasi tersebut menunjukkan sesuai capaian terhadap target yang disebabkan beberapa hal.

Kendala-kendala dalam mencapai target indikator ini antara lain :

Kendala :

- 1) Banyaknya beban tugas diluar tupoksi utama yang menyebabkan pekerjaan menjadi terlambat;
- 2) Kurangnya pemahaman penyusunan laporan;
- 3) Jumlah SDM yang dirasa kurang.

Solusi :

- 1) Perlu adanya pembagian tugas yang jelas terkait tugas diluar tupoksi utama;
- 2) Perlu adanya pelatihan atau seminar terkait penyusunan dokumen perencanaan;
- 3) Perlu adanya SDM yang mumpuni.

Rencana Aksi :

- 1) Lebih banyak berkoordinasi terkait tugas-tugas diluar tupoksi utama;
- 2) Adanya pembagian jadwal yang dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Kegiatan & Sub Keg	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Melaksanakan Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan	1. Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun. 2. Jumlah dokumen Pelaporan kinerja SKPD yang tersusun.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.983.450,-	6.296.800,-	100 6 Dokumen	72,64 6 Dokumen (100%)
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.157.056,-			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,-	5.685.000,-	100 5 Laporan	92,22 5 Laporan (100%)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kasubbag Perencanaan mengampu 1 Kegiatan untuk mencapai kinerja berupa Melaksanakan Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan dengan indikator Kinerja Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun dan Jumlah dokumen Pelaporan kinerja SKPD yang tersusun.

Berdasarkan kegiatan yang diampu oleh Kasubbag. Perencanaan pada tahun 2020 dapat diuraikan ke dalam penjelasan berikut :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.140.506,-	36.772.696	100	89,38
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.983.450,-	7.635.800,-	100 6 Dokumen	76,48 100
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.157.056,-	29.136.896,-	100 5 Dokumen	93,52 100
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,-	0,-	0	0

Berdasarkan perhitungan pada data tabel diatas diketahui bahwa jumlah anggaran yang dikelola oleh Kasubbag Perencanaan berjumlah Rp. 41.140.506,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 36.772.696,- atau sekitar 89,38%. Adapun realisasi fisik yang dapat dilaksanakan tercapai 100 persen.

Berdasarkan data diatas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kasubbag Perencanaan dilihat dari serapan anggaran berkategori TINGGI. Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan juga berkategori SANGAT TINGGI karena mencapai 100%.

3) Akuntabilitas Kinerja Kasubbag Keuangan

a. analisis

Penilaian dan pengukuran akuntabilitas kinerja Kasubbag keuangan dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2020		2021		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Melaksanakan Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	100	100%	100	100%	Persentase capaian sesuai target 100%

Sasaran eselon IV : Melaksanakan Pengelolaan Keuangan SKPD

Indikator 1 : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan

Pencapaian indikator I pada tahun 2020 target Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan kegiatan Penyusunan laporan keuangan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 9.134.200,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang eselon IV dan 3 orang ASN, serta 1 orang PTT

Sedangkan pada tahun 2021 target pencapaian Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan terealisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.086.951.510,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang eselon IV dan 3 orang ASN, serta 1 orang PTT

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2020		2021		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Melaksanakan Pengelolaan Urusan Umum SKPD	Jumlah Dokumen administrasi Umum SKPD	100	100%	100	100%	Persentase capaian sesuai target 100%

Dari hasil capaian realisasi tersebut menunjukkan sesuai capaian terhadap target yang disebabkan beberapa hal.

Kendala-kendala dalam mencapai target indikator ini antara lain :

Kendala :

- 1) adanya pergantian sistem keuangan
- 2) SDM yang belum banyak mengetahui tentang sistem keuangan yang baru
- 3) Jaringan internet yang lambat

Solusi :

- 1) Adanya penetapan sistem mana yang harus digunakan
- 2) Adany pelatihan apabila ada pergantian sistem keuangan
- 3) Bandwith internet perlu ditambah

Rencana Aksi :

- 1) Lebih banyak koordinasi kepada SKPD yang mengurus masalah keuangan terkait penggunaan sistem
- 2) Penyediaan pelatihan bagi SDM

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Kegiatan & Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Melaksanakan Pengelolaan keuangan SKPD.	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD sesuai dengan ketentuan.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.086.951.510,-	5.343.069.029,-	100	87,78 97,50
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.072.865.190,-	7.538.900,-	100	87,83 100
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14.086.320,-	10.483.100,-	100 6 buah laporan keuangan	74,42 95

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kasubbag Keuangan mengampu 1 Kegiatan tupoksi jabatan untuk mencapai kinerja berupa Melaksanakan Pengelolaan keuangan SKPD dengan indikator Kinerja Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan kegiatan yang diampu oleh Kasubbag. Keuangan pada tahun 2020 dapat diuraikan ke dalam penjelasan pada tabel berikut :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.086.951.510,-	7.538.900,-	100 6 buah laporan keuangan	82,53 6 buah laporan keuangan (100%)
1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.072.865.190,-	7.538.900,-	100	87,83 100
1.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14.086.320,-	10.483.100,-	100 6 buah laporan keuangan	74,42 95

Berdasarkan perhitungan pada data tabel diatas diketahui bahwa jumlah anggaran yang dikelola oleh Kasubbag Keuangan berjumlah Rp661.790.895,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 6.086.951.510,- atau sekitar 87,78%. Adapun realisasi fisik yang dapat dilaksanakan tercapai 97,50 persen.

Berdasarkan data diatas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kasubbag Keuangan dilihat dari serapan anggaran berkatagori TINGGI. Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan juga berkatagori SANGAT TINGGI karena mencapai 97,50%.

5. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Perencanaan Makro.

a. Analisis

Akuntabilitas Kepala Bidang Perencanaan Makro dalam laporan ini diukur pada level pelaksanaan dan realisasi program. Penilaian didasarkan pada serapan anggaran masing-masing program yang kemudian dirata-ratakan untuk memudahkan pengukuran.

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2019		2020		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Meningkatnya keselarasan perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD	Persentase keselarasan program yang dilaksanakan SKPD terhadap Program yang ada di RPJMD	100	100%	100	100%	Persentase capaian sesuai dengan target (100%)
		Persentase program yang memenuhi target	100	100%	100	100%	Persentase capaian sesuai dengan target (100%)

Sasaran eselon III : Meningkatkan keselarasan perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD

Indikator 1 : Persentase keselarasan program yang dilaksanakan SKPD terhadap Program yang ada di RPJMD.

Pencapaian indikator I pada tahun 2019 target Persentase keselarasan program yang dilaksanakan SKPD terhadap Program yang ada di RPJMD 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan 1 program dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.074.528.100,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 2 orang eselon IV dan 2 orang staf, serta 2 orang PTT.

Sedangkan pada tahun 2020 target pencapaian Persentase keselarasan program yang dilaksanakan SKPD terhadap Program yang ada di RPJMD terealisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan 1 program dengan jumlah anggaran sebesar (Rp. 915.298.280,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 2 orang eselon IV dan 2 orang staf, serta 2 orang PTT.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2019		2020		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Meningkatnya keselarasan perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD	Persentase keselarasan program yang dilaksanakan SKPD terhadap Program yang ada di RPJMD	100	100%	100	100%	Persentase capaian sesuai dengan target (100%)

Dari hasil capaian realisasi tersebut menunjukkan sesuai capaian terhadap target yang disebabkan beberapa hal.

a. Kendala-kendala dalam mencapai target indikator ini antara lain:

- 1) Masih kurangnya pemahaman dari beberapa SKPD mengenai penyusunan perencanaan;
- 2) Kurangnya SDM pada bidang.

b. Solusi :

- 1) Perlu adanya pelatihan mengenai penyusunan perencanaan;
- 2) Perlu adanya penyediaan SDM yang sesuai kualifikasi.

c. Rencana aksi

agar dapat dipenuhi kebutuhan SDM sesuai dengan anjab dan penambahan pengetahuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator II : Persentase program yang memenuhi target

Pencapaian indikator I pada tahun 2019 target persentase perencanaan SKPD yang sesuai dengan RPJMD Persentase program yang memenuhi target 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan 1 program dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.074.528.100,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 2 orang eselon IV dan 2 orang staf, serta 2 orang PTT.

Sedangkan pada tahun 2020 target pencapaian Persentase keselarasan program yang dilaksanakan SKPD terhadap Program yang ada di RPJMD terealisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan 1 program dengan jumlah anggaran sebesar (Rp. 915.298.280,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 2 orang eselon IV dan 2 orang staf, serta 2 orang PTT.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2019		2020		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Meningkatnya keselarasan perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD	Persentase program yang memenuhi target	100	100%	100	100%	Persentase capaian sesuai dengan target (100%)

Dari hasil capaian realisasi tersebut menunjukkan sesuai capaian terhadap target yang disebabkan beberapa hal.

a. Kendala-kendala dalam mencapai target indikator ini antara lain:

- 1) Waktu pelaksanaan yang sering bersamaan dengan kegiatan lain, sehingga perlu mencari waktu yang tepat dalam pelaksanaan kegiatan;
- 2) Data evaluasi yang diminta sering terlambat disampaikan tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam hal ini SKPD kurang merespon terhadap permintaan tersebut;
- 3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perlu koordinasi dengan pimpinan tertinggi sehingga terkadang mengalami kesulitan dalam melakukan koordinasi;
- 4) Banyaknya tugas-tugas tambahan yang dilaksanakan sehingga kurang fokus terhadap tupoksi yang sudah ada.

b. Solusi :

- 1) Perlunya disusun program kerja dan penjadualan kegiatan yang tepat dan saling koordinasi sesama PPTK yang mempunyai kegiatan-kegiatan dan jadwal masing-masing;
- 2) Perlunya penjelasan dan penegasan terhadap SKPD tentang pentingnya data-data yang diminta tersebut oleh pimpinan agar permintaan data lebih diperhatikan;
- 3) Ke depan kegiatan monitoring dan evaluasi yang merupakan tupoksi Bappeda agar lebih diperhatikan lagi oleh pimpinan mengingat kegiatan ini merupakan salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan
- 4) Dapat mengatur ritme pekerjaan sehingga dapat seimbang antara tupoksi dengan tugas-tugas tambahan.

c. Rencana aksi

Perlu sosialisasi dan komunikasi yang intens kepada seluruh SKPD terkait kegiatan ini dan membuka komunikasi maupun pelatihan untuk menambah wawasan dalam pengoperasian aplikasi emonev. .

Kepala Bidang Perencanaan Makro mengampu 1 Program yaitu Program Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mewujudkan sasaran Kinerjanya yaitu Meningkatnya Keselarasan Perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp915.298.280,-. Terkait realisasi dari program ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD.	1. Persentase Keselarasan Program yang dilaksanakan SKPD terhadap Program yang di ada RPJMD. 2. Persentase program yang memenuhi Target.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	825.549.762,-	445.775.400,-	100	48,70
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	569.566.136,-	51.186.800,-	100	60,36
			Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	5.998.600,-	27.119.600,-	100	13,93
			Pelaksanaan Konsultasi Publik	9.000.000,-	2.286.000,-	100	70,59
			Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	18.000.000,-			
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	73.625.000,-			

			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten /Kota	462.942.536,-			
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	0,-			
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	0,-			
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	255.983.626,-			
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	255.983.626,-			

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa anggaran yang berhasil direalisasikan adalah sebesar Rp. 445.775.400,- atau sekitar 48,70% dari target 100% yang dimuat dalam Perjanjian Kinerja. Untuk realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Dari angka 48,70 ini maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kepala Bidang Perencanaan Makro berdasarkan skala sebagaimana dimuat pada awal pembahasan akuntabilitas kinerja ini dapat dikatakan hanya berkatagori SANGAT RENDAH, dari sisi serapan anggaran, dan berkatagori SANGAT TINGGI dari sisi Realisasi Fisik Kegiatan karena realisasi fisiknya mencapai 100%.

Pada tahun 2020 program yang diampu oleh Kepala Bidang Perencanaan makro juga terdampak refocusing anggaran terkait penanganan covid-19 dan dapat dilihat pada table dibawah ini, serta pada table dibawah dapat dilihat pagu program yang terdampak refocusing tetapi pada anggaran perubahan ada yang dikembalikan atau sekedar ditambahkan kembali pagu program tersebut mengingat adanya kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran perubahan.

NO	PROGRAM	PAGU	PAGU REFOCUSING	PERUBAHAN
1.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.336.286.362	847.712.240,00	825.549.762

Dengan ketersediaan sumber daya manusia yang dapat dilihat pada table

diatas maka dalam hal ini untuk pencapaian target Kepala Bidang Perencanaan Makro yang dibantu oleh beberapa kasubbid/ eselon IV dan dapat dijabarkan pada penjelasan berikut :

1) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Penyusunan Program

a. Analisis

Akuntabilitas Kasubbid Penyusunan Program dalam laporan ini diukur pada level pelaksanaan dan realisasi program. Penilaian didasarkan pada serapan anggaran masing-masing kegiatan yang kemudian dirata-ratakan untuk memudahkan pengukuran.

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2019		2020		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Melaksanakan fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.	Jumlah Dokumen RKPD	100	100%	100	100%	Persentase capaian sesuai dengan target 100%
		Jumlah Dokumen RKPD Perubahan	100	100%	100	100%	Persentase capaian sesuai dengan target 100%

Sasaran eselon IV : Melaksanakan fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator 1 : Jumlah Dokumen RKPD

Pencapaian indikator I pada tahun 2019 target Jumlah Dokumen RKPD 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 629.133.700,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang kasubbid dan 2 orang staf

Sedangkan pada tahun 2020 target Jumlah Dokumen RKPD terlealisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan kegiatan Penyusunan RKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 632.628.100,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang kasubbid dan 2 orang staf.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2019		2020		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Melaksanakan fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.	Jumlah Dokumen RKPD	100	100%	100	100%	Persentase capaian sesuai dengan target 100%

Dari hasil capaian realisasi tersebut menunjukkan sesuai dengan target yang tetapi ada beberapa kendala.

Kendala-kendala dalam mencapai target indikator ini antara lain :

- 1) Masih sering terjadi usulan yang bukan prioritas desa justru diakomodir pada saat pelaksanaanya karena diusulkan melalui pintu masuk selain musrenbang sedangkan usulan yang tadinya prioritas justru tidak ketahuan lagi tindak lanjutnya.
- 2) Keterbatasan anggaran menjadi masalah klasik yang tidak terpecahkan sehingga tidak semua usulan masyarakat dapat diakomodir pemerintah daerah.

Solusi :

Senantiasa mencoba mengupayakan penambahan alokasi anggaran untuk mengakomodir usulan masyarakat melalui musrenbang maupun pokir dari anggota dewan.

Rencana Aksi :

Mengupayakan dapat dikurangnya usulan yang masuk melalui SKPD sehingga usulan prioritas di desa dan kecamatan tetap memiliki hak prioritasnya untuk diterima dan dilaksanakan oleh SKPD.

Sasaran eselon IV : Melaksanakan fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator 2 : Jumlah Dokumen RKPD Perubahan

Pencapaian indikator I pada tahun 2019 target Jumlah Dokumen RKPD Perubahan 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 629.133.700,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang kasubbid dan 2 orang staf

Sedangkan pada tahun 2020 target Jumlah Dokumen RKPD Perubahan terleasisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan kegiatan Penyusunan RKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 632.628.100,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang kasubbid dan 2 orang staf.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2019		2020		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Melaksanakan fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.	Jumlah Dokumen RKPD Perubahan	100	100%	100	100%	Persentase capaian sesuai dengan target 100%

Dari hasil capaian realisasi tersebut menunjukkan dengan target yang tetapi ada beberapa kendala.

Kendala-kendala dalam mencapai target indikator ini antara lain :

- 1) Minimnya waktu dalam penyusunan dokumen RKPD perubahan.
- 2) Keterbatasan anggaran menjadi masalah klasik yang tidak terpecahkan sehingga tidak semua usulan masyarakat dapat diakomodir pemerintah daerah.

Solusi :

Senantiasa mencoba mengupayakan penambahan alokasi anggaran untuk mengakomodir usulan masyarakat melalui musrenbang maupun pikir dari anggota dewan.

Rencana Aksi :

Mengupayakan dapat dikurangnya usulan SKPD yang dapat menyebabkan keterlambatan penyusunan dokumen dan keterbatasan pagu yang telah disediakan untuk anggaran perubahan.

Akuntabilitas kinerja Kasubbid Penyusunan Program dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Melaksanakan fasilitasi perencanaan Pembangunan Daerah.	Jumlah Dokumen RKPD dan RKPD Perubahan.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah				
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	569.566.136,-	365.183.000,-	100 1 Dok	57,72 1 Dok (100%)
			Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis	5.998.600,-	27.119.600,-	100 1 Dok Review RPJMD	13,93 1 Dok Review RPJMD

			Pembangunan Daerah				(100%)
			Pelaksanaan Konsultasi Publik	9.000.000,-	2.286.000,-	100 1 Dok	70,59 1 Dok (100%)
			Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	18.000.000,-			
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	73.625.000,-			
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten /Kota	462.942.536,-			
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	0,-			
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	0,-			

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kasubbid Penyusunan Program mengampu 3 Kegiatan untuk mencapai kinerja berupa Melaksanakan fasilitasi perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Kinerja Jumlah Dokumen RKPD dan RKPD Perubahan.

Berdasarkan kegiatan yang diampu oleh Kasubbid. Penyusunan Program pada tahun 2020 dapat diuraikan ke dalam penjelasan berikut

:

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	569.566.136,-	365.183.000,-	100 1 Dok	57,72 1 Dok (100%)
2.	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	5.998.600,-	27.119.600,-	100 1 Dok Review RPJMD	13,93 1 Dok Review RPJMD (100%)
3.	Pelaksanaan Konsultasi Publik	9.000.000,-	2.286.000,-	100 1 Dok	70,59 1 Dok (100%)
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	18.000.000,-			
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	73.625.000,-			
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	462.942.536,-			
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	0,-			
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	0,-			

1. Kegiatan Penyusunan RKPDP pagu anggaran sebesar Rp. 632.628.100,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 365.183.000,- (57,72). Realisasi 1 Dokumen yaitu RKPDP 2021 & RKPDP Perubahan 2020. Dalam kegiatan ini telah terealisasi secara fisik sebesar 100% dari target 100%.



Realisasi anggaran yang tidak terserap dikarenakan adanya anggaran yang tidak direalisasikan yaitu honorarium narasumber penyusunan RKPD, sewa gedung pertemuan, rapat penyusunan RKPD dan perjalanan dinas narasumber;

2. Kegiatan Review RPJMD pada tahun 2020 mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 194.625.880 dan terserap sebesar Rp. 27.119.600,- (13,93%) serta realisasi fisik sebesar 100%. Dalam kegiatan ini tidak terserap maksimal karena adanya anggaran belanja seperti honorarium narasumber, perjalanan dinas narasumber serta sebagian rapat



3. Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan daerah pada tahun 2020 mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 3.228.300,- dan terealisasi Rp. 2.286.000,- (70,59%) serta realisasi fisik sebesar 100%.

Berdasarkan perhitungan pada data tabel diatas diketahui bahwa jumlah anggaran yang dikelola oleh Kasubbid Penyusunan Program berjumlah Rp830.492.280,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp394.588.600,- atau sekitar 47,51%. Adapun realisasi fisik yang dapat dilaksanakan tercapai 100 persen.

Berdasarkan data diatas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kasubbid Penyusunan Program dilihat dari serapan anggaran berkatagori SANGAT RENDAH. Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan berkatagori SANGAT TINGGI karena mencapai 100%.

Kasubbid Penyusunan Program diberi tugas tambahan untuk melakukan pembinaan terhadap 3 SKPD yaitu Inspektorat, SETWAN dan BAPPEDA. Terkait dengan capaian ketiga SKPD tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	SKPD	Kinerja Keuangan (%)	Kinerja Fisik (%)	Kriteria Penilaian klasifikasi kinerja keuangan
1	Inspektorat	83,1	83,8	Tinggi
2	Sekretariat DPRD	63,5	85,3	Rendah
3	Bappeda	74,6	95,8	Sedang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja dari SKPD Lingkup sub Bidang Penyusunan Program terlihat berkatagori Tinggi, Sedang dan Rendah. Hal ini sebagai salah satu gambaran hasil fasilitasi dari Kasubbid Infrastruktur terhadap Penyusunan Perencanaan dan capaian kinerja dari SKPD-SKPD tersebut masih perlu ditingkatkan lagi.

Pada tahun 2020 kegiatan yang diampu oleh kasubbid penyusunan program terdampak refocusing terkait penyediaan dana penanggulangan covid-19 dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini, akan tetapi pada anggaran perubahan ada penambahan pagu kembali.

NO	KEGIATAN	PAGU	PAGU REFOCUSING	PERUBAHAN
1.	Review RPJMD	288.915.380,-	161.553.880,-	194.625.880,-
2.	Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	92.369.700,-	39.066.700,-	3.238.300,-
3.	Penyusunan RKPD	673.030.660,-	529.575.660,-	632.628.100,-

2) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.

a. analisis

Akuntabilitas kinerja Kasubbid Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2019		2020		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Melaksanakan fasilitasi DAK	Jumlah Dokumen Monitoring Pelaksanaan Dana Dak	100	100%	100	100%	Persentase capaian sesuai target 100%
	Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi berkala Pembangunan Daerah	100	100%	100	100%	Persentase capaian menurun dibandingkan target 100%

Sasaran eselon IV : Melaksanakan fasilitasi DAK

Indikator 1 : Jumlah Dokumen Monitoring Pelaksanaan Dana Dak

Pencapaian indikator I pada tahun 2019 target Jumlah Dokumen Monitoring Pelaksanaan Dana Dak 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan kegiatan Monitoring Evaluasi dan pelaporan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 99.885.200,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 eselon IV dan 1 orang PTT

Sedangkan pada tahun 2020 target pencapaian Jumlah Dokumen Monitoring Pelaksanaan Dana Dak terealisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan kegiatan Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 84.806.000,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 eselon IV dan 1 orang PTT

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran	Indikator kinerja	2019	2020	Capaian(%)
----	---------	-------------------	------	------	------------

	strategis		Target	realisasi	Target	realisasi	
	Melaksanakan fasilitasi DAK	Jumlah Dokumen Monitoring Pelaksanaan Dana Dak	100	100%	100	100%	Persentase capaian sesuai target 100%

Dari hasil capaian realisasi tersebut sesuai dengan capaian target tetapi ada beberapa hal kendala.

Kendala-kendala dalam mencapai target indikator ini antara lain :

- 1) Waktu pelaksanaan yang sering bersamaan dengan kegiatan lain, sehingga perlu mencari waktu yang tepat dalam pelaksanaan kegiatan;
- 2) Banyaknya tugas-tugas tambahan yang dilaksanakan sehingga kurang fokus terhadap tupoksi yang sudah ada.

Solusi :

- 1) Perlunya penjelasan dan penegasan terhadap SKPD tentang pentingnya data-data yang diminta tersebut oleh pimpinan agar permintaan data lebih diperhatikan;
- 2) Dapat mengatur ritme pekerjaan sehingga dapat seimbang antara tupoksi dengan tugas-tugas tambahan.

Rencana Aksi :

- 1) Perlunya koordinasi yang lebih intens terkait penyiapan data dukung dari pengusulan DAK;
- 2) Kiranya dapat ditambah kembali SDM yang mumpuni untuk dapat menyelesaikan pekerjaan yang tumpang tindih.

Sasaran eselon IV : Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Indikator 1: Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi berkala Pembangunan Daerah

Pencapaian indikator I pada tahun 2019 target Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi berkala Pembangunan Daerah 90,9% untuk mencapai indikator ini didukung dengan kegiatan Monitoring Evaluasi dan pelaporan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 99.885.200,-

SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 eselon IV dan 1 orang PTT

Sedangkan pada tahun 2020 target pencapaian persentasi perencanaan kesesuaian perencanaan RKPD dengan RPJMD terlealisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan kegiatan Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 84.806.000,- SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 eselon IV dan 1 orang PTT

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2019		2020		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi berkala Pembangunan Daerah	100	100%	100	100%	Persentase capaian sesuai target 100%

Dari hasil capaian realisasi tersebut sesuai dengan capaian target tetapi ada beberapa hal kendala.

Kendala-kendala dalam mencapai target indikator ini antara lain :

- 1) Waktu pelaksanaan yang sering bersamaan dengan kegiatan lain, sehingga perlu mencari waktu yang tepat dalam pelaksanaan kegiatan;
- 2) Data evaluasi yang diminta sering terlambat disampaikan tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam hal ini SKPD kurang merespon terhadap permintaan tersebut;
- 3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perlu koordinasi dengan pimpinan tertinggi sehingga terkadang mengalami kesulitan dalam melakukan koordinasi;
- 4) Banyaknya tugas-tugas tambahan yang dilaksanakan sehingga kurang fokus terhadap tupoksi yang sudah ada.

Solusi :

- 1) Ke depan kegiatan monitoring dan evaluasi yang merupakan tupoksi Bappeda agar lebih diperhatikan lagi oleh pimpinan mengingat kegiatan ini merupakan salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan
- 2) Dapat mengatur ritme pekerjaan sehingga dapat seimbang antara tupoksi dengan tugas-tugas tambahan.

Rencana Aksi

- 1) Perlunya disusun program kerja dan penjadualan kegiatan yang tepat dan saling koordinasi sesama PPTK yang mempunyai kegiatan-kegiatan dan jadwal masing-masing;
- 2) Perlunya penjelasan dan penegasan terhadap SKPD tentang pentingnya data-data yang diminta tersebut oleh pimpinan agar permintaan data lebih diperhatikan;

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Melaksanakan fasilitasi DAK.	Jumlah dokumen Monitoring Pelaksanaan Dana DAK	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah				
	Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi berkala Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	255.983.626,-	51.186.800,-	100 1 Dok	60,36 1 Dok (100%)
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	255.983.626,-			

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kasubbid Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan mengampu 1 Kegiatan untuk mencapai kinerja berupa Melaksanakan fasilitasi DAK dengan indikator Kinerja Jumlah dokumen Monitoring Pelaksanaan Dana DAK, dan Kinerja Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi berkala Pembangunan Daerah.

Berdasarkan kegiatan yang diampu oleh Kasubbid. Penyusunan Program pada tahun 2020 dapat diuraikan ke dalam penjelasan berikut

:

No	Kegiatan & Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	255.983.626,-	51.186.800,-	100 1 Dok	60,36 1 Dok (100%)
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	255.983.626,-			

Kegiatan Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan pada tahun 2020 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 84.806.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 51.186.800,- (60,36%) serta terealisasi secara fisik sebesar 100%. Dalam kegiatan ini dimaksudkan untuk mengakomodir aplikasi emonev dan monev serapan anggaran SKPD.

No	Sisa Target 2020	target s.d 2020	Capaian Tgt target 2020	Capaian Tgt target 2020	Perubahan
1	0%	100%	100%	100%	Dinas Perikanan UPT Obek Wisata Perahu Talukang09-07-2020 11:33:43)
2	0%	100%	100%	100%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan UPT Perikanan Dinas Pekerjaan Umum(09-01-2021 05:44:54)
3	0%	100%	100%	100%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan UPT Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum(11-01-2021 20:10:18)
4	0%	100%	100%	100%	Dinas Perikanan Riptak, Karsakan Perikanan dan Lingkungan Hidup UPT Laboratorium Lingsihang(10-03-2021 15:00:55)
5	0%	100%	100%	100%	Dinas Perikanan(07-08-2020 09:47:13)
6	0%	100%	100%	100%	Badan Pengkajian Keuangan dan Ases Daera(07-01-2021 19:29:52)
7	0%	100%	100%	100%	Dinas Perikanan dan Kelautan Hewan(13-01-2021 10:37:58)
8	0%	100%	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa(11-01-2021 17:51:09)
9	0%	100%	100%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(06-01-2021 04:59:16)
10	0%	100%	100%	100%	Dinas Perencanaan Mada dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(11-01-2021 16:53:54)
11	0%	100%	100%	100%	Sekolah Publik Pening Proja dan Peningkatan Kelangkaan(10-01-2021 16:32:36)
12	0%	100%	100%	100%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan(11-01-2021 23:27:46)
13	0%	100%	100%	100%	Dinas Kelautan Rasi Laboratorium Kelautan(05-01-2021 21:58:30)
14	5,56%	100%	100%	100%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan(11-01-2021 17:36:57)
15	0%	100%	100%	100%	Badan Pengkajian Daerah(13-01-2021 21:29:37)
16	0%	100%	100%	100%	Dinas Perikanan Riptak, Karsakan Perikanan dan Lingkungan Hidup(10-03-2021 15:00:43)
17	0%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat(11-01-2021 21:48:40)
18	0%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah Bagian Pengkajian Barang dan Jasa(11-01-2021 21:24:30)
19	0%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah Bagian Tata Usaha dan Keuangan(11-01-2021 20:57:30)
20	0%	100%	100%	100%	Dinas Perencanaan dan Informatika(13-01-2021 14:36:58)
21	0%	100%	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika(06-01-2021 18:33:19)

Berdasarkan perhitungan pada data tabel diatas diketahui bahwa jumlah anggaran yang dikelola oleh Kasubbid Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan berjumlah Rp84.806.000,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp51.186.800,- atau sekitar 60,36%. Adapun realisasi fisik yang dapat dilaksanakan tercapai 100 persen.

Berdasarkan data diatas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kasubbid Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan dilihat dari serapan anggaran berkatagori RENDAH. Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan berkatagori SANGAT TINGGI karena mencapai 100%.

Pada tahun 2020 kegiatan yang diampu oleh Kasubbid Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan terdampak refocusing terkait penyediaan dana penanggulangan covid-19 dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini, akan tetapi pada anggaran perubahan ada penambahan pagu kembali.

NO	KEGIATAN	PAGU	PAGU REFOCUSING	PERUBAHAN
1.	Pengendalian, Evaluasi dan	255.983.626,-	117.516.000,-	

	Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			255.983.626,-
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	255.983.626,-		255.983.626,-

6. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan

Wilayah.

a. analisis

Terkait dengan capaian kinerja atau akuntabilitas kinerja dan untuk pengukuran penilaian Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2019		2020		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100	100%	100	100%	Persentase capaian sesuai target 100%
		Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100	100%	100	100%	Persentase capaian sesuai target 100%

Sasaran eselon III : Meningkatkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Indikator 1 : Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pencapaian indikator I pada tahun 2019 target Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 350.918.550,-

sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 2 orang eselon IV dan 3 orang staf, serta 1 orang PTT

Sedangkan pada tahun 2020 target pencapaian Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terealisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan Program Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 131.209.400,- mendukung kegiatan ini sebanyak 2 orang eselon IV dan 2 orang staf, serta 1 orang PTT.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2019		2020		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100	100%	100	100%	Persentase capaian sesuai target 100%

Dari hasil capaian realisasi tersebut sesuai dengan capaian target tetapi ada beberapa hal kendala.

Kendala-kendala dalam mencapai target indikator ini antara lain :

- 1) Banyaknya tugas koordinasi di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagai koordinator SKPD lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah cukup menyita waktu sehingga kegiatan monev ini seringkali tidak maksimal dalam mencakup seluruh kegiatan pembangunan yang dilakukan SKPD.
- 2) Perbedaan waktu pelaksanaan monev dengan SKPD terkait.

Solusi :

- 1) Melakukan pembagian tugas di internal bidang sehingga dapat memperluas cakupan area monev yang dilakukan.
- 2) Mengupayakan koordinasi yang lebih baik dengan SKPD.

Rencana Aksi :

- 1) Menyusun jadwal pelaksanaan monev.
- 2) Mengirim surat permintaan jadwal monev ke SKPD

Indikator II : Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pencapaian indikator I pada tahun 2019 target Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 350.918.550,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 2 orang eselon IV dan 3 orang staf, serta 1 orang PTT

Sedangkan pada tahun 2020 target pencapaian Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terealisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan Program Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 131.209.400,- mendukung kegiatan ini sebanyak 2 orang eselon IV dan 2 orang staf, serta 1 orang PTT.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2019		2020		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentas Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100	100%	100	100%	Persentase capaian sesuai target 100%

Dari hasil capaian realisasi tersebut sesuai dengan capaian target tetapi ada beberapa hal kendala.

Kendala-kendala dalam mencapai target indikator ini antara lain :

1) Banyaknya tugas koordinasi di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagai koordinator SKPD lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah cukup menyita waktu sehingga kegiatan monev ini seringkali tidak maksimal dalam mencakup seluruh kegiatan pembangunan yang dilakukan SKPD.

2) Perbedaan waktu pelaksanaan monev dengan SKPD terkait.

Solusi :

1) Melakukan pembagian tugas di internal bidang sehingga dapat memperluas cakupan area monev yang dilakukan.

2) Mengupayakan koordinasi yang lebih baik dengan SKPD.

Rencana Aksi :

1) Menyusun jadwal pelaksanaan monev.

2) Mengirim surat permintaan jadwal monev ke SKPD

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan RKPD.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	131.209.400,-	76.942.800,-	100	58,64
		2. Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	9.900.988,-	26.487.500,-	100	57,52
				10.050.988,-	50.455.300,-	100	59,25

			Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	3.565.140,-		
			Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	13.870.140 ,-		

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mengampu 1 program yaitu **Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah untuk mencapai sasaran kinerja** Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Kinerja Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan RKPD, dan Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Untuk Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah ini dialokasikan anggaran sebesar 131.209.400,- dan berhasil direalisasikan sebesar 76.942.800,- atau sekitar 58,64%. Adapun realisasi fisik program ini tercapai 100 persen yang dapat dilihat pada kinerja 2 orang Kepala Sub Bidang di bawahnya yang akan diuraikan pada uraian berikutnya.

Pada tahun 2020 program yang di ampu oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam mewujudkan capaian target kinerja yang sudah ditetapkan juga terdampak refocusing anggaran terkait penanganan covid-19 dan jika dilihat dari table dibawah mengalami perubahan yang sangat signifikan, tetapi pada anggaran perubahan ada mengalami penambahan pagu anggaran pada kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah ke lapangan.

NO	PROGRAM	PAGU	PAGU REFOCUSING	PERUBAHAN
1.	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	596.663.900,-	117.128.400,-	131.209.400,-

1) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Infrastruktur.

a. analisis

Penilaian dan pengukuran akuntabilitas Kinerja Kasubbid Infrastruktur dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2019		2020		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Sub Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Infrastruktur	100	100%	100	100%	Persentase capaian sesuai target 100%
	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi capaian Pembangunan SKPD Lingkup Sub Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi capaian pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Infrastruktur	100	100%	100	100%	Persentase capaian sesuai target 100%

Sasaran eselon IV : Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Sub Bidang Infrastruktur

Indikator 1 : Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Infrastruktur

Pencapaian indikator I pada tahun 2019 target Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Infrastruktur 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan kegiatan Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan & Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 320.222.300,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 2 orang ASN

Sedangkan pada tahun 2020 target pencapaian target Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Infrastruktur terealisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan kegiatan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Infrastruktur Wilayah dengan jumlah anggaran sebesar (Rp. 85.157.500,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang ASN

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2019		2020		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Sub Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Infrastruktur	100	100%	100	100%	Persentase capaian sesuai target 100%

Dari hasil capaian realisasi tersebut sesuai dengan capaian target tetapi ada beberapa hal kendala.

Kendala-kendala dalam mencapai target indikator ini antara lain :

- 1) Personil yang ada di sub bidang Infrastruktur berjumlah 3 orang sedangkan jumlah SKPD yang diampu sebanyak 11 SKPD. Dari 3 orang personil tersebut hanya 2 orang yang mampu melakukan

verifikasi terhadap kegiatan 11 SKPD yang diampu. Hal ini cukup menyulitkan sub bidang Infrastruktur untuk melakukan verifikasi secara optimal.

- 2) Dengan keterbatasan personil maka alokasi waktu yang diberikan untuk melakukan verifikasi perencanaan SKPD juga dirasakan masih kurang untuk mencermati secara lebih seksama perencanaan SKPD yang diampu sehingga masih sangat dimungkinkan adanya kelemahan dalam proses pelaksanaan verifikasi dari perencanaan-perencanaan SKPD tersebut.

Solusi :

- 1) Meminta SKPD untuk menyampaikan secara lebih dini perencanaan mereka sehingga ada waktu untuk melakukan pencermatan perencanaan yang diusulkan SKPD.
- 2) Memberi saran masukan kepada Tim Bappeda akan perlunya penyusunan jadwal verifikasi yang memang mampu memberikan waktu yang cukup untuk dilakukannya pencermatan secara lebih baik.

Rencana Aksi :

- 1) Memaksimalkan waktu untuk pelaksanaan verifikasi.
- 2) Penyusunan jadwal verifikasi yang lebih baik.

Indikator 2 : Jumlah Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi capaian pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Infrastruktur

Pencapaian indikator I pada tahun 2019 target Jumlah Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi capaian pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Infrastruktur 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan kegiatan Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan & Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 320.222.300,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 2 orang ASN

Sedangkan pada tahun 2020 target pencapaian Jumlah Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi capaian pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Infrastruktur terealisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan kegiatan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Infrastruktur Wilayah dengan jumlah anggaran sebesar (Rp. 85.157.500,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang ASN

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2019		2020		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi capaian Pembangunan SKPD Lingkup Sub Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi capaian pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Infrastruktur	100	100%	100	100%	Persentase capaian sesuai target 100%

Dari hasil capaian realisasi tersebut sesuai dengan capaian target tetapi ada beberapa hal kendala.

Kendala-kendala dalam mencapai target indikator ini antara lain :

- 1) Banyaknya tugas koordinasi di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagai koordinator SKPD lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah cukup menyita waktu sehingga kegiatan monev ini seringkali tidak maksimal dalam mencakup seluruh kegiatan pembangunan yang dilakukan SKPD.
- 2) Perbedaan waktu pelaksanaan monev dengan SKPD terkait.

Solusi :

- 1) Melakukan pembagian tugas di internal bidang sehingga dapat memperluas cakupan area monev yang dilakukan.
- 2) Mengupayakan koordinasi yang lebih baik dengan SKPD.

Rencana Aksi :

- 1) Menyusun jadwal pelaksanaan monev.
- 2) Mengirim surat permintaan jadwal monev ke SKPD

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Kegiatan & Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sub Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Infrastruktur.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	9.900.988,-	50.455.300,-	100	59,25
2.	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi capaian Pembangunan SKPD Lingkup Sub Bidang Infrastruktur.	Jumlah Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi capaian pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Infrastruktur	Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	10.050.988,-		Monev di 6 Kecamatan 7 kali rapat Pokja PPAS	1 Dok RAD AMPL 1 Dok RP2KP KP (100%) Monev di 6 Kecamatan (100%) 7 kali rapat Pokja PPAS (100%)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kasubbid Infrastruktur mengampu 1 Kegiatan untuk mencapai kinerja berupa Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sub Bidang Infrastruktur dengan indikator Kinerja Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Infrastruktur, dan Kinerja Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi capaian Pembangunan SKPD Lingkup Sub Bidang Infrastruktur. dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi capaian pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Infrastruktur.

Berdasarkan kegiatan yang diampu oleh Kasubbid. Infrastruktur Wilayah pada tahun 2020 dapat diuraikan ke dalam penjelasan berikut :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9.900.988,-	50.455.300,-	100 1 Dok RAD AMPL 1 Dok RP2KPKP Monev di 6 Kecamatan 7 kali rapat Pokja PPAS	59,25 1 Dok RAD AMPL 1 Dok RP2KPKP Monev di 6 Kecamatan 7 kali rapat Pokja PPAS
2.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	10.050.988,-			

1. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Infrastruktur Wilayah pada tahun 2020 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 85.157.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 50.455.300,- (59,25%). Rincian kegiatan dalam anggaran tersebut meliputi rapat-rapat mengkoordinatori kegiatan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kabupaten Tanah Laut, Kelompok Kerja Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (PPAS), akan tetapi dalam perjalanannya dikarenakan adanya pandemi covid-19 kegiatan diatas tidak





Berdasarkan perhitungan pada data tabel diatas diketahui bahwa jumlah anggaran yang dikelola oleh Kasubbid Infrastruktur berjumlah Rp85.157.500,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp50.455.300,- atau sekitar 59,25%. Adapun realisasi fisik yang dapat dilaksanakan tercapai 100 persen.

Berdasarkan data diatas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kasubbid Infrastruktur dilihat dari serapan anggaran berkategori RENDAH. Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan berkategori SANGAT TINGGI karena mencapai 100%.

Terkait kinerja capaian pembangunan SKPD Lingkup Sub Bidang Infrastruktur, Kasubbid Infrastruktur membina 10 SKPD. Ke 10 SKPD dan capaian pembangunannya dilihat dari serapan anggaran dan kinerja fisiknya dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	SKPD	Kinerja Keuangan (%)	Kinerja Fisik (%)	Kriteria Penilaian klasifikasi kinerja Keuangan
1	DPUPRP	90,2	97,5	Tinggi
2	Dinas Kepemudaan & Olah Raga	78,8	78,7	Tinggi
3	Kec. Pelaihari	77,8	75,5	Tinggi
4	Kec. Kurau	94,1	93,5	Sangat Tinggi
5	Kec. Bumi Makmur	85,1	94,1	Sangat Tinggi
6	Kec. Bati-Bati	46,0	49,1	Sangat Rendah
7	Kec. Tambang Ulang	92,6	92,9	Sangat Tinggi
8	Kel. Pelaihari	82,3	92,1	Sangat Tinggi
9	Kel. Pabahanan	84,4	83,2	Tinggi

10	Kel. Sarang Halang	91,2	91,3	Sangat Tinggi
----	--------------------	------	------	---------------

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja dari SKPD Lingkup sub Bidang Infrastruktur terlihat rata-rata Sangat Tinggi dan Tinggi, kecuali Kecamatan Bati-Bati yang katagorinya Sangat Rendah. Hal ini sebagai salah satu gambaran hasil fasilitasi dari Kasubbid Infrastruktur terhadap Penyusunan Perencanaan dan capaian kinerja dari SKPD-SKPD tersebut telah berjalan dengan baik.

Pada tahun 2020 kegiatan yang diampu oleh Kasubbid Infrastruktur terdampak refocusing terkait penyediaan dana penanggulangan covid-19 dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	KEGIATAN	PAGU	PAGU REFOCUSING	PERUBAHAN
1.	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Infrastruktur Wilayah	497.000.000,-	68.147.500,-	85.157.500,-

2) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Pengembangan Wilayah.

a. analisis

Pengukuran dan penilaian Akuntabilitas Kinerja Kasubbid

Pengembangan Wilayah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2019		2020		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup sub bidang Pengembangan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sub Bidang Pengembangan Wilayah	100	100%	100	100%	Persentase capaian sesuai target 100%
	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi capaian Pembangunan SKPD Lingkup sub bidang Pengembangan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah	100	100%	100	100%	Persentase capaian sesuai target 100%

		Wilayah				
--	--	---------	--	--	--	--

Sasaran eselon IV : Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan
Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup sub bidang
Pengembangan Wilayah

Indikator 1 : Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan
Perencanaan Pembangunan Daerah sub Bidang Pengembangan
Wilayah

Pencapaian indikator I pada tahun 2019 target Jumlah Laporan
Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan 100% untuk mencapai indikator ini
didukung dengan kegiatan Koordinasi pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan & Penetapan
kebijakan, strategi, dan program perumahan dengan jumlah anggaran
sebesar Rp. 320.222.300,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan
ini 1 orang ASN dan 1 orang PTT

Sedangkan pada tahun 2020 target pencapaian Jumlah Laporan
Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan terealisasi sebesar 100% untuk
mencapai indikator ini didukung dengan Perencanaan Pembangunan
Sub Bidang Pengembangan Wilayah dengan jumlah anggaran sebesar
Rp. 46.051.900,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini 1
orang ASN dan 1 orang PTT

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian
terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2019		2020		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup sub bidang Pengembangan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sub Bidang Pengembangan Wilayah	100	100%	100	100%	Persentase capaian sesuai target 100%

Dari hasil capaian realisasi tersebut sesuai dengan capaian target
tetapi ada beberapa hal kendala.

Kendala-kendala dalam mencapai target indikator ini antara lain :

- 1) Personil yang ada di sub bidang Infrastruktur berjumlah 3 orang sedangkan jumlah SKPD yang diampu sebanyak 11 SKPD. Dari 3 orang personil tersebut hanya 2 orang yang mampu melakukan verifikasi terhadap kegiatan 11 SKPD yang diampu. Hal ini cukup menyulitkan sub bidang Infrastruktur untuk melakukan verifikasi secara optimal.
- 2) Dengan keterbatasan personil maka alokasi waktu yang diberikan untuk melakukan verifikasi perencanaan SKPD juga dirasakan masih kurang untuk mencermati secara lebih seksama perencanaan SKPD yang diampu sehingga masih sangat dimungkinkan adanya kelemahan dalam proses pelaksanaan verifikasi dari perencanaan-perencanaan SKPD tersebut.

Solusi :

- 1) Meminta SKPD untuk menyampaikan secara lebih dini perencanaan mereka sehingga ada waktu untuk melakukan pencermatan perencanaan yang diusulkan SKPD.
- 2) Memberi saran masukan kepada Tim Bappeda akan perlunya penyusunan jadwal verifikasi yang memang mampu memberikan waktu yang cukup untuk dilakukannya pencermatan secara lebih baik.

Rencana Aksi :

- 1) Memaksimalkan waktu untuk pelaksanaan verifikasi.
- 2) Penyusunan jadwal verifikasi yang lebih baik.

Indikator 2 : Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah

Pencapaian indikator I pada tahun 2019 target Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan kegiatan Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan & Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan dengan jumlah anggaran

sebesar Rp. 320.222.300,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini 1 orang ASN dan 1 orang PTT

Sedangkan pada tahun 2020 target pencapaian Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah terealisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Wilayah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 46.051.900,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini 1 orang ASN dan 1 orang PTT

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2019		2020		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi capaian Pembangunan SKPD Lingkup sub bidang Pengembangan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah	100	100%	100	100%	Persentase capaian sesuai target 100%

Dari hasil capaian realisasi tersebut sesuai dengan capaian target tetapi ada beberapa hal kendala.

Kendala-kendala dalam mencapai target indikator ini antara lain :

- 1) Banyaknya tugas koordinasi di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagai koordinator SKPD lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah cukup menyita waktu sehingga kegiatan monev ini seringkali tidak maksimal dalam mencakup seluruh kegiatan pembangunan yang dilakukan SKPD.
- 2) Perbedaan waktu pelaksanaan monev dengan SKPD terkait.

Solusi :

- 1) Melakukan pembagian tugas di internal bidang sehingga dapat memperluas cakupan area monev yang dilakukan.
- 2) Mengupayakan koordinasi yang lebih baik dengan SKPD.

Rencana Aksi :

- 3) Menyusun jadwal pelaksanaan monev.
- 4) Mengirim surat permintaan jadwal monev ke SKPD

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Kegiatan & Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup sub bidang Pengembangan Wilayah.	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sub Bidang Pengembangan Wilayah.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	46.051.900,-	26.487.500,-	100 11 kali monitoring 1 Dok Lap Monev	57,52 11 kali monitoring (100%) 1 Dok Lap Monev (100%)
2.	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi capaian Pembangunan SKPD Lingkup sub bidang Pengembangan Wilayah.	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi SKPD lingkup Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	49.882.076,-			

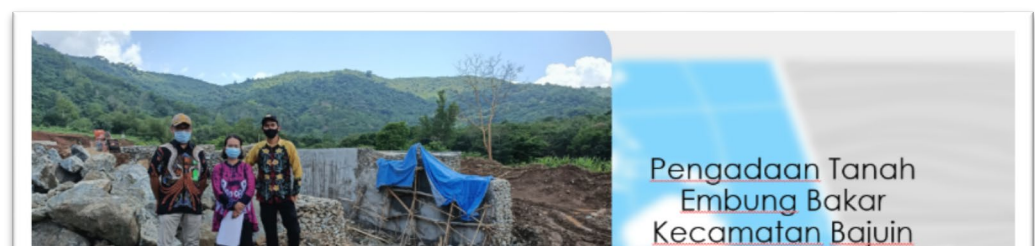
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kasubbid Pengembangan Wilayah mengampu 1 Kegiatan untuk mencapai kinerja berupa Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup sub bidang Pengembangan Wilayah dengan indikator Kinerja Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sub Bidang Pengembangan Wilayah, dan Kinerja Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi capaian Pembangunan SKPD Lingkup sub bidang Pengembangan Wilayah

dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah.

Berdasarkan kegiatan yang diampu oleh Kasubbid. Pengembangan Wilayah pada tahun 2020 dapat diuraikan ke dalam penjelasan berikut :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	46.051.900,-	26.487.500,-	100	57,52
2.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	46.051.900,-		11 kali monitoring 1 Dok Lap Money	11 kali monitoring (100%) 1 Dok Lap Money (100%)
3.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	49.882.076,-			

1. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Wilayah pada tahun 2020 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 46.051.900,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 26.487.500,- (57,52%). Rincian kegiatan dalam anggaran tersebut meliputi rapat-rapat kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kelompok Kerja Pengembangan Wilayah Kabupaten Tanah Laut, akan tetapi dalam perjalanannya dikarenakan adanya pandemi covid-19 kegiatan diatas tidak maksimal dilaksanakan dan terkena refocusing anggaran. Dalam kegiatan ini juga terdapat monitoring dan evaluasi ke beberapa Kecamatan sebagai berikut :





Berdasarkan perhitungan pada data tabel diatas diketahui bahwa jumlah anggaran yang dikelola oleh Kasubbid Pengembangan Wilayah berjumlah Rp. 46.051.900,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 26.487.500,- atau sekitar 57,52%. Adapun realisasi fisik yang dapat dilaksanakan tercapai 100 persen.

Melihat kepada data diatas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kasubbid Pengembangan Wilayah dilihat dari serapan anggaran berkategori RENDAH. Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan berkategori SANGAT TINGGI karena mencapai 100%.

Terkait kinerja capaian pembangunan SKPD Lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Kasubbid Pengembangan Wilayah membina 11 SKPD. Ke 11 SKPD dan capaian pembangunannya dilihat dari serapan anggaran dan kinerja fisiknya dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	SKPD	Kinerja Keuangan (%)	Kinerja Fisik (%)	Kriteria Penilaian klasifikasi kinerja keuangan
1	DPRKPLH	91,8	94,5	Sangat Tinggi
2	DISKOMINFO	92,6	92,6	Sangat Tinggi
3	DISHUB	88,7	88,7	Tinggi
4	Kec. Panyipatan	88,7	88,7	Tinggi
5	Kec. Takisung	84,3	95	Tinggi
6	Kec. Jorong	87,6	87,6	Tinggi
7	Kec. Kintap	83,9	95,1	Tinggi
8	Kec. Bajuin	92,2	93,5	Sangat Tinggi

9	Kec. Batu Ampar	79,2	79,2	Tinggi
10	Kel. Angsau	95,9	95,9	Sangat Tinggi
11	Kel. Karang Taruna	67,8	58,8	Sedang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja dari SKPD Lingkup sub Bidang Pengembangan Wilayah terlihat rata-rata Sangat Tinggi dan Tinggi, kecuali Kelurahan Karang Taruna yang katagorinya Sedang. Hal ini sebagai salah satu gambaran hasil fasilitasi dari Kasubbid Pengembangan Wilayah terhadap Penyusunan Perencanaan dan capaian kinerja dari SKPD-SKPD tersebut telah berjalan dengan sangat baik.

Pada tahun 2020 kegiatan yang diampu oleh Kasubbid pengembangan wilayah terdampak refocusing terkait penyediaan dana penanggulangan covid-19 dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	KEGIATAN	PAGU	PAGU REFOCUSING	PERUBAHAN
1.	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Wilayah	99.663.900,-	48.980.900,-	46.051.900,-

7. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Ekonomi dan SDA

a. analisis

Penilaian dan pengukuran akuntabilitas kinerja Kepala Bidang Ekonomi dan SDA dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2019		2020		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Ekonomi dan SDA	Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan RKPD	100	100%	100	100%	Persentase capaian sesuai target 100%
		Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam	100	100%	100	100%	Persentase capaian sesuai target 100%

Sasaran eselon III : Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Ekonomi dan SDA

Indikator 1 : Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan RKPD

Pencapaian indikator I pada tahun 2019 target Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan RKPD 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 121.390.000,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 2 orang eselon IV dan 1 orang ASN, serta 1 orang PTT

Sedangkan pada tahun 2020 target pencapaian Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan RKPD terlealisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 76.872.880,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 2 orang eselon IV dan 1 orang ASN, serta 1 orang PTT

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2019		2020		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Ekonomi dan SDA	Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan RKPD	100	100%	100	100%	Persentase capaian sesuai target 100%

Dari hasil capaian realisasi tersebut sesuai dengan capaian target tetapi ada beberapa hal kendala.

Kendala :

- 1) Banyaknya tugas koordinasi di bidang Ekonomi dan SDA sebagai koordinator SKPD lingkup bidang Ekonomi dan SDA cukup menyita

waktu sehingga kegiatan monev ini seringkali tidak maksimal dalam mencakup seluruh kegiatan pembangunan yang dilakukan SKPD.

- 2) SKPD terkait sendiri sangat jarang bertepatan waktu monevnya sehingga saat dilapangan hanya bertemu dengan para tukang yang melaksanakan pembangunan.

Solusi :

- 1) Melakukan pembagian tugas di internal bidang sehingga dapat memperluas cakupan area monev yang dilakukan.
- 2) Mengupayakan koordinasi yang lebih baik dengan SKPD.

Rencana Aksi :

- 1) Menyusun jadwal pelaksanaan monev.
- 2) Mengirim surat permintaan jadwal monev ke SKPD.

Indikator II : Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam

Pencapaian indikator II pada tahun 2019 target Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 121.390.000,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 2 orang eselon IV dan 1 orang ASN, serta 1 orang PTT

Sedangkan pada tahun 2020 target pencapaian Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam terleasisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 76.872.880,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 2 orang eselon IV dan 1 orang ASN, serta 1 orang PTT

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2019		2020		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Ekonomi dan SDA	Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam	100	100%	100	100%	Persentase capaian sesuai target 100%

Dari hasil capaian realisasi tersebut sesuai dengan capaian target tetapi ada beberapa hal kendala.

Kendala :

- 1) Banyaknya tugas koordinasi di bidang Ekonomi dan SDA sebagai koordinator SKPD lingkup bidang Ekonomi dan SDA cukup menyita waktu sehingga kegiatan monev ini seringkali tidak maksimal dalam mencakup seluruh kegiatan pembangunan yang dilakukan SKPD.
- 2) SKPD terkait sendiri sangat jarang bertepatan waktu monevnya sehingga saat dilapangan hanya bertemu dengan para tukang yang melaksanakan pembangunan.

Solusi :

- 1) Melakukan pembagian tugas di internal bidang sehingga dapat memperluas cakupan area monev yang dilakukan.
- 2) Mengupayakan koordinasi yang lebih baik dengan SKPD.

Rencana Aksi :

- 1) Menyusun jadwal pelaksanaan monev.
- 2) Mengirim surat permintaan jadwal monev ke SKPD.

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Kegiatan & Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	1. Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	76.872.880,-	34.484.500,-	100	44,86
				34.517.880,-	7.485.200,-	100	21,68

	<p>unan Daerah.</p>	<p>dengan RKPD</p> <p>2. Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam</p>	<p>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</p> <p>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</p> <p>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian</p> <p>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p>	<p>9.679.800,-</p> <p>0,-</p> <p>40.504.320,-</p> <p>12.820.480,-</p> <p>16.190.540,-</p>	<p>26.999.300,-</p>	<p>100</p>	<p>63,75</p>
--	---------------------	--	--	---	---------------------	------------	--------------

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kepala Bidang Ekonomi dan SDA mengampu 1 program yaitu Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan SDA untuk mencapai sasaran kinerja

Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Kinerja Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan RKPD, dan Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam.

Untuk Program Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan SDA ini dialokasikan anggaran sebesar 76.872.880,- dan berhasil direalisasikan sebesar 34.484.500,- atau sekitar 44,86%. Adapun realisasi fisik program ini tercapai 100 persen yang dapat dilihat pada kinerja 2 orang Kepala Sub Bidang di bawahnya yang akan diuraikan pada uraian berikutnya. Pada kegiatan yang diampu oleh bidang ekonomi lebih mengakomodir fasilitasi perencanaan SKPD pada sub bidang SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pertanian, Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, dalam kegiatan tersebut juga terdapat Monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan data diatas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kepala Bidang Ekonomi dan SDA dilihat dari serapan anggaran berkategori SANGAT RENDAH. Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan berkategori SANGAT TINGGI karena mencapai 100%.

Pada tahun 2020 program yang diampu oleh Kepala Bidang Ekonomi dan SDA juga terdampak refocusing anggaran untuk penanganan covid-19 dan dapat dilihat pada table dibawah ini :

NO	PROGRAM	PAGU	PAGU REFOCUSING	PERUBAHAN
1.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	186.709.280,-	89.954.280,-	76.872.880,-

1) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Pertanian, Industri, Perdagangan & Koperasi.

a. Analisis

Pengukuran dan Penilaian akuntabilitas Kinerja Kasubbid Pertanian, Industri, Perdagangan & Koperasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2019		2020		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Pertanianindagkop	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Pertanianindagkop	100	100%	100	100%	Persentase capaian sesuai target 100%
	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Capaian Pembangunan SKPD Lingkup sub Bidang Pertanianindagkop	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Pertanianindagkop	100	100%	100	100%	Persentase capaian sesuai target 100%

Sasaran eselon IV : Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Pertanianindagkop

Indikator 1 : Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Pertanianindagkop

Pencapaian indikator I pada tahun 2019 target Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Pertanianindagkop 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 121.390.000,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang ASN

Sedangkan pada tahun 2020 target pencapaian Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Pertanianindagkop terleasisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan kegiatan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian, Industri, Perdagangan dan

Koperasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 42.355.000,00 sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang ASN
 Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2019		2020		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Melaksanakan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Pertanianidagkop	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Pertanianidagkop	100	100%	100	100%	Persentase capaian sesuai target 100%

Dari hasil capaian realisasi tersebut sesuai dengan capaian target tetapi ada beberapa hal kendala.

Kendala :

1. Banyaknya tugas koordinasi di bidang Ekonomi dan SDA sebagai koordinator SKPD lingkup bidang Ekonomi dan SDA cukup menyita waktu sehingga kegiatan ini seringkali tidak maksimal dalam mencakup seluruh kegiatan perencanaan yang dilakukan SKPD.
2. Kegiatan ini juga terdampak refocusing terkait penanganan covid

Solusi :

- 1) Melakukan pembagian tugas di internal bidang sehingga dapat mempersingkat waktu verifikasi dengan SKPD.
- 2) Mengupayakan koordinasi yang lebih baik dengan SKPD.

Rencana Aksi

- 1) Lebih banyak membuka ruang untuk berkoordinasi dengan SKPD
- 2) Lebih memaksimalkan personil di internal.

Indikator 2 : Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Pertanianidagkop

Pencapaian indikator I pada tahun 2019 target Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Pertanianidagkop 100% untuk mencapai indikator ini

didukung dengan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 121.390.000,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang ASN

Sedangkan pada tahun 2020 target pencapaian Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Pertanindagkop terealisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan kegiatan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian, Industri, Perdagangan dan Koperasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 42.355.000,00 sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang ASN

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2019		2020		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Capaian Pembangunan SKPD Lingkup sub Bidang Pertanindagkop	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Pertanindagkop	100	100%	100	100%	Persentase sesuai target 100%

Dari hasil capaian realisasi tersebut sesuai dengan capaian target tetapi ada beberapa hal kendala.

Kendala :

1. Banyaknya tugas koordinasi di bidang Ekonomi dan SDA sebagai koordinator SKPD lingkup bidang Ekonomi dan SDA cukup menyita waktu sehingga kegiatan ini seringkali tidak maksimal dalam mencakup seluruh lokasi monev yang dilakukan SKPD.
2. Kegiatan ini juga terdampak refocusing terkait penanganan covid

Solusi :

- 1) Melakukan pembagian tugas di internal bidang sehingga dapat memperluas cakupan area monev yang dilakukan.
- 2) Mengupayakan koordinasi yang lebih baik dengan SKPD.

Rencana Aksi

1) Menyusun jadwal pelaksanaan monev.

2) Mengirim surat permintaan jadwal monev ke SKPD.

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Kegiatan & Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Pertanian agkop	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Pertanian	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9.679.800,-	26.999.300,-	100	63,75
2.	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Capaian Pembangunan SKPD Lingkup sub Bidang Pertanian agkop.	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Pertanian		0,-		8 kali rakor lintas SKPD 12 kali rapat internal bidang.	5 kali rapat koordinasi perencanaan (100%). 8 kali rakor lintas SKPD (100%) 12 kali rapat internal bidang. (100%)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kasubbid Pertanian, Industri, Perdagangan & Koperasi mengampu 1 Kegiatan yaitu

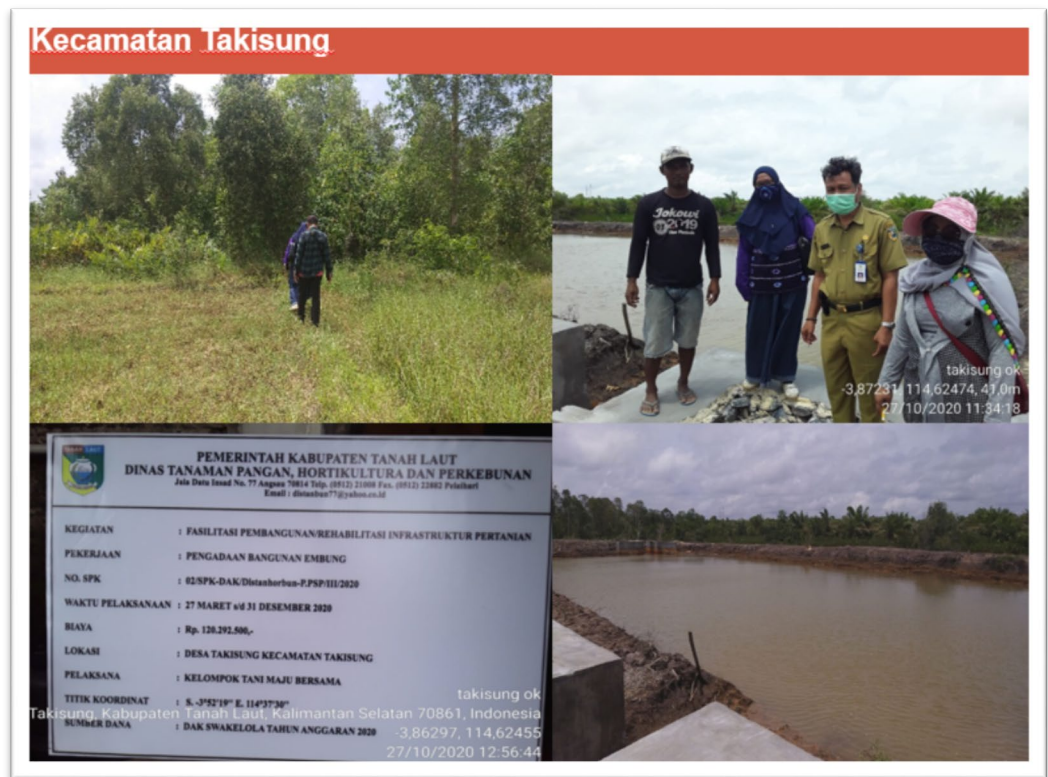
Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian, Industri, Perdagangan dan Koperasi untuk mencapai kinerja berupa Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Pertanindagkop dengan indikator Kinerja Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Pertanindagkop, dan Kinerja Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Capaian Pembangunan SKPD Lingkup sub Bidang Pertanindagkop dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Pertanindagkop.

Berdasarkan kegiatan yang diampu oleh Kasubbid. Pertanian, Industri, Perdagangan & Koperasi pada tahun 2020 dapat diuraikan ke dalam penjelasan berikut :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	42.355.000,-	26.999.300,-	100	63,75
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9.679.800,-		5 kali rapat koordinasi perencanaan 8 kali rakor lintas SKPD	5 kali rapat koordinasi perencanaan (100%). 8 kali rakor lintas SKPD (100%)
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	0,-		12 kali rapat internal bidang.	12 kali rapat internal bidang. (100%)
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	40.504.320,-			

Perekonomian				
--------------	--	--	--	--

1. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian, Industri, Perdagangan dan Koperasi pada tahun 2020 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 42.355.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 26.999.300,- (63,75%). Rincian kegiatan dalam anggaran tersebut meliputi rapat-rapat kegiatan pendampingan penyusunan dan evaluasi rencana kerja maupun perencanaan SKPD sub bidang pertanian, industri, perdagangan dan Koperasi akan tetapi dalam perjalanannya dikarenakan adanya pandemi covid-19 terkena refocusing anggaran. Dalam kegiatan ini juga terdapat monitoring dan evaluasi ke beberapa Kecamatan sebagai berikut :



Berdasarkan perhitungan pada data tabel diatas diketahui bahwa jumlah anggaran yang dikelola oleh Kasubbid Pertanian, Industri, Perdagangan & Koperasi berjumlah Rp. 42.355.000,- dan berhasil direalisasikan sebesar 26.999.300,- atau sekitar 63,75%. Adapun realisasi fisik yang dapat dilaksanakan tercapai 100 persen.

Berdasarkan data diatas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kasubbid Pertanian, Industri, Perdagangan & Koperasi dilihat dari serapan anggaran berkatagori RENDAH. Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan berkatagori SANGAT TINGGI karena mencapai 100%.

Terkait kinerja capaian pembangunan SKPD Lingkup Sub Bidang Pertanian, Industri, Perdagangan & Koperasi, Kasubbid Pertaniandagkop membina 5 SKPD. Ke 5 SKPD dan capaian pembangunannya dilihat dari serapan anggaran dan kinerja fisiknya dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	SKPD	Kinerja Keuangan (%)	Kinerja Fisik (%)	Kriteria Penilaian klasifikasi kinerja Keuangan
1	DISNAKERIN	83,1	72,0	Tinggi
2	DKPP	79,8	91,9	Tinggi
3	DISKOPDAG	80,7	85,5	Tinggi
4	DISTANHORBUN	94,0	96,3	Sangat Tinggi
5	DISNAKESWAN	87,9	99,1	Tinggi

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja dari SKPD Lingkup sub Bidang Pertanian, Industri, Perdagangan & Koperasi terlihat rata-rata Tinggi, kecuali Distanhorbun yang katagorinya Sangat Tinggi. Ini menunjukkan bahwa hasil fasilitasi dari Kasubbid Pertaniandagkop terhadap Penyusunan Perencanaan dan capaian kinerja dari SKPD-SKPD tersebut telah berjalan dengan baik.

Pada tahun 2020 kegiatan yang diampu oleh Kasubbid Pertanian, Industri, Perdagangan & Koperasi terdampak refocusing terkait penanganan covid-19 dapat dilihat pada table dibawah ini :

NO	KEGIATAN	PAGU	PAGU REFOCUSING	PERUBAHAN
1.	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian, Industri, Perdagangan dan Koperasi	105.000.000,-	52.980.000,-	42.355.000,-

2) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

a. analisis

Pernilaian dan pengukuran akuntabilitas Kinerja Kasubbid SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2019		2020		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang SDA, Pembangunan Dunia Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi, Fasilitasi Terkait sub Bidang SDA, Bang.Dunia usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100	100%	100	100%	Persentase sesuai target 100%
	Melaksanakan Monitoring dan evaluasi capaian Pembangunan SKPD Lingkup sub Bidang SDA, Bandus, Par dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monev Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang SDA, Bang.Dunia Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100	100%	100	100%	Persentase sesuai target 100%

Sasaran eselon IV : Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang SDA, Pembangunan Dunia Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Indikator 1 : Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi, Fasilitasi Terkait sub Bidang SDA, Bang.Dunia usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pencapaian indikator I pada tahun 2019 target Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi, Fasilitasi Terkait sub Bidang SDA, Bang.Dunia usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 100% untuk mencapai indikator

ini didukung dengan Kegiatan Perencanaan pembangunan Bidang ekonomi dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 121.390.000,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang PTT

Sedangkan pada tahun 2020 target pencapaian persentasi perencanaan kesesuaian perencanaan RKPD dengan RPJMD terealisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan kegiatan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 34.517.880,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang PTT

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2019		2020		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang SDA, Pembangunan Dunia Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi, Fasilitasi Terkait sub Bidang SDA, Bang.Dunia usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100	100%	100	100%	Persentase sesuai target 100%

Dari hasil capaian realisasi tersebut sesuai dengan capaian target tetapi ada beberapa hal kendala.

Kendala :

- 1) Personil yang ada di sub bidang ini berjumlah 2 orang sedangkan jumlah SKPD yang diampu sebanyak 2 SKPD. Dari 2 orang personil tersebut hanya 1 orang yang mampu melakukan verifikasi terhadap kegiatan 2 SKPD yang diampu. Hal ini cukup menyulitkan bidang Ekonomi dan SDA untuk melakukan verifikasi secara optimal.
- 2) Dengan keterbatasan personil maka alokasi waktu yang diberikan untuk melakukan verifikasi perencanaan SKPD juga dirasakan masih kurang untuk mencermati secara lebih seksama perencanaan SKPD yang diampu sehingga masih sangat

dimungkinkan adanya kelemahan dalam proses pelaksanaan verifikasi dari perencanaan-perencanaan SKPD tersebut

3) Kegiatan ini juga terdampak refocusing terkait penanganan covid

Solusi :

1) Meminta SKPD untuk menyampaikan secara lebih dini perencanaan mereka sehingga ada waktu untuk melakukan pencermatan perencanaan yang diusulkan SKPD.

2) Memberi saran masukan kepada Tim Bappeda akan perlunya penyusunan jadwal verifikasi yang memang mampu memberikan waktu yang cukup untuk dilakukannya pencermatan secara lebih baik

Rencana Aksi

1) Memaksimalkan waktu untuk pelaksanaan verifikasi.

2) Penyusunan jadwal verifikasi yang lebih baik.

Indikator 2 : Jumlah Laporan Hasil Monev Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang SDA, Bang.Dunia Usaha , Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pencapaian indikator I pada tahun 2019 target Jumlah Laporan Hasil Monev Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang SDA, Bang.Dunia Usaha , Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan Kegiatan Perencanaan pembangunan Bidang ekonomi dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 121.390.000,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang PTT

Sedangkan pada tahun 2020 target pencapaian Jumlah Laporan Hasil Monev Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang SDA, Bang.Dunia Usaha , Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terealisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan kegiatan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan jumlah anggaran sebesar Rp.

34.517.880,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang PTT

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2019		2020		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Melaksanakan Monitoring dan evaluasi capaian Pembangunan SKPD Lingkup sub Bidang SDA, Bandus, Par dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monev Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang SDA, Bang.Dunia Usaha , Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100	100%	100	100%	Persentase sesuai target 100%

Dari hasil capaian realisasi tersebut sesuai dengan capaian target tetapi ada beberapa hal kendala

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini :

- 1) Banyaknya tugas koordinasi di bidang Ekonomi dan SDA sebagai koordinator SKPD lingkup bidang Ekonomi dan SDA cukup menyita waktu sehingga kegiatan monev ini seringkali tidak maksimal dalam mencakup seluruh kegiatan pembangunan yang dilakukan SKPD.
- 2) SKPD terkait sendiri sangat jarang bertepatan waktu monevnya sehingga saat dilapangan hanya bertemu dengan para tukang yang melaksanakan pembangunan.

Solusi terkait permasalahan diatas adalah :

- 1) Melakukan pembagian tugas di internal bidang sehingga dapat memperluas cakupan area monev yang dilakukan.
- 2) Mengupayakan koordinasi yang lebih baik dengan SKPD.

Rencana Aksi yang dilakukan :

- 1) Menyusun jadwal pelaksanaan monev.
- 2) Mengirim surat permintaan jadwal monev ke SKPD.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup sub bidang SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sub Bidang SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				
					7.485.200,-	100	21,68
	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi capaian Pembangunan SKPD Lingkup sub bidang SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	12.820.480,-		2 kali rapat tim fasilitasi perencanaan	2 kali rapat tim fasilitasi perencanaan (100%)
2.						2 kali rapat rakor fasilitasi SDA	2 kali rapat rakor fasilitasi SDA (100%)
				16.190.540,-		2 kali rapat CSR (100%)	2 kali rapat CSR (100%)
						9 Kali Movev	9 Kali Movev

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kasubbid SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengampu 1 Kegiatan yaitu Perencanaan Pembangunan Sub Bidang SDA, Pengembangan Dunia Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mencapai kinerja berupa Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup sub bidang SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan indikator Kinerja Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sub Bidang SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kinerja Melaksanakan

Monitoring dan Evaluasi capaian Pembangunan SKPD Lingkup sub bidang SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Pertanindagkop SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Berdasarkan kegiatan yang diampu oleh Kasubbid. SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2020 dapat diuraikan ke dalam penjelasan berikut :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	34.517.880,-	7.485.200,-	100	21,68
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	12.820.480,-		2 kali rapat rakor fasilitasi SDA	2 kali rapat tim fasilitasi perencanaan (100%) 2 kali rapat rakor fasilitasi SDA (100%)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16.190.540,-		2 kali rapat CSR (100%) 9 Kali Monev	2 kali rapat CSR (100%) 9 Kali Monev

1. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2020 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 34.517.880,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.485.200,- (21,68%). Rincian kegiatan dalam anggaran tersebut meliputi rapat-rapat kegiatan pendampingan penyusunan dan evaluasi rencana kerja maupun perencanaan SKPD sub bidang SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi akan tetapi dikarenakan adanya pandemi covid-19 terkena refocusing anggaran dan beberapa kegiatan monev tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Dalam kegiatan

ini juga terdapat monitoring dan evaluasi ke beberapa Kecamatan sebagai berikut :



Berdasarkan perhitungan pada data tabel diatas diketahui bahwa jumlah anggaran yang dikelola oleh Kasubbid SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berjumlah Rp34.517.880,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp7.485.200,- atau sekitar 21,68%. Adapun realisasi fisik yang dapat dilaksanakan tercapai 100 persen.

Berdasarkan data diatas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kasubbid SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dilihat dari serapan anggaran berkatagori SANGAT RENDAH. Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan berkatagori SANGAT TINGGI karena mencapai 100%.

Terkait kinerja capaian pembangunan SKPD Lingkup Sub Bidang SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kasubbid SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membina 4 SKPD. Ke 4 SKPD dan capaian pembangunannya dilihat dari serapan anggaran dan kinerja fisiknya dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	SKPD	Kinerja Keuangan (%)	Kinerja Fisik (%)	Kriteria Penilaian klasifikasi kinerja Keuangan
1	DISPAR	83,1	72,0	Tinggi
2	DPMPSTSP	79,8	91,9	Tinggi
3	BPKAD	80,7	85,5	Tinggi
4	BAPENDA	94,0	96,3	Sangat Tinggi

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja dari SKPD Lingkup sub Bidang SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terlihat rata-rata Tinggi, kecuali BAPENDA yang katagorinya Sangat Tinggi. Ini menunjukkan bahwa hasil fasilitasi dari Kasubbid SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Penyusunan Perencanaan dan capaian kinerja dari SKPD-SKPD tersebut telah berjalan dengan baik.

Pada tahun 2020 kegiatan yang diampu oleh Kasubbid SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdampak

refocusing terkait penanganan covid-19 dapat dilihat pada table dibawah ini :

NO	KEGIATAN & SUB KEGIATAN	PAGU	PAGU REFOCUSING	PERUBAHAN
1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		36.974.280,-	34.517.880,-
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	49.021.810,-		12.820.480,-
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	29.734.240,-		16.190.540,-

8. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Sosial Budaya.

a. analisis

Penilaian dan pengukuran akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Sosial Budaya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2019		2020		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan SKPD Lingkup Sosial budaya	Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya	100	100%	100	100%	Persentase capaian sesuai target 100%
		Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya	100	100%	100	100%	Persentase capaian sesuai target 100%

Sasaran eselon III : Meningkatkan Keselarasan Perencanaan pembangunan SKPD Lingkup Sosial budaya

Indikator 1 : Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya

Pencapaian indikator I pada tahun 2019 target Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan Program perencanaan sosial

dan budaya kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 56.558.100,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 2 orang eselon IV dan 2 orang ASN, serta 1 orang PTT

Sedangkan pada tahun 2020 target pencapaian Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya terlealisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan Program Perencanaan Sosial dan Budaya dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 92.915.000,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 2 orang eselon IV dan 2 orang ASN, serta 1 orang PTT

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2019		2020		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan SKPD Lingkup Sosial budaya	Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya	100	100%	100	100%	Persentase capaian sesuai target 100%

Dari hasil capaian realisasi tersebut sesuai dengan capaian target tetapi ada beberapa hal kendala.

Kendala :

- 1) Kepadatan tugas di bidang sosial budaya sebagai coordinator SKPD lingkup bidang sosial budaya cukup menyita waktu sehingga kegiatan monev ini seringkali tidak maksimal dalam mencakup seluruh kegiatan pembangunan yang dilakukan SKPD.
- 2) SKPD terkait sendiri sangat jarang bertepatan waktu monevnya sehingga saat dilapangan hanya bertemu dengan para tukang yang melaksanakan pembangunan.

Solusi :

- 1) Melakukan pembagian tugas di internal bidang sehingga dapat memperluas cakupan area monev yang dilakukan.
- 2) Mengupayakan koordinasi yang lebih baik dengan SKPD.

Rencana Aksi :

- 1) Menyusun jadwal pelaksanaan monev.
- 2) Mengirim surat permintaan jadwal monev ke SKPD.

Indikator II : Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya

Pencapaian indikator I pada tahun 2019 target Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan Program perencanaan sosial dan budaya kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 56.558.100,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 2 orang eselon IV dan 2 orang ASN, serta 1 orang PTT

Sedangkan pada tahun 2020 target pencapaian Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya terlealisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan Program Perencanaan Sosial dan Budaya dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 92.915.000,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 2 orang eselon IV dan 2 orang ASN, serta 1 orang PTT

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2019		2020		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan SKPD Lingkup Sosial budaya	Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya	100	100%	100	100%	Persentase capaian sesuai target 100%

Dari hasil capaian realisasi tersebut sesuai dengan capaian target tetapi ada beberapa hal kendala.

Kendala :

- 1) Kepadatan tugas di bidang sosial budaya sebagai coordinator SKPD lingkup bidang sosial budaya cukup menyita waktu sehingga

kegiatan monev ini seringkali tidak maksimal dalam mencakup seluruh kegiatan pembangunan yang dilakukan SKPD.

- 2) SKPD terkait sendiri sangat jarang bertepatan waktu monevnya sehingga saat dilapangan hanya bertemu dengan para tukang yang melaksanakan pembangunan.

Solusi :

- 1) Melakukan pembagian tugas di internal bidang sehingga dapat memperluas cakupan area monev yang dilakukan.
- 2) Mengupayakan koordinasi yang lebih baik dengan SKPD.

Rencana Aksi :

- 1) Menyusun jadwal pelaksanaan monev.
- 2) Mengirim surat permintaan jadwal monev ke SKPD.

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Meningkatkannya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Sosial Buaya dengan RKPD	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		42.531.600,-	100	45,77
				17.638.000,-	100	35,98	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	26.882.946,-	100	52,59	
				10.462.200,-	100	52,59	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	3.683.210,-			

			Pemerintahan			
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	20.429.240,-		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			
			Koordinasi Penyusunan Dokumen	63.395.900,-		
			Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
			Asistensi Penyusunan Dokumen	10.000.000,-		
			Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	21.759.940,-		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kepala Bidang Sosial Budaya mengampu 1 program yaitu Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya untuk mencapai sasaran kinerja berupa Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Kinerja persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya dengan RKPD, dan Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya. Pada Bidang Sosial Budaya yang didalamnya terdapat kegiatan yang mengakomodir fasilitasi perencanaan SKPD sub bidang Politik, Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia serta kegiatan Monitoring dan Evaluasi SKPD yang tergabung dalam sub bidang tersebut, di Bidang Sosial Budaya juga menjadi koordinator Kabupaten pada Program Penanggulangan Kemiskinan yang merupakan Program dari Pemerintah Pusat.

Untuk Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya ini dialokasikan anggaran sebesar Rp92.915.000,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp42.531.600,- atau sekitar 45,77%. Adapun realisasi fisik program ini tercapai 100 persen yang dapat dilihat pada kinerja 2 orang Kepala Sub Bidang di bawahnya yang akan diuraikan pada uraian berikutnya.

Berdasarkan data diatas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kepala Bidang Sosial Budaya dilihat dari serapan anggaran berkategori SANGAT RENDAH dikarenakan ada kegiatan yang dilakukan melalui media virtual. Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan berkategori SANGAT TINGGI karena mencapai 100%.

Pada tahun 2020 program yang diampu oleh Kepala Bidang Sosial Budaya terdampak refocusing terkait penyediaan dana penanggulangan covid-19 dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	Kegiatan & Sub Kegiatan	PAGU	PAGU REFOCUSING	PERUBAHAN
	Koordinasi	269.838.000,-	92.915.000,-	92.915.000,-

	<p>Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</p> <p>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</p> <p>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</p> <p>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</p> <p>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</p>	<p>32.282.946,-</p> <p>9.083.210,-</p> <p>25.829.240,-</p> <p>63.395.900,-</p> <p>10.000.000,-</p> <p>24.999.940,-</p>		<p>26.882.946,-</p> <p>3.683.210,-</p> <p>20.429.240,-</p> <p>63.395.900,-</p> <p>10.000.000,-</p> <p>21.759.940,-</p>
--	--	--	--	--

Dengan ketersediaan sumber daya manusia yang dapat dilihat pada table diatas maka dalam hal ini untuk pencapaian target sekretaris yang dibantu oleh beberapa kasubid/ eselon IV dan dapat dijabarkan pada penjelasan berikut :

1) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Politik dan Pemerintahan.

a. analisis

Penilaian dan pengukuran Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Politik dan Pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2019		2020		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sub Bidang Politik dan Pemerintahan.	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Politik & Pemerintahan	100	100%	100	100%	Persentase capaian sesuai target 100%
	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi capaian Pembangunan SKPD Lingkup sub Bidang Politik Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monev Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Politik dan pemerintahan	100	100%	100	100%	Persentase capaian sesuai target 100%

Sasaran eselon IV : Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sub Bidang Politik dan Pemerintahan.

Indikator 1 : Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Politik & Pemerintahan

Pencapaian indikator I pada tahun 2019 target Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Politik & Pemerintahan 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 56.558.100,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang ASN

Sedangkan pada tahun 2020 target pencapaian Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Politik & Pemerintahan terealisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan Perencanaan Pembangunan sub Bidang Politik dan Pemerintahan dengan jumlah anggaran sebesar 49.021.000,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang ASN

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2019		2020		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sub Bidang Politik dan Pemerintahan.	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Politik & Pemerintahan	100	100%	100	100%	Persentase capaian sesuai target 100%

Dari hasil capaian realisasi tersebut sesuai dengan capaian target tetapi ada beberapa hal kendala.

Kendala :

- 1) Dari semua pokja yang ada di Bappeda, Pokja Sosial Budaya merupakan pokja yang paling banyak SKPD yang diampu sedangkan jumlah personil yang dapat digunakan untuk melakukan verifikasi sangatlah terbatas. Personil keseluruhan bidang sosial budaya berjumlah 6 orang dan hanya 3 orang yang dapat diandalkan untuk melakukan verifikasi terhadap kegiatan 10 SKPD yang diampu. Dengan demikian dapat dibayangkan bagaimana beban tiap personil yang ada di bidang sosial budaya.
- 2) Waktu yang diberikan untuk melakukan verifikasi perencanaan SKPD dirasakan masih kurang memungkinkan pokja Sosial Budaya untuk secara lebih utuh mencermati perencanaan SKPD yang diampu sehingga masih sangat dimungkinkan adanya kelemahan dalam proses pelaksanaan verifikasi dari perencanaan-perencanaan SKPD tersebut

Solusi :

- 1) Meminta SKPD untuk menyampaikan secara lebih dini perencanaan mereka sehingga ada waktu untuk melakukan pencermatan perencanaan yang diusulkan SKPD.
- 2) Memberi saran masukan kepada Tim Bappeda akan perlunya penyusunan jadwal verifikasi yang memang mampu memberikan waktu yang cukup untuk dilakukannya pencermatan secara lebih baik.

Rencana Aksi

- 1) Mengupayakan penambahan personil di bidang Sosial Budaya.
- 2) Penyusunan jadwal verifikasi yang lebih baik.

Indikator 2 : Jumlah Laporan Hasil Monev Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Politik dan pemerintahan

Pencapaian indikator I pada tahun 2019 target Jumlah Laporan Hasil Monev Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Politik dan pemerintahan 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 56.558.100,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang ASN

Sedangkan pada tahun 2020 target pencapaian Jumlah Laporan Hasil Monev Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Politik dan pemerintahan terealisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan Perencanaan Pembangunan sub Bidang Politik dan Pemerintahan dengan jumlah anggaran sebesar 49.021.000,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang ASN

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2019		2020		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi capaian Pembangunan SKPD Lingkup sub Bidang Politik Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monev Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Politik dan pemerintahan	100	100%	100	100%	Persentase capaian sesuai target 100%

Dari hasil capaian realisasi tersebut sesuai dengan capaian target tetapi ada beberapa hal kendala.

Kendala :

- 1) Kepadatan tugas di bidang sosial budaya sebagai coordinator SKPD lingkup bidang sosial budaya cukup menyita waktu sehingga kegiatan monev ini seringkali tidak maksimal dalam mencakup seluruh kegiatan pembangunan yang dilakukan SKPD.
- 2) SKPD terkait sendiri sangat jarang bertepatan waktu monevnya sehingga saat dilapangan hanya bertemu dengan para tukang yang melaksanakan pembangunan

Solusi :

- 1) Melakukan pembagian tugas di internal bidang sehingga dapat memperluas cakupan area monev yang dilakukan.
- 2) Memberi saran masukan kepada Tim Bappeda akan perlunya penyusunan jadwal verifikasi yang memang mampu memberikan waktu yang cukup untuk dilakukannya pencermatan secara lebih baik.

Rencana Aksi

- 3) Menyusun jadwal pelaksanaan monev.
- 4) Mengirim surat permintaan jadwal monev ke SKPD.

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Kegiatan & Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sub Bidang Politik dan Pemerintahan.	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Politik & Pemerintahan	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	26.882.946,-	17.638.000,-	100	35,98 Monitoring di 11 Kecamatan Monitoring di 11 Kecamatan (100%)
2.	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi capaian Pembangunan SKPD Lingkup sub Bidang Politik Pemerintahan.	Jumlah Laporan Hasil Monev Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Politik dan pemerintahan.		3.683.210,-			
				20.429.240,-			

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kasubbid Politik dan Pemerintahan mengampu 1 Kegiatan yaitu Perencanaan Pembangunan sub Bidang Politik dan Pemerintahan untuk mencapai

kinerja berupa Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sub Bidang Politik dan Pemerintahan dengan indikator Kinerja Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Politik & Pemerintahan, dan Kinerja Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi capaian Pembangunan SKPD Lingkup sub Bidang Politik Pemerintahan dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Monev Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Politik dan pemerintahan.

Berdasarkan kegiatan yang diampu oleh Kasubbid. Politik dan Pemerintahan pada tahun 2020 dapat diuraikan ke dalam penjelasan berikut :

No	Kegiatan & Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target (%)	Realisasi (%)
1.	<p>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</p> <p>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</p> <p>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</p>	<p>49.021.000,-</p> <p>26.882.946,-</p> <p>3.683.210,-</p> <p>20.429.240,-</p>	17.638.000,-	100	35,98
				Monitoring di 11 Kecamatan	Monitoring di 11 Kecamatan (100%)

1. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Politik dan Pemerintahan pada tahun 2020 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 49.021.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.638.000,- (35,98%). Rincian kegiatan dalam anggaran tersebut meliputi rapat-rapat kegiatan pendampingan penyusunan dan evaluasi rencana kerja maupun perencanaan SKPD sub bidang Politik dan Pemerintahan akan tetapi dikarenakan adanya pandemi covid-19 terkena refocusing anggaran dan beberapa kegiatan monev tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Dalam kegiatan ini juga terdapat monitoring dan evaluasi ke beberapa Kecamatan sebagai berikut :



> SMPN 4 Pelaihari
 > Kegiatan Rehabilitasi Ruang kelas dengan tingkat Kerusakan Sedang
 > Pagu Anggaran 150.000.000,-
 > Realisasi Fisik 100 %

Pembangunan DAK Fisik Bidang Pendidikan SDN & SMP Di Kecamatan Pelaihari



Ruang UKS SDN 1 Anggaa 100 %
Pagu Rp. 70.000.000,-



Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 7 Pelaihari 100 %
Pagu Rp. 200.000.000,-



Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 5 Anggaa 100 %
Pagu Rp. 121.000.000,-



Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 1 Pelaihari 100 %
Pagu Rp. 186.000.000,-

Berdasarkan perhitungan pada data tabel diatas diketahui bahwa jumlah anggaran yang dikelola oleh Kasubbid Politik dan Pemerintahan berjumlah Rp49.021.000,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp17.638.000,- atau sekitar 35,98%. Adapun realisasi fisik yang dapat dilaksanakan tercapai 100 persen.

Berdasarkan data diatas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kasubbid Politik dan Pemerintahan dilihat dari serapan anggaran berkategori SANGAT RENDAH. Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan berkategori SANGAT TINGGI karena mencapai 100%.

Terkait kinerja capaian pembangunan SKPD Lingkup Sub Bidang Politik dan Pemerintahan, Kasubbid Politik dan Pemerintahan membina 6 SKPD. Ke 6 SKPD dan capaian pembangunannya dilihat dari serapan anggaran dan kinerja fisiknya dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	SKPD	Kinerja Keuangan (%)	Kinerja Fisik (%)	Kriteria Penilaian klasifikasi kinerja Keuangan
1	DPMD	80,6	98,7	Tinggi
2	BPBD	79,8	91,5	Tinggi
3	DP2KBP3A	84,9	84,9	Tinggi
4	KESBANGPOL	77,8	89,3	Tinggi
5	SATPOL PP DAN DAMKAR	92,7	98,1	Sangat Tinggi
6	DISPENDUKCAPIL	92,3	91,9	Sangat Tinggi

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja dari SKPD Lingkup sub Bidang Politik dan Pemerintahan terlihat rata-rata Tinggi, kecuali Satpol PP & Damkar dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang kategorinya Sangat Tinggi. Ini menunjukkan bahwa hasil fasilitasi dari Kasubbid Politik dan Pemerintahan terhadap Penyusunan Perencanaan dan capaian kinerja dari SKPD-SKPD tersebut telah berjalan dengan baik.

Pada tahun 2020 kegiatan yang diampu oleh Kasubbid. Politik dan Pemerintahan terdampak refocusing terkait penyediaan dana penanggulangan covid-19 dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	KEGIATAN	PAGU	PAGU REFOCUSING	PERUBAHAN
1.	Perencanaan Pembangunan sub Bidang Politik dan Pemerintahan	182.025.000,-	49.021.000,-	49.021.000,-

2) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Sumber Daya Manusia.

a. analisis

Penilaian dan Pengukuran akuntabilitas Kinerja Kasubbid Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2019		2020		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Sumber Daya Manusia.	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Sumber Daya Manusia	100	100%	100	50%	Persentase capaian menurun dibandingkan target 100%
	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi capaian Pembangunan SKPD Lingkup sub Bidang Sumber Daya Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monev Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Sumber Daya Manusia	100	100%	100	100%	Persentase capaian sesuai target 100%

Sasaran eselon IV : Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Sumber Daya Manusia.

Indikator 1 : Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Sumber Daya Manusia

Pencapaian indikator I pada tahun 2019 Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Sumber Daya Manusia 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan kegiatan koordinasi perencanaan

pembangunan bidang sosial dan budaya dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 56.558.100,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang ASN dan 1 orang PTT

Sedangkan pada tahun 2020 target pencapaian Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Sumber Daya Manusia terealisasi sebesar 50% untuk mencapai indikator ini didukung dengan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang SDM dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 19.894.000,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang ASN dan 1 orang PTT

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2019		2020		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Melaksanakan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Sumber Daya Manusia.	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Sumber Daya Manusia	100	100%	100	50%	Persentase capaian menurun dibandingkan target 100%

Dari hasil capaian realisasi tersebut tidak sesuai dengan capaian target tetapi ada beberapa hal kendala.

Kendala :

- 1) Dari semua pokja yang ada di Bappeda, Pokja Sosial Budaya merupakan pokja yang paling banyak SKPD yang diampu sedangkan jumlah personil yang dapat digunakan untuk melakukan verifikasi sangatlah terbatas. Personil keseluruhan bidang sosial budaya berjumlah 6 orang dan hanya 3 orang yang dapat diandalkan untuk melakukan verifikasi terhadap kegiatan 10 SKPD yang diampu. Dengan demikian dapat dibayangkan bagaimana beban tiap personil yang ada di bidang sosial budaya.
- 2) Waktu yang diberikan untuk melakukan verifikasi perencanaan SKPD dirasakan masih kurang memungkinkan pokja Sosial Budaya untuk secara lebih utuh mencermati perencanaan SKPD yang diampu sehingga masih sangat dimungkinkan adanya kelemahan dalam proses pelaksanaan verifikasi dari perencanaan-perencanaan SKPD tersebut
- 3) Selain itu adanya pandemi kegiatan rapat koordinasi tidak dilaksanakan

Solusi :

- 1) Meminta SKPD untuk menyampaikan secara lebih dini perencanaan mereka sehingga ada waktu untuk melakukan pencermatan perencanaan yang diusulkan SKPD.

2) Memberi saran masukan kepada Tim Bappeda akan perlunya penyusunan jadwal verifikasi yang memang mampu memberikan waktu yang cukup untuk dilakukannya pencermatan secara lebih baik.

Rencana Aksi

- 1) Mengupayakan penambahan personil di bidang Sosial Budaya.
- 2) Penyusunan jadwal verifikasi yang lebih baik.

Indikator 2 : Jumlah Laporan Hasil Monev Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Sumber Daya Manusia

Pencapaian indikator I pada tahun 2019 Jumlah Laporan Hasil Monev Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Sumber Daya Manusia 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 56.558.100,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang ASN dan 1 orang PTT

Sedangkan pada tahun 2020 target pencapaian Jumlah Laporan Hasil Monev Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Sumber Daya Manusia terealisasi sebesar 100% untuk mencapai idikator ini didukung dengan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang SDM dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 19.894.000,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang ASN dan 1 orang PTT

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2019		2020		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi berkala Pembangunan Daerah	100	100%	100	100%	Persentase capaian sesuai target 100%

Dari hasil capaian realisasi tersebut sesuai dengan capaian target tetapi ada beberapa hal kendala.

Kendala :

- 1) Kepadatan tugas di bidang sosial budaya sebagai coordinator SKPD lingkup bidang sosial budaya cukup menyita waktu sehingga kegiatan monev ini seringkali tidak maksimal dalam mencakup seluruh kegiatan pembangunan yang dilakukan SKPD.
- 2) SKPD terkait sendiri sangat jarang bertepatan waktu monevnya sehingga saat dilapangan hanya bertemu dengan para tukang yang melaksanakan pembangunan

Solusi :

- 1) Melakukan pembagian tugas di internal bidang sehingga dapat memperluas cakupan area monev yang dilakukan.
- 2) Memberi saran masukan kepada Tim Bappeda akan perlunya penyusunan jadwal verifikasi yang memang mampu memberikan waktu yang cukup untuk dilakukannya pencermatan secara lebih baik.

Rencana Aksi

- 1) Menyusun jadwal pelaksanaan monev.
- 2) Mengirim surat permintaan jadwal monev ke SKPD.

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Target (%)	Realisasi (%)
----	---------	-------------------	----------------------	---------------	--------------------	------------	---------------

1.	Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Sumber Daya Manusia.	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Sumber Daya Manusia.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	14.431.600,-	100	52,59
				63.395.900,-	2 kali rapat 1 Dokumen 100	1 kali rapat (50%) 1 dokumen (100%) 52,59
2.	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi capaian Pembangunan SKPD Lingkup sub Bidang Sumber Daya Manusia.	Jumlah Laporan Hasil Monev Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Sumber Daya Manusia.		10.462.200,-	Monitoring di 11 Kecamatan	Monitoring di 11 Kecamatan (100%)
				10.000.000,-		
				21.759.940,-		

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kasubbid Sumber Daya manusia mengampu 2 Kegiatan yaitu Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang SDM untuk mencapai kinerja berupa Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Sumber Daya Manusia dengan indikator Kinerja Jumlah Laporan Hasil Rapat

Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Sumber Daya Manusia, dan Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Sumber Daya Manusia dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Monev Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan kegiatan yang diampu oleh Kasubbid. Sumber Daya Manusia pada tahun 2020 dapat diuraikan ke dalam penjelasan berikut :

No	Kegiatan & Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	24.000.000,-	14.431.600,-	100	52,59
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	63.395.900,-		2 kali rapat 1 Dokumen 100	1 kali rapat (50%) 1 dokumen (100%) 52,59
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10.000.000,-	10.462.200,-	Monitoring di 11 Kecamatan	Monitoring di 11 Kecamatan (100%)
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	21.759.940,-			

1. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Manusia pada tahun 2020 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 19.894.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.462.200,-. Rincian kegiatan dalam anggaran tersebut meliputi rapat-rapat kegiatan pendampingan penyusunan dan evaluasi rencana kerja maupun perencanaan SKPD sub bidang Sumber Daya Manusia

akan tetapi dikarenakan adanya pandemi covid-19 terkena refocusing anggaran. Dalam kegiatan ini juga terdapat monitoring dan evaluasi ke beberapa Kecamatan sebagai berikut :



Penambahan Gedung dan Rehabilitasi Puskesmas Angsau	3.887.725.000
Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Puskesmas Angsau	500.000.000
Pengadaan Meubeler Pusk. Angsau	360.000.000
Pengadaan Genset Pusk. Angsau	80.000.000
Pengadaan AC Pusk. Angsau, 10 Unit	55.100.000
Pengadaan APAR Pusk. Angsau. Alat pemadam api ringan	5.250.000



Penambahan Gedung dan Rehabilitasi Puskesmas 100 %

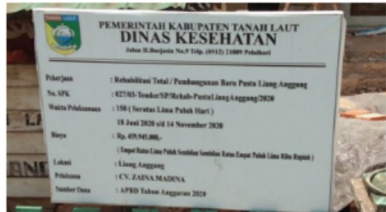


Pengadaan Meubeluer 100 %



Instalasi Pengolahan Air Limbah 100 %

Pembangunan DAK Fisik Bidang Kesehatan
Kecamatan Bati Bati



- > Puskesmas Pembantu Liang Anggang
- > Kegiatan Pembangunan Baru Puskesmas Pembantu
- > Pagu Anggaran Rp . 516.705.000,-
- > Realisasi Fisik 70 %
- > Money Tanggal 14 Nopember 2020

2. Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan pada tahun 2020 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 24.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.431.600,-. Pada kegiatan ini lebih banyak diisi oleh rapat-rapat tentang permasalahan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut yang merupakan program dari Pemerintah pusat, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Bidang Sosial Budaya merupakan koordinator di daerah.

Berdasarkan perhitungan pada data tabel diatas diketahui bahwa jumlah anggaran yang dikelola oleh Kasubbid Sumber Daya manusia dari 2 kegiatan yang dikelola berjumlah Rp43.894.000,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp24.893.800,- atau sekitar 56,71%. Adapun realisasi fisik yang dapat dilaksanakan tercapai 100 persen.

Berdasarkan data diatas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kasubbid Sumber Daya manusia dilihat dari serapan anggaran berkategori RENDAH. Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan berkategori TINGGI karena mencapai 87,5%.

Terkait kinerja capaian pembangunan SKPD Lingkup Sub Bidang Sumber Daya Manusia, Kasubbid Sumber Daya Manusia membina 3 SKPD. Ke 3 SKPD dan capaian pembangunannya dilihat dari serapan anggaran dan kinerja fisiknya dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	SKPD	Kinerja Keuangan (%)	Kinerja Fisik (%)	Kriteria Penilaian klasifikasi kinerja Keuangan
1	DINKES	75,2	78,1	Sedang
2	DISDIK	89,0	89,0	Tinggi
3	DINSOS	74,3	74,3	Sedang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja dari SKPD Lingkup sub Bidang Sumber Daya Manusia terlihat rata-rata Sedang, kecuali Dinas Pendidikan dan kebudayaan yang kategorinya Tinggi. Ini menunjukkan bahwa hasil fasilitasi dari Kasubbid Sumber Daya

Manusia terhadap Penyusunan Perencanaan dan capaian kinerja dari SKPD-SKPD tersebut telah berjalan dengan cukup baik.

Pada tahun 2020 kegiatan yang diampu oleh Kasubbid. Sumber Daya Manusia terdampak refocusing terkait penyediaan dana penanggulangan covid-19 dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	KEGIATAN	PAGU	PAGU REFOCUSING	PERUBAHAN
1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	39.813.000,-	19.894.000,-	19.894.000,-
2.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	63.395.900,-	24.000.000,-	63.395.900,-
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10.000.000,-		10.000.000,-
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	24.999.940,-		21.759.940,-

9. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

a. analisis

Penilaian dan pengukuran akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang

Penelitian dan Pengembangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2020		2021		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Meningkatnya implementasi hasil penelitian pembangunan Daerah	Persentase hasil kajian Bidang Perencanaan	100	100%	100	100%	Persentase sesuai dengan target 100%

Sasaran eselon III : Meningkatkan implementasi hasil penelitian pembangunan Daerah

Indikator 1 : Persentase hasil kajian Bidang Perencanaan

Pencapaian indikator I pada tahun 2020 target Persentase hasil kajian Bidang Perencanaan 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan Program Penelitian dan Pengembangan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 289.537.500,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 2 orang eselon IV dan 1 orang ASN Sedangkan pada tahun 2021 target pencapaian Persentase hasil kajian Bidang Perencanaan terealisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 347.461.130,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 2 orang eselon IV dan 2 orang ASN, serta 1 orang PTT

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2020		2021		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Meningkatnya implementasi hasil penelitian pembangunan Daerah	Persentase hasil kajian Bidang Perencanaan	100	100%	100	100%	Persentase capaian menurun dibandingkan target 100%

Dari hasil capaian realisasi tersebut sesuai dengan capaian target tetapi ada beberapa hal kendala.

Kendala :

- 1) kurangnya kerjasama dari skpd terkait pemberian data sesuai dengan kajian yang dikerjakan.
- 2) Kurang SDM dibidang penelitian dan pengembangan terkait dengan tugasnya.

Solusi :

- 1) Lebih instensif dalam berkoodinasi dengan skpd dalam hal permintaan data dukung
- 2) memberikan pelatihan kepada SDM terkait tugasnya.

Rencana Aksi :

- 1) penyediaan SDM yang sesuai dengan kualifikasi dan pemberian pelatihan ataupun workshop
- 2) membuka rapat koordinasi dengan SKPD terkait sebelum melaksanakan kegiatan.

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Daerah.	Persentase hasil kajian Bidang Perencanaan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	347.461.130,-	298.103.750,-	100	85,79
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Budaya	347.461.130,-	298.103.750,-	100	85,79 100
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	347.461.130,-	298.103.750,-	100	85,79 100
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	0			
			Penelitian dan Pengembangan	0			

			Lingkungan Hidup				
			Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	0			

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kepala Bidang Penelitian dan pengembangan mengampu 1 program yaitu Program Penelitian dan pengembangan untuk mencapai sasaran kinerja berupa Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan indikator Kinerja Persentase hasil kajian Bidang Perencanaan.

Untuk Program Penelitian dan pengembangan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 347.461.130,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 298.103.750,- atau sekitar 85,79%. Adapun realisasi fisik program ini tercapai 100 persen yang dapat dilihat pada kinerja 2 orang Kepala Sub Bidang di bawahnya yang akan diuraikan pada uraian berikutnya.

Berdasarkan data diatas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kepala Bidang Penelitian dan pengembangan dilihat dari serapan anggaran berkategori SANGAT TINGGI dikarenakan adanya perhitungan ulang yang mengakibatkan pengurangan anggaran dalam penyusunan Dokumen Analisis Standar Belanja dan adanya refocusing anggaran yang menyebabkan gagal di lelangkan atau dilaksanakan. Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan berkategori SANGAT TINGGI karena mencapai 100%.

Dengan ketersediaan sumber daya manusia yang dapat dilihat pada table diatas maka dalam hal ini untuk pencapaian target sekretaris yang dibantu oleh beberapa kasubid/ eselon IV dan dapat dijabarkan pada penjelasan berikut :

- 1) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya.

- a. analisis

Penilaian dan pengukuran akuntabilitas Kinerja Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2020		2021		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Kajian Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya	100	100%	100	100%	Persentase sesuai dengan target 100%

Sasaran eselon IV : Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial

Indikator 1 : Jumlah Dokumen Kajian Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Pencapaian indikator I pada tahun 2020 target Jumlah Dokumen Kajian Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Serta Review Hasil Penelitian Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 243.460.000,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang ASN

Sedangkan pada tahun 2021 target pencapaian Jumlah Dokumen Kajian Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya terealisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 347.461.130 sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang ASN

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2020		2021		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Kajian Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya	100	100%	100	100%	Persentase sesuai dengan target 100%

Dari hasil capaian realisasi tersebut sesuai dengan capaian target tetapi ada beberapa hal kendala.

Kendala :

- 1) kurangnya kerjasama dari skpd terkait pemberian data sesuai dengan kajian yang dikerjakan.
- 2) Kurang SDM dibidang penelitian dan pengembangan terkait dengan tugasnya.

Solusi :

- 1) Lebih instensif dalam berkoodinasi dengan skpd dalam hal permintaan data dukung
- 2) memberikan pelatihan kepada SDM terkait tugasnya.

Rencana Aksi :

- 1) penyediaan SDM yang sesuai dengan kualifikasi dan pemberian pelatihan ataupun workshop
- 2) membuka rapat koordinasi dengan SKPD terkait sebelum melaksanakan kegiatan.

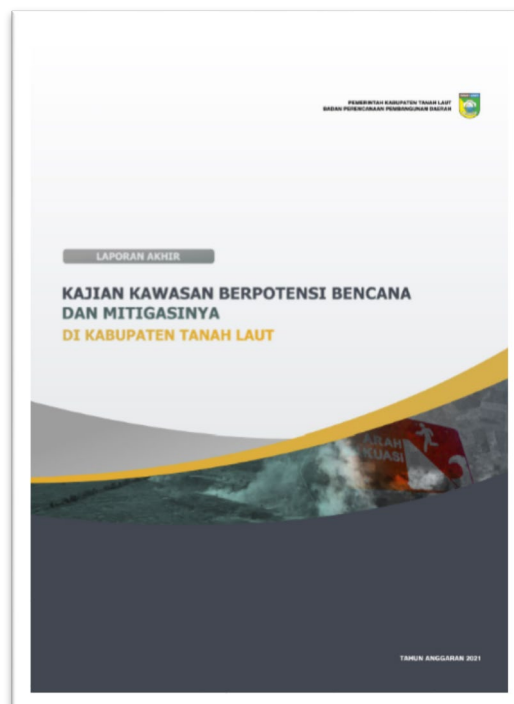
No	Kinerja	Indikator Kinerja	Kegiatan & Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Target	Realisasi
1.	Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Kajian Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya	<p>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</p> <p>Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial</p>	347.461.130,-	298.103.750,-	100 1 dokumen kajian Mitigasi Bencana	85,79% 1 dokumen kajian Mitigasi Bencana (100%)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya mengampu 1 Kegiatan yaitu Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan untuk mencapai kinerja berupa Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dengan indikator Kinerja Jumlah Dokumen Kajian Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya.

Berdasarkan kegiatan yang diampu oleh Kasubbid. Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya pada tahun 2021 dapat diuraikan ke dalam penjelasan berikut :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	347.461.130,-	298.103.750,-	100 1 dokumen kajian Mitigasi Bencana	85,79% 1 dokumen kajian Mitigasi Bencana (100%)

Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan pada tahun 2021 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 347.461.130,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 298.103.750,- (85,79%) serta terealisasi secara fisik sebesar 100%. Dalam kegiatan ini dimaksudkan untuk mengakomodir penyusunan Dokumen Kajian Mitigasi Bencana.



Berdasarkan data diatas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya dilihat dari serapan anggaran berkatagori SANGAT TINGGI. Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan berkatagori SANGAT TINGGI karena mencapai 100%.

2) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur.

a. analisis

Penilaian dan pengukuran akuntabilitas Kinerja Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2020		2021		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Kajian Bidang Infrastruktur	100	100%	100	0%	Persentase menurun dari target 100%

Sasaran eselon IV : Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup

Indikator 1 : Jumlah Dokumen Kajian Bidang Infrastruktur

Pencapaian indikator I pada tahun 2020 target Jumlah Dokumen Kajian Bidang Infrastruktur 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Serta Review Hasil Penelitian Bidang infrastruktur dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 46.077.500,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang ASN

Sedangkan pada tahun 2021 target pencapaian Jumlah Dokumen Kajian Bidang Infrastruktur terealisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Serta Review Hasil Penelitian Bidang infrastruktur dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 0,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang ASN

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2020		2021		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Kajian Bidang Infrastruktur	100	100%	100	0%	Persentase menurun dari target 100%

Dari hasil capaian realisasi tersebut sesuai dengan capaian target tetapi ada beberapa hal kendala.

Kendala :

- 1) kegiatan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan masih adanya dokumen yang relevan dan masih dapat digunakan yaitu masterplan persampahan.

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Kegiatan & Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Target	Realisasi
1.	Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial.	Jumlah Dokumen Kajian Bidang Infrastruktur.	<p>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</p> <p>Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup.</p> <p>Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan</p>	0,-	0,-	100	0
					0,-	2 Kali Rapat	0 Kali Rapat (0%)
						0 Dokumen	0 Dokumen

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur mengampu 1 Kegiatan yaitu Penelitian dan Pengembangan Serta Review Hasil Penelitian Bidang Infrastruktur untuk mencapai kinerja berupa Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial dengan indikator Kinerja Jumlah Dokumen Kajian Bidang Infrastruktur.

Berdasarkan kegiatan yang diampu oleh Kasubbid. Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur pada tahun 2021 dapat diuraikan ke dalam penjelasan berikut :

No	Kegiatan & Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan.	0,-	0,-	100	0
				2 Kali Rapat	0 Kali Rapat (0%)
				0 Dokumen	0 Dokumen
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	0,-			
	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	0,-			

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Serta Review Hasil Penelitian Bidang Infrastruktur pada tahun 2021 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 0,-.

Berdasarkan data diatas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur dilihat dari serapan anggaran berkategori SANGAT RENDAH.

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2021.

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di tahun 2021, Bappeda melaksanakan 4 Program, 15 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan . Pada tabel berikut akan digambarkan tentang anggaran dan realisasi APBD Bappeda Tahun 2021.

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi	
				Keuangan (%)	Fisik (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.976.937.090,-	8.043.643.090,-	83,05	91,07
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83.884.506,-	41.140.506,-	89,38	100
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.983.450,-	9.983.450,-	76,48	100
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.157.056,-	31.157.056,-	93,52	100
	3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.744.000,-	0,-	0	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.086.951.510,-	6.086.951.510,-	87,78	97,50
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.072.865.190,-	6.072.865.190,-	87,81	100
	2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14.086.320,-	14.086.320,-	74,42	95
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.000.000,-	50.000.000,-	30	40
	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75.000.000,-	50.000.000,-	30	40
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.017.704.670,-	847.704.670,-	57,33	100
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.718.580,-	36.718.580,-	96,10	100
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.198.890,-	56.198.890,-	61,11	100
	3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.898.800,-	32.898.800,-	84,91	100
	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.398.400,-	3.398.400,-	83,90	100
	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	918.490.000,-	718.490.000,-	53,66	100
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	111.346.840,-	248.296.840,-	96,19	100
	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	111.346.840,-	248.296.840,-	96,19	100

	Bangunan Lainnya				
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	413.512.208,-	413.512.208,-	72,30	100
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	218.887.400,-	218.887.400,-	49,31	100
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	194.624.808,-	194.624.808,-	98,16	100
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.537.356,-	356.037.356,-	73,49	100
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.200.000,-	55.200.000,-	35,56	100
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.587.356,-	108.587.356,-	54,83	100
	3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.750.000,-	24.750.000,-	64,84	100
	4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,-	167.500.000,-	99,36	100
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.336.286.362,-	825.549.762,-	39,42	100
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	950.577.536,-	569.566.136,-	41,96	100
	1. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	20.498.600,-	5.998.600,-	48,84	100
	2. Pelaksanaan Konsultasi Publik	79.625.000,-	9.000.000,-	40	100
	3. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	20.995.000,-	18.000.000,-	47,50	100
	4. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	139.457.500,-	73.625.000,-	17,04	100
	5. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	690.001.436,-	462.942.536,-	45,65	100
2	Analisis Data Dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000.000,-	0,-		0
	1. Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan	100.000.000,-	0,-	0	0

daerah					
3	Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	255.983.626,-	255.983.626,-	33,78	100
	1. Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	255.983.626,-	255.983.626,-	33,78	100
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	679.472.422,-	360.827.472,-	52,88	92,79
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	165.591.236,-	146.151.236,-	53,14	99,88
	1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	32.282.946,-	26.882.946,-	97,02	100
	2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9.083.210,-	3.683.210,-	84,61	100
	3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	25.829.240,-	20.429.240,-	34,45	100
	4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	63.395.900,-	63.395.900,-	43,32	99,41
	5. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10.000.000,-	10.000.000,-	42,73	99,89
	6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	24.999.940,-	21.759.940,-	44,53	99,97
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	211.964.230,-	79.195.140,-	51,54	88,25
	1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24.999.800,-	9.679.800,-	41,32	100

	2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	25.000.000,-	0,-	0	0
	3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	83.208.380,-	40.504.320,-	64,57	100
	4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	49.021.810,-	12.820.480,-	50,11	53
	5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	29.734.240,-	16.190.540,-	26,17	100
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	301.916.956,-	135.481.096,-	53,39	90,25
	1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	71.556.590,-	47.744.220,-	39,23	60,98
	2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	51.855.400,-	22.675.400,-	32,40	100
	3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	28.744.180,-	15.179.400,-	80,83	100
	4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	149.760.786,-	49.882.076,-	68,15	100
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	710.189.590,-	347.461.130,-	85,79	100
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	355.561.130,-	347.461.130,-	85,79	100
	1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	355.561.130,-	347.461.130,-	85,79	100
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	354.628.460,-	0,-	0	0

1. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	312.647.430,-	0,-	0	
2. Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	41.981.030,-	0,-	0	0

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021, Bappeda mengelola anggaran sebesar Rp. 10.591.538.624,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 7.494.656.107,- atau sekitar 78,25%. Dengan menggunakan skala penilaian sebagaimana telah dicantumkan diatas dapat dikatakan bahwa capaian realisasi Bappeda masih bernilai SEDANG, meskipun sebenarnya diharapkan dapat lebih baik lagi. Besaran capaian ini banyak terpengaruh oleh situasi dan kondisi Pandemi sehingga tupoksi Bappeda yang lebih banyak melakukan koordinasi dalam bentuk rapat-rapat secara tatap muka dan sebagian yang lain melibatkan kerjasama dengan pihak ketiga yang didalamnya ada dana narasumber menjadi terkendala dengan berbagai pembatasan untuk menghindari memburuknya situasi akibat pandemi. Dengan minimnya pertemuan tatap muka dan kerjasama tersebut berpengaruh pada serapan anggaran yang bisa direalisasikan.

2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program.

Telah disampaikan sebelumnya bahwa pada tahun 2021 Bappeda mengampu 4 Program sebagai alat untuk mencapai sasaran strategis Bappeda. Sasaran Strategis Bappeda meliputi 6 Sasaran yaitu :

- 1) Meningkatnya keselarasan perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD.
- 2) Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan SKPD Lingkup Sosial budaya
- 3) Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Ekonomi dan SDA.

- 4) Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- 5) Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- 6) Meningkatnya akuntabilitas Kinerja SKPD.

Sedangkan 4 program tersebut meliputi :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- 3) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 4) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Terkait dengan anggaran dan realisasi dari masing-masing sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	
				Keuangan	Fisik
1.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja SKPD.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.043.643.090,-	83,05	91,07
2.	Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	347.461.130,-	85,79	100
3.	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	360.827.472,-	52,88	92,79
4.	Meningkatnya keselarasan perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan	825.549.762,-	39,42	100

		Daerah			
5.	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Ekonomi dan SDA.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	360.827.472,-	52,88	92,79
6.	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan SKPD Lingkup Sosial budaya.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	360.827.472,-	52,88	92,79

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui anggaran dan realisasi masing-masing sasaran dan programnya yaitu :

- 1) Sasaran I : Meningkatkan keselarasan perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD.
Sasaran ini dicoba untuk diwujudkan dengan menggunakan program Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dana yang dianggarkan untuk Program ini sebesar Rp. 825.549.762,-. Realisasi dari anggaran terkait program ini adalah sebesar 39,42%.
- 2) Sasaran II : Meningkatkan Keselarasan Perencanaan pembangunan SKPD Lingkup Sosial budaya.
Sasaran ini dicoba untuk diwujudkan dengan menggunakan program Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Dana yang dianggarkan untuk Program ini sebesar Rp. 360.827.472,-. Realisasi dari anggaran terkait program ini adalah sebesar 52,88%.
- 3) Sasaran III : Meningkatkan Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Ekonomi dan SDA.
Sasaran ini dicoba untuk diwujudkan dengan menggunakan program Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Dana yang dianggarkan untuk Program ini

sebesar Rp. 360.827.472,-. Realisasi dari anggaran terkait program ini adalah sebesar 52,88%.

- 4) Sasaran IV : Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Sasaran ini dicoba untuk diwujudkan dengan menggunakan program Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Dana yang dianggarkan untuk Program ini sebesar Rp. 360.827.472,-. Realisasi dari anggaran terkait program ini adalah sebesar 52,88%.

- 5) Sasaran V : Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Sasaran ini dicoba untuk diwujudkan dengan menggunakan program Program Penelitian dan Pengembangan. Dana yang dianggarkan untuk Program ini sebesar Rp. 347461.130,-. Realisasi dari anggaran terkait program ini adalah sebesar 85,79%.

- 6) Sasaran VI : Meningkatnya akuntabilitas Kinerja SKPD.

Sasaran ini dicoba untuk diwujudkan dengan menggunakan 1 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dana yang dianggarkan untuk Program ini sebesar Rp. 8.043.643.090,- dan terealisasi sebesar 91,07%.

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan 2021.

Berikut akan digambarkan perbandingan antara kegiatan-kegiatan yang ada di tahun 2020 dan Tahun 2021. Perbandingan yang dilakukan tidak sepenuhnya dapat dilakukan secara paralel per program dan kegiatan karena ada sebagian program atau kegiatan yang ada di tahun 2020 tetapi tidak ada lagi di tahun 2021. Demikian pula sebaliknya, ada program kegiatan yang ada di tahun 2021 tetapi tidak ada di tahun 2020. Terdapat pula perubahan nama program yang diakibatkan numenklatur yang berbeda disebabkan aturan yang digunakan di tahun 2019 adalah numenklatur berdasarkan Permendagri Nomor 13

sedangkan pada tahun 2021 menggunakan numenklatur dari Permendagri 90 Tahun 2019.

Pada Tabel dibawah ada kode NA yang berarti "Not Available". Kode ini muncul untuk menggambarkan ketidakadaan pasangan untuk diperbandingkan. Bisa jadi kode NA muncul di 2019, berarti program atau kegiatan itu baru muncul di Tahun 2021 dan tidak ada di Tahun 2020, demikian pula sebaliknya, ketika kode NA muncul di Tahun 2020 maka berarti kegiatan yg dulunya ada di tahun 2020, tidak lagi ada di tahun 2021.

Mengingat bahwa perbandingan ditujukan untuk melihat efisiensi capaian anggaran maka semua Program dan kegiatan yang mengandung kode NA akan diabaikan kecuali kalau hanya terjadi perubahan numenklatur saja, bukan karena memang tidak ada program atau kegiatannya di kedua tahun yang diperbandingkan. Untuk melihat perbandingan program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan		Anggaran (Pagu)		Realisasi (%)	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.043.643.090,	987.237.784,-	83,05	92,91
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	847.704.670,-	255.954.295,-	57,33	79,90
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		36.718.580,-		96,10	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		56.198.890,-		61,11	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		32.898.800,-		84,91	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		3.398.400,-		83,90	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	718.490.000,-	389.806.173,-	53,66	96,37
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	413.512.208,-	326.776.800,-	72,30	98,81
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		218.887.400,-		49,31	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		194.624.808,-		98,16	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	248.296.840,-	396.702.400,-	96,19	94,27
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		248.296.840,-		96,19	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	356.037.356,-	170.943.000,-	73,49	63,48
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		55.200.000,-		35,56	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		108.587.356,-		54,83	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		24.750.000,-		64,84	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		167.500.000,-		99,36	
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		382.924.600,-	
	NA	Program Perencanaan,	10.985.100,-	23.967.600,-	71,64	81,45

		Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan laporan keuangan	6.086.951.510,-	9.134.200,-	87,78	82,53
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		6.072.865.190,-		87,81	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		14.086.320,-		74,42	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	41.140.506,-	6.164.700,-	89,38	92,22
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		9.983.450,-		76,48	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		31.157.056,-		93,52	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD	0,-	45.000.000,-	0,-	0
		Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan		20.000.000,-		0
	NA	Pembuatan dan Pemeliharaan Sistem Informasi SKPD	NA	25.000.000,-	NA	0
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	50.000.000,-	15.000.000,-	30	70
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	50.000.000,-	15.000.000,-	30	70
	NA	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	NA	0	NA	0
	Program penelitian dan pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan	684.321.750,-	289.537.500,-	31,26	49,66
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Serta Review Hasil Penelitian Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	347.461.130,-	243.460.000,-	85,79	49,74
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		347.461.130,-		85,79	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Serta Review Hasil Penelitian Bidang Infrastruktur	0,-	46.077.500,-	0	49,25
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		0,-		0	
	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan		0,-		0	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	NA	131.209.400,-	NA	58,64

	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Wilayah	15.179.400,-	46.051.900,-	80,83	57,52
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		49.882.076,-		68,15	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Infrastruktur Wilayah	47.744.220,-	85.157.500,-	NA	59,52
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		22.675.400,-			
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan Daerah	1.144.278.000,-	915.298.280,-	56,43	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Review RPJMD		194.625.880,-		13,93
		Penyusunan RKPD	462.942.536,-	632.628.100,-	45,65	57,72
	Pelaksanaan Konsultasi Publik		9.000.000,-		40	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		18.000.000,-		47,50	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		73.625.000,-		17,04	
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu		5.998.600,-		48,84	

	Strategis Pembangunan Daerah					
	Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	255.983.626,-	84.806.000,-	33,78	60,36
	Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah		255.983.626,-		33,78	
	NA	Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Menjadi kegiatan yg masuk ke Prog. Perencanaan Sosial Budaya)	NA	24.000.000,-	NA	60,13
	Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD	Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD (Menjadi kegiatan yg masuk ke dalam program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD)	9.999.500,-	8.668.700,-	76,65	72,64
	NA	Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	NA	3.238.300,-	NA	70,59
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan SDA	246.401.050,-	76.872.880,-	23,01	44,86
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	12.820.480,-	34.517.880,-	50,11	21,68
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		16.190.540,-		26,17	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian, Industri, Perdagangan dan Koperasi	9.679.800,-	42.355.000,-	41,32	63,75
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		0,-		0,-	

	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		40.504.320,-		64,57	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	56.558.100,-	92.915.000,-		45,77
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang SDM	63.395.900,-	19.894.000,-	43,32	52,59
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		10.000.000,-		42,73	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		21.759.940,-		44,53	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Perencanaan Pembangunan sub Bidang Politik dan Pemerintahan	26.882.946,-	49.021.000,-	97,02	35,98
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		3.683.210,-		84,61	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		20.429.240,-		34,45	

Dari tabel diatas dapat diketahui :

- 1) Program Pelayanan Jasa Administrasi (2019) dan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (2020). Program ini isinya relatif sama, hanya berbeda numenklatur program dan kegiatannya saja. Di tahun 2020, terdapat penyederhanaan nama kegiatan dengan nama kegiatan

Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran. Satu kegiatan ini merangkum 8 kegiatan yang ada di tahun 2019 yaitu (1) kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; (2) Penyediaan jasa administrasi keuangan; (3) Penyediaan jasa kebersihan kantor; (4) Penyediaan alat tulis kantor; (5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; (6) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor; (7) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan; Rerata dari serapan 8 kegiatan yang ada di tahun 2019 menunjukkan hasil serapan sebesar 69,59%, sedangkan di tahun 2020 tercapai 79,90%. Terlihat bahwa pencapaian di tahun 2020 tercapai dengan lebih baik. Selain pada kegiatan Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran (2020), terdapat kegiatan lain yang merangkum beberapa kegiatan yang ada di tahun 2019 yaitu kegiatan Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi yang merangkum kegiatan 2019 yaitu : (1) Penyediaan makanan dan minuman; (2) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah; (3) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah. Rerata dari serapan 3 kegiatan yang ada di tahun 2019 tersebut menunjukkan hasil serapan sebesar 93,87%, sedangkan di tahun 2020 tercapai 96,37%. Terlihat bahwa pencapaian di tahun 2020 juga tercapai dengan lebih baik. Adapun kegiatan yang numenklaturnya hampir sama di tahun 2019 dan 2020 adalah kegiatan Penyedia jasa penunjang kinerja SKPD (2019) dan Kegiatan Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD (2020). Dilihat dari sisi serapan, serapan di tahun 2020 terlihat lebih baik yaitu 89,80% dibanding serapan di tahun 2019 yang hanya mencapai 72,85%.

Apabila dilihat dari perbandingan realisasi anggaran pada pada level program, realisasi di Tahun 2019 mencapai 92,70% sedangkan pada tahun 2020 realisasi mencapai 92,91. Dari perbandingan ini dapat dikatakan bahwa capaian realisasi anggaran di tahun 2020 tercapai lebih

tinggi. Belum lagi jika dilihat dari pagu anggaran yang lebih sedikit di tahun 2020 dibanding dengan tahun 2019. Kedua kondisi ini menunjukkan anggaran di tahun 2020 teranggarkan dan terserap secara lebih efisien.

2) Program Peningkatan sarana dan prasana aparatur (2019) dan Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia (2020).

Tabel menunjukkan bahwa di level program, dari sisi serapan anggaran di tahun 2020 mencapai 89,80%, serapan ini lebih baik dari pelaksanaan di tahun 2019 yang hanya mencapai 72,85%. Jika dilihat secara lebih mendalam maka serapan di tahun 2020 juga lebih baik dari tahun 2019. Ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja terhadap pelaksanaan di tahun 2020. Pada tahun 2020 juga terdapat perangkuman kegiatan tahun 2019 dari 2 kegiatan menjadi 1 kegiatan yaitu Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran (2020) yang merangkum kegiatan (1) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dan (2) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor. Rerata dari kedua kegiatan di tahun 2019 menghasilkan serapan sebesar 38,94%, sedangkan di tahun 2020 mencapai serapan 63,48%. Kegiatan lainnya yang dapat diperbandingkan adalah kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor (2019) dengan capaian 88,59%, sedangkan di tahun 2020 mencapai 94,27%. Pencapaian di tahun 2020 juga menunjukkan angka yang lebih baik. Kegiatan lain yang juga dapat diperbandingkan adalah kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (2019) dengan kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (2020). Tabel menunjukkan bahwa serapan tahun 2020 juga lebih baik yaitu mencapai 97,68% dibanding serapan tahun 2019 yang hanya mencapai 93,48%.

3) Program Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (2019) dan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD (2020).

Dilihat dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (2019) menggunakan anggaran Rp10.985.100,- dan terealisasi sebesar 71,64%. Pada tahun 2020, kegiatan ini berubah numenklatur menjadi kegiatan Penyusunan Laporan keuangan dengan anggaran dana Rp9.134.200,- dan terealisasi sebesar 82,53%. Dari perbandingan capaian realisasi anggaran dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan ini terlaksana dengan lebih baik di tahun 2020.

4) Program Penelitian dan Pengembangan (2019) dan Program Penelitian dan Pengembangan (2020).

Dilihat dari tabel diatas dapat dilihat bahwa numenklatur program tidak berubah. Demikian pula dengan jumlah kegiatan yang terkait program ini. Perubahan hanya terdapat pada numenklatur kegiatan. Pada tahun 2019, kegiatan Penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan bidang ekonomi & sosial budaya berubah namanya menjadi kegiatan Penelitian dan Pengembangan Serta Review Hasil Penelitian Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya. Jika dilihat kepada anggaran yang dialokasikan, tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp205.559.700,- dengan capaian sebesar 77,44%. Sedangkan pada tahun 2020 dianggarkan dana lebih besar yaitu Rp243.460.000,- dengan capaian 49,74%. Jadi terlihat meskipun anggaran dialokasikan lebih besar namun realisasinya hanya mencapai 47,74% saja.

Pada kegiatan lainnya yaitu Penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur (2019) berubah numenklatur kegiatannya menjadi Penelitian dan Pengembangan Serta Review Hasil Penelitian Bidang Infrastruktur (2020). Pada kegiatan ini dianggarkan dana lebih besar ditahun 2019 namun capaiannya hanya 11,44%. Pada tahun 2020 untuk kegiatan bidang infrastruktur ini hanya dianggarkan sebesar Rp46.007.500,- akibat terkena refocusing anggaran. Dari dana Rp46.007.500,- hanya terealisasi sebesar 49,25%.

5) Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media (2019) dan Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD (2020).

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk program ini hanya ada 1 kegiatan yang dapat dibandingkan, itupun perbandingannya kurang menarik untuk dibicarakan. Pada tahun 2019, kegiatan Penyebarluasan informasi pembangunan daerah digunakan untuk membiayai pelaksanaan pameran pembangunan dan pameran anggrek dengan dana Rp160.250.000,- dan terealisasi sebesar 22,74%. Ditahun 2020, karena kondisi pandemi maka kegiatan pameran ditiadakan sehingga dana Rp20.000.000,- yang dianggarkan tidak direalisasikan.

6) Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah (2019) dan Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia (2020).

Pada Program ini hanya ada 1 kegiatan yang dapat dibandingkan yaitu kegiatan Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana (2019) dengan kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur (2020). Pada tahun 2019 dianggarkan dana sebesar Rp230.289.950,- dengan capaian 20,43%. Sedangkan pada tahun 2020 dianggarkan Rp15.000.000,- dan terealisasi sebesar 70%. Secara perbandingan realisasi memang capaian di tahun 2020 jauh lebih tinggi dari capaian di tahun 2019, tetapi jika dilihat dari pagu anggaran maka capaian 70% ini tidak berarti apa-apa karena anggaran 2019 berpuluh kali lipat dari anggaran 2020. Kembali penyebab dari kondisi rendanya penganggaran ini akibat adanya kebijakan refocusing anggaran terkait situasi pandemi.

7) Program perencanaan pembangunan daerah (2019) dan Program Perencanaan Pembangunan Daerah (2020).

Program ini merupakan ruhnya Bappeda karena menyangku perencanaan dan produk layanan Bappeda selaku institusi perencana di daerah. Kegiatan yang ada di Program inipun relatif sama dan walaupun berbeda hanya pada penamaan kegiatan saja. Pada tahun 2019 terdapat 6 kegiatan namun pada 2020 hanya ada 4 kegiatan. Berkurangnya kegiatan

ini disebabkan ada 2 kegiatan yang semula termasuk di dalam program Perencanaan Pembangunan Daerah dipindahkan ke Program lain yaitu Kegiatan Penanggulangan kemiskinan daerah dipindahkan menjadi kegiatan pada program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya, dan Kegiatan Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD menjadi kegiatan di program Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan di Sekretariat dalam bentuk kegiatan Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD.

Kegiatan Penetapan RPJMD yang pada tahun 2019 dianggarkan dana sebesar Rp206.370.000,- terealisasi sebesar 40,39%. Pada tahun 2020, Kegiatan ini berubah menjadi kegiatan Review RPJMD dengan pagu anggaran 194.625.880,- dengan realisasi 13,93%. Ini menunjukkan serapan anggaran ditahun 2019 masih lebih baik dibandingkan serapan anggaran 2020.

Pada kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD (2019) dianggarkan dana sebesar Rp629.133.700,- dan terealisasi sebesar 53,78%. Pada tahun 2020, kegiatan tersebut menjadi kegiatan Penyusunan RKPD dengan apgu anggaran Rp632.628.100,- dan teralisasi sebesar 57,72%. Dari kondisi ini terlihat capaian di tahun 2020 memang lebih baik dari capaian tahun 2019.

Pada Tahun 2020 terdapat perangkuman 2 kegiatan tahun 2019 yaitu kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dan kegiatan Pengendalian pelaksanaan DAK dirangkum menjadi kegiatan Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.

Untuk Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan (2019) dianggarkan sebesar Rp92.032.700,- dan terealisasi sebesar 30,63%. Kegiatan Pengendalian pelaksanaan DAK dianggarkan dana Rp21.933.600,- dengan realisasi sebesar 59,52%. Jika capaian realisasi kedua kegiatan ini dirata-ratakan maka menghasilkan angka capaian sebesar 45.07%. Angka capaian 45.01 persen ini lebih rendah dari capaian kegiatan yang

merangkum kedua kegiatan di tahun 2019 tersebut yaitu kegiatan Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan yang pada tahun 2020 mencapai serapan sebesar 60,36%. Dengan demikian capaian tahun 2020 lebih baik dari capaian tahun 2019.

Untuk kegiatan Penanggulangan kemiskinan daerah (2019) berubah posisinya dari semula termasuk dalam program Program perencanaan pembangunan daerah di tahun 2019, menjadi termasuk kedalam program Perencanaan Sosial Budaya pada tahun 2020. Pada kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp184.808.500,- dan terealisasi sebesar 94,75%. Pada tahun 2020 hanya dianggarkan Rp24.000.000,- dan terealisasi sebesar 60,13%. Angka capaian dari kedua tahun pelaksanaan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tahun 2019 masih lebih baik dibanding tahun 2020.

Untuk kegiatan Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD (2019) yang semula berada dalam program Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2019, berubah menjadi kegiatan pada program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD pada tahun 2020. Pada kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp.9.999.500,- dan terealisasi sebesar 76,65%. Sedangkan pada tahun 2020 dianggarkan dana sebesar Rp.8668.700,- terealisasi sebesar 72,64%. Dari perbandingan capaian kedua tahun tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan ini di tahun 2019 lebih baik dibandingkan pelaksanaannya di tahun 2020.

8) Program perencanaan pembangunan ekonomi (2019) dan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan SDA (2020).

Pada program ini terdapat 2 kegiatan yang dapat dibandingkan pencapaiannya. 1 kegiatan yang lain tidak dapat diperbandingkan karena hanya ada di tahun 2019 dan tidak dilaksanakan lagi pada tahun 2020.

Kegiatan Pengembangan usaha sumber daya alam dan ekonomi kreatif (2019) berganti namanya menjadi Perencanaan Pembangunan Sub

Bidang SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di tahun 2020. Pada kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp98.992.200,- dan terealisasi sebesar atau sekitar 18,53%. Pada tahun 2020 dianggarkan Rp34.517.880,- dan terealisasi sebesar 21,68%. Jika dilihat dari angka realisasinya dapat dikatakan bahwa pencapaian di tahun 2020 tidak terlalu signifikan perbedaannya karena dana di tahun 2019 justru lebih besar yaitu hampir 2 kali lipat penganggaran 2020.

Kegiatan lainnya di program ini adalah kegiatan Perencanaan pembangunan bidang ekonomi (2019) yang berubah menjadi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian, Industri, Perdagangan dan Koperasi di tahun 2020. Pada tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp121.390.000,- dan terealisasi sebesar 17,58% , sedangkan pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp42.355.000,- dengan realisasi sebesar 63,75%. Dengan membandingkan angka realisasi tersebut masih dapat dikatakan bahwa pencapaian pelaksanaan kegiatan ini di tahun 2020 masih lebih baik daripada pencapaian di tahun 2019.

9) Program perencanaan sosial budaya (2019) dan Program Perencanaan Sosial dan Budaya (2020).

Dari tabel diatas Pada program ini hanya ada 1 kegiatan yang dapat dibandingkan pelaksanaannya ditahun 2019 dan tahun 2020 yaitu kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya (2019) yang namanya berubah menjadi Perencanaan Pembangunan sub Bidang Politik dan Pemerintahan. Pada tahun 2019 dianggarkan dana sebesar Rp56.558.100,- dengan realisasi sebesar 64,04%. Pada tahun 2020 dianggarkan sebesar 49.021.000,- dan terealisasi sebesar 35,98%. Dari perbandingan persentase capaian tersebut dapat dikatakan kinerja pelaksanaan kegiatan di tahun 2019 lebih baik dari tahun 2020.

Penyusunan anggaran harus lebih hemat dan menghindari penyusunan anggaran pada zona nyaman dan cenderung sama dan rutin setiap tahun.

2. Pandemi Covid-19 yang berlanjut di tahun 2021 sehingga SKPD harus melakukan kegiatan yang bersifat online/daring, serta SKPD melakukan penghematan harus dilakukan mulai pada level perencanaan, menghitung keperluan minimal dan menyerap anggaran secara maksimal.
3. Koordinasi dengan SKPD harus terus ditingkatkan sehingga peningkatan keselarasan perencanaan pembangunan SKPD semakin dapat diwujudkan dan kinerja Bappeda dan SKPD dapat lebih meningkat.
4. Mengingat perencanaan yang dihasilkan sangat tergantung dengan kualitas SDM Perencananya maka kualitas SDM perencana ini harus terus dilakukan. Perlu dilakukan bimtek kepada SDM perencana karena sistem perencanaan yang berlaku sekarang yaitu SIPD belum dikuasai dengan optimal oleh SDM Perencana se Kabupaten.

Lampiran :

1. IKU
2. Pernyataan Hasil Reviu
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 bertanda tangan
4. Cascading/Pohon Kinerja
5. Capaian Kinerja Per Triwulan (1-4)
6. Monev Renstra
7. Matrik Keselarasan